

**ANALISIS FAKTOR - FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
KEMISKINAN DI PROVINSI SUMATERA UTARA**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)*



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Oleh:

Nama : Nailly Ulyah Masni
NPM : 1905180013
Program Studi : Ekonomi Pembangunan

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

MEDAN

2023

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023, pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, dan seterusnya.

MEMUTUSKAN

Nama : NAILY ULYAH MASNI
NPM : 1905180013
Jurusan : EKONOMI PEMBANGUNAN
Judul Skripsi : ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
KEMISKINAN DI PROVINSI SUMATERA UTARA

Dinyatakan : (B+) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

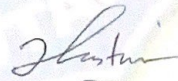
Tim Penguji

Penguji I



(Dra. ROSWITA HAFNI, M.Si)

Penguji II



(HASTINA FEBRIANTY, S.E., M.Si)

Pembimbing



(Dra. Hj. LAILAN SAFINA HASIBUAN, M.Si)

Panitia Ujian

Ketua



(Dr. H. JANURI, S.E., M.M., M.Si., C.M.A.)



Sekretaris



(Assoc. Prof. Dr. ADE GUNAWAN, S.E., M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

Nama : NAILY ULYAH MASNI
NPM : 1905180013
Jurusan : EKONOMI PEMBANGUNAN
Judul Skripsi : ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
KEMISKINAN DI PROVINSI SUMATERA UTARA

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian
mempertahankan skripsi.

Medan, Mei 2023

Pembimbing Skripsi

Dra. Hj. LAILAN SAFINA HASIBUAN, M.Si

Diketahui/Disetujui
Oleh:

Ketua Program Studi
Ekonomi Pembangunan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

Dr. PRAWIDYA HARIANI RS, SE, M.Si

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



Dr. JANURI, SE, MM, M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : NAILY ULYAH MASNI
NPM : 1905180013
Jurusan : EKONOMI PEMBANGUNAN
Alamat Rumah : JL. BANDAR LABUHAN BAWAH NO. 6 TANJUNG MORAWA
Judul Skripsi : ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMISKINAN DI
PROVINSI SUMATERA UTARA

Tanggal	Deskripsi Bimbingan Skripsi	Paraf	Keterangan
11-06-2023	- Perbaiki cover ² yg sdh diberikan Ada halaman yg hrs di skip. - Selesaikan urutan penulisan bab 4 dengan tujuan penelitian. - Hasil pengolahan data agar ada dalam bentuk log.	} h	
07-07-2023	- Perbaiki kreksi yg sudah dibuat - Interpretasi hasil olahan data kait kan ke teori yg ada. - Perbaiki penulisan sam dan kesimpulan	} h	
10-07-2023	- Buat abstrak - Perbaiki daftar tabel - Rapihan penjenakan	} h	
21-07-2023	Telah selesai dipeker, acc untuk hidang skripsi	} h	

Pembimbing Skripsi

Dra. Hj. LAILAN SAFINA HASIBUAN, M.Si

Medan, Mei 2023
Diketahui /Disetujui
Ketua Program Studi
Ekonomi Pembangunan

Dr. PRAWIDYA HARIANI RS, SE, M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NAILY ULYAH MASNI
NPM : 1905180013
Jurusan : Ekonomi Pembangunan
Judul Skripsi : ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMISKINAN DI PROVINSI SUMATERA UTARA

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis, secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari skripsi ini merupakan hasil Plagiat atau merupakan hasil karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Saya yang menyatakan



NAILY ULYAH MASNI

ABSTRACT

The purpose of this study is to carry out a descriptive economic analysis of the development of the poverty rate in Indonesia in 2012-2022, to carry out a descriptive economic analysis of the development of the poverty rate in the Province of North Sumatra in the year 2012-2022 and to estimate the factors that influence poverty in the Province of North Sumatra. The analytical method used is descriptive analysis and econometric model analysis. The results of this study show that the development of poverty in North Sumatra Province is quite fluctuating and changes very quickly every year with the large number of people in North Sumatra Province, the percentage of poor people who exist is also large, there are several factors that influence poverty itself, including increasing population, Human Development Index (IPM), GRDP and also unemployment. The results of the estimation of the Econometric model on the factors that influence poverty are positive and in accordance with the research hypothesis where the variables of Poor Population, GRDP, HDI, and unemployment together significantly influence the growth of poverty in North Sumatra Province by 1,000 or 100%.

Keywords: Poverty, Total Population, Human Development Index

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah Melakukan analisis ekonomi secara deskriptif tentang perkembangan tingkat kemiskinan di Indonesia pada tahun 2012-2022, Melakukan analisis ekonomi secara deskriptif tentang perkembangan tingkat kemiskinan di Povinsi Sumatera Utara pada tahun 2012-2022 dan Mengestimasi faktor yang mempengaruhi kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara. Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif dan analisis model ekonometrika. Hasil penelitian ini menunjukkan Perkembangan kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara cukup fluktuatif dan sangat cepat berubah setiap tahunnya dengan banyaknya jumlah penduduk yang ada di Provinsi Sumatera Utara, penduduk miskin yang ada juga presentasinya besar terdapat beberapa factor-faktor yang mepengaruhi kemiskinan itu sendiri antara lain bertambahnya Jumlah penduduk, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), PDRB dan juga pengangguran. Hasil estimasi model Ekonometrika terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan hasilnya adalah positif dan sesuai dengan hipotesa penelitian dimana variabel Jumlah Penduduk Miskin, PDRB, IPM, dan pengangguran bersama sama dan secara signifikan mempengaruhi pertumbuhan kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara sebesar 1.000 atau 100%.

Kata Kunci : Kemiskinan, Jumlah Penduduk, Indeks Pembangunan Manusia

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum, Wr.Wb

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa berkat Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMISKINAN DI PROVINSI SUMATERA UTARA”** guna melengkapi tugas-tugas serta memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Peneliti menyadari bahwa isi yang terkandung dalam skripsi ini belum sempurna, hal ini disebabkan oleh keterbatasan waktu, kemampuan dan pengalaman yang peneliti miliki dalam penyajiannya. Oleh karena itu dengan hati yang sangat tulus peneliti menerima kritik dan saran serta masukan yang membangun dari para pembaca, yang nantinya dapat berguna untuk penyempurnaan sidang meja hijau. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan dan membutuhkan kritikan yang membangun dari pihak-pihak yang bersangkutan demi kesempurnaan skripsi ini agar dapat memberikan manfaat di bidang pendidikan dan pembelajaran serta dapat diteliti lebih lanjut. Adapun ucapan terima kasih ini penulis tunjukan kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta Rezeki-nya yang luar biasa nikmat iman dan nikmat kesehatan kepada saya. Dan atas izinnya saya bisa menyelesaikan skripsi ini.

2. Kedua orang tua, papa saya Mashen Indriya dan mama Rohani Panjaitan yang sangat saya sayangi dan cintai yang selalu ada untuk saya berupa besarnya perhatian, pengorbanan, bimbingan serta doa yang tulus terhadap saya dan juga memberikan semangat serta dukungan kepada saya dalam menghadapi segala proses yang di jalani dan membuat saya kuat dalam menghadapi segala situasi.
3. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.A.P. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak H. Januri S.E.,M.M.,M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan S.E.,M.Si selaku wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Dr. Hasrudi Tanjung S.E.,M.Si. selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu Dr. Prawidya Hariani RS. S.E., M.Si selaku Ketua Prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Ibu Dra. Roswita Hafni, M.Si. selaku Sekretaris Prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
9. Ibu Dra. Lailan Safina Hasibuan, M.Si selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan saya dalam menyusun skripsi ini.

10. Seluruh Dosen, Pegawai, dan Staff pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
11. Kepada adik saya Nayla dan Marsya yang telah mendengarkan keluh kesah saya dan juga memberikan semangat kepada saya.
12. Terima kasih untuk Pani, Nadia, Pipit, Devi, Ocha, Nabila, Fadhillah dan Kak Liza yang selalu mensupport, menghibur dan menemani saya sampai sekarang ini.
13. Kepada teman-teman kampus saya (Anak Suci Tanpa Dosa) dan teman SMA saya (Exsis) yang memberikan semangat dalam mengerjakan skripsi saya.
14. Terima kasih banyak atas segala bantuan dan doanya bagi seluruh pihak yang telah membantu saya yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu.
15. Kepada diri saya sendiri Nailly Ulyah Masni, terima kasih sudah bertahan dan tetap berusaha sampai tahap ini walaupun banyak hal yang tidak menyenangkan dan memilih untuk tidak menyerah.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat, menambah pengetahuan bagi kita semua, *Aamiin...ya Rabbal Alaamiin... Wassalamu 'alaikum wr.wb*

Medan, Juni 2023

Naily Ulyah Masni
NPM. 1905180013

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
ABSTRACT	iv
ABSTRAK	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah	21
1.3 Batasan Masalah.....	21
1.4 Rumusan Masalah	22
1.5 Tujuan Penelitian.....	22
1.6 Manfaat Penelitian.....	22
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	24
2.1 Landasan Teori	24
2.1.1 Pendapatan Nasional.....	24
2.1.2 Indeks Pembangunan Manusia	28
2.1.3 Teori Kependudukan.....	32
2.1.4. Pengangguran	42
2.1.5 Kemiskinan	46

2.1.6 Kebijakan Pemerintah.....	51
2.2 Penelitian Terdahulu.....	58
2.3 Kerangka Berpikir Konseptual.....	61
2.4 Hipotesis.....	62
BAB III METODE PENELITIAN	63
3.1 Jenis Penelitian.....	63
3.2 Definisi Operasional.....	63
3.3 Tempat dan Waktu Penelitian	64
3.3.1 Tempat Penelitian.....	64
3.3.2 Waktu Penelitian.....	64
3.4 Teknik Pengumpulan Data	64
3.5 Teknik Analisis Data.....	65
3.5.1 Metode Analisis Deskriptif.....	65
3.5.2 Metode Analisis Model Ekonometrika	66
3.5.3 Metode Analisis Model Ekonometrika	65
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	74
4.1 Perkembangan Tingkat Kemiskinan di Indonesia Tahun 2012 - 2022	74
4.1.1 Tingkat kemiskinan di Indonesia.....	74
4.1.2 Indeks Kedalaman Kemiskinan di Indonesia (<i>Poverty Gap Index</i>).....	78
4.1.3 Garis Kemiskinan di Indonesia (GK)	80
4.2.1 Tingkat Kemiskinan Provinsi Sumatera Utara	83
4.2.2 Indeks Kedalaman Kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara (<i>Poverty</i>	

<i>Gap Index</i>)	86
4.2.3 Garis Kemiskinan di Sumatera Utara.....	87
4.2.3 Indeks Keparahan Kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara	88
4.5 Estimasi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara	89
4.6.1 Penaksiran.....	94
4.6.2 Interpretasi Hasil.....	95
4.6.3 Konstanta Dan Intersep.....	Error! Bookmark not defined.
4.6.4 Uji Statistik	96
4.6.5 Uji Asumsi Klasik.....	97
4.6.6 Pembahasan Hasil Model Regresi	99
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	103
5.1 Kesimpulan.....	103
5.2 Saran.....	104
DAFTAR PUSTAKA	105

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan 2010 Provinsi Sumatera Utara (Rupiah).....	12
Tabel 1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Penduduk Umur 15 Tahun Keatas Menurut Kab/Kota (Persen).....	17
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	58
Tabel 3.1 Defenisi Operasional Variabel	64
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Menurut Provinsi di Indonesia Tahun 2018 – 2022	74
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia Tahun 2012 – 2022.....	76
Tabel 4. 3 Index Kedalaman Kemiskinan Menurut Provinsi dan Daerah	78
Tabel 4. 4 Garis Kemsikinan Menurut Provinsi dan Daerah.....	80
Tabel 4. 5 Indeks Keparahan Kemiskinan di Indonesia Menurut Daerah.....	82
Tabel 4.6 Jumlah Penduduk Miskin dari Tahun 2012 – 2022	84
Tabel 4. 7 Index Kedalaman Kemiskinan di Sumatera Utara (Persen)	86
Tabel 4.8 Garis Kemiskinan Provinsi Sumatera Utara.....	87
Tabel 4.9 Indeks Keparahan Kemiskinan Provinsi Sumatera Utara	88
Tabel 4.10 Proyeksi Penduduk provinsi Sumatera Utara Tahun 2012-2022	89
Tabel 4.11 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2012 - 2022	91
Tabel 4.12 PDRB perkapita Provinsi Sumatera Utara	92
Tabel 4.13 Jumlah pengangguran Provinsi Sumatera Utara Tahun 2012 - 2022..	93
Tabel 4.14 Hasil Regresi Linier Berganda	Error! Bookmark not defined.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia 2018–2022 (Juta Orang)	7
Gambar 1. 2 Terdapat 10 Provinsi dengan Jumlah Penduduk Miskin Terbanyak ..	8
Gambar 1. 4 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Sumatera Utara.....	10
Gambar 1. 5 Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2022.....	14
Gambar 1. 6 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sumatera Utara Tahun 2018 – 2022	15
Gambar 2. 1 Lingkaran Setan Kemiskinan Versi Nurkse	49
Gambar 2. 2 Kerangka Konseptual	61
Gambar 2. 3 Bagan Kerangka Model Estimasi	62
Gambar 3.1 Uji t-hitung	69
Gambar 3. 2 Uji f-hitung.....	71
Gambar 4.1 Presentase Penduduk Miskin Provinsi Sumatera Utara	85
Gambar 4. 2 Scatter Plot	98

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan merupakan upaya-upaya yang di kerjakan dengan terarah dan terencana agar terlaksanakannya suatu perubahan seperti menurunkan jumlah penduduk miskin di Indonesia. Adapun tujuan dari pembangunan adalah untuk meningkatkan kinerja perekonomian agar mampu menciptakan sebuah lapangan kerja dan menata kehidupan yang layak bagi masyarakat yang pada akhirnya akan mewujudkan kesejahteraan penduduk Indonesia. Pada pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tercantum tujuan bangsa Indonesia bahwa diantaranya yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah dengan adanya perubahan menuju ke arah yang lebih baik dan terus menerus untuk mewujudkan masyarakat yang berkeadilan, berdaya saing dan maju. Sehingga dalam mencapai tujuan pembangunan secara menyeluruh diperlukan adanya pertumbuhan ekonomi yang meningkat dan distribusi pendapatan yang merata (Arifianto & Setiyono, 2013).

Pertumbuhan ekonomi merupakan sebuah proses peningkatan output dari waktu ke waktu menjadi indikator penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan suatu negara (Todaro & Smith, 2011). Pertumbuhan ekonomi ini merupakan suatu hal yang sangat penting dan dibutuhkan oleh setiap negara, termasuk Indonesia. Sebab, tanpa pertumbuhan tidak akan terjadi peningkatan kesejahteraan, kesempatan kerja, produktivitas dan distribusi pendapatan. Maka perekonomian harus terus bertumbuh dan harus lebih tinggi daripada tingkat

pertambahan penduduk. Ketika penduduk di suatu negara sejahtera maka akan mengurangi tingkat kemiskinan suatu negara tersebut (Rahardja, 2014). Terdapat hubungan dua arah yang kuat antara pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap pengurangan angka kemiskinan, terutama di daerah perdesaan yang banyak terdapat kantong-kantong kemiskinan. Sebaliknya kemiskinan juga berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (Jonaidi, 2012).

Bagi Indonesia, kemiskinan sudah sejak lama menjadi persoalan bangsa, di mana hingga sekarang masih belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir. Kemiskinan merupakan salah satu masalah mendasar yang menjadi pusat perhatian pemerintah di negara manapun. Hampir di semua negara berkembang, standar hidup sebagian besar penduduknya cenderung sangat rendah, tidak hanya jika dibandingkan dengan standar hidup orang-orang di negara kaya, namun juga dengan golongan elit di negara mereka sendiri. Standar hidup yang rendah dapat mewujudkan salah satu bentuk tingkat kemiskinan (Todaro, 2011). Kemiskinan muncul karena ketidakmampuan sebagian masyarakat untuk menyelenggarakan hidupnya sampai suatu taraf yang dianggap manusiawi. Kondisi ini menyebabkan menurunnya kualitas sumber daya manusia sehingga produktifitas yang diperolehnya rendah (Ferian, 2021).

Millenium Development Goals (MDGs) hadir yang telah disetujui oleh 189 anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada bulan September 2000. MDGs merupakan paling kuat yang menunjukkan komitmen internasional untuk kemiskinan global. Tujuan dicanangkan secara khusus untuk dicapai pada tahun 2015. Ada delapan tujuan yang telah disepakati PBB yaitu :

1. Menanggulangi kemiskinan dan kelaparan.
2. Mencapai pendidikan dasar untuk semua.
3. Mendorong kesetaraan Gender dan pemberdayaan perempuan.
4. Menurunkan angka kematian anak.
5. Meningkatkan kesehatan ibu.
6. Memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit menular lainnya.
7. Memastikan kelestarian lingkungan hidup.
8. Mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan.

Pada tanggal 25 september 2015, PBB melakukan perubahan dari MDGs menjadi Sustainable Development Goals (SDGs) yang melibatkan 194 negara, civil society, dan berbagai pelaku ekonomi dari seluruh penjuru dunia. SDGs adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan, yaitu:

1. Tanpa Kemiskinan.
2. Tanpa Kelaparan.
3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera.
4. Pendidikan Berkualitas.
5. Kesetaraan Gender.
6. Air Bersih dan Sanitasi Layak.

7. Energi Bersih dan Terjangkau.
8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi.
9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur.
10. Berkurangnya Kesenjangan.
11. Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan.
12. Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab.
13. Penanganan Perubahan Iklim.
14. Ekosistem Lautan.
15. Ekosistem Daratan.
16. Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh.
17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

Upaya pencapaian target SDGs menjadi prioritas pembangunan nasional, yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkat nasional dan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. SDGs merupakan penyempurnaan dari MGDs yang lebih komprehensif dengan melibatkan lebih banyak negara baik negara maju maupun berkembang, memperluas sumber pendanaan, menekankan pada hak asasi manusia, inklusif dengan pelibatan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan media, Filantropi dan Pelaku Usaha, serta Akademisi dan Pakar.

Di dalam SDGs terdapat 17 poin-poin penting dalam kehidupan manusia. Poin yang pertama adalah no poverty (tanpa kemiskinan). Ditematkannya no poverty pada poin pertama menunjukkan bahwa PBB sangat serius untuk mengurangi atau bahkan menghapuskan kemiskinan. Kemiskinan ekstrem didefinisikan sebagai kondisi dimana kesejahteraan masyarakat berada di bawah garis kemiskinan ekstrem - setara dengan USD 1.9 PPP (purchasing power

parity). kemiskinan ekstrem di Indonesia adalah 4 persen atau 10,86 juta jiwa. Tingkat kemiskinan ekstrem tersebut lebih rendah bila dibandingkan dengan tingkat kemiskinan nasional yang didasarkan pada data Susenas yang dirilis secara berkala oleh BPS, yang pada Maret 2021 adalah 10,14 persen atau 27,54 juta jiwa. Pada tahun 2021, tingkat kemiskinan ekstrem di Indonesia sebesar 4% (TNP2K, 2022).

Indonesia sendiri sebagai negara berkembang dan salah satu anggota PBB, harus melaksanakan tugas tersebut karena Indonesia masih mempunyai masyarakat yang terjerat kemiskinan. Oleh karena itu, upaya pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara komprehensif, mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, dan dilaksanakan secara terpadu (M. Nasir, dkk 2008). Sebagai suatu proses, tentu saja dilakukan dengan melihat jumlah penduduk, meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB), penyediaan lapangan pekerjaan, penanganan ketimpangan pendapatan, dan mengukur kualitas tingkat pendidikan, tingkat kesehatan dan tingkat ekonomi (daya beli) supaya dapat mengurangi kemiskinan dan mencapai kehidupan yang lebih baik.

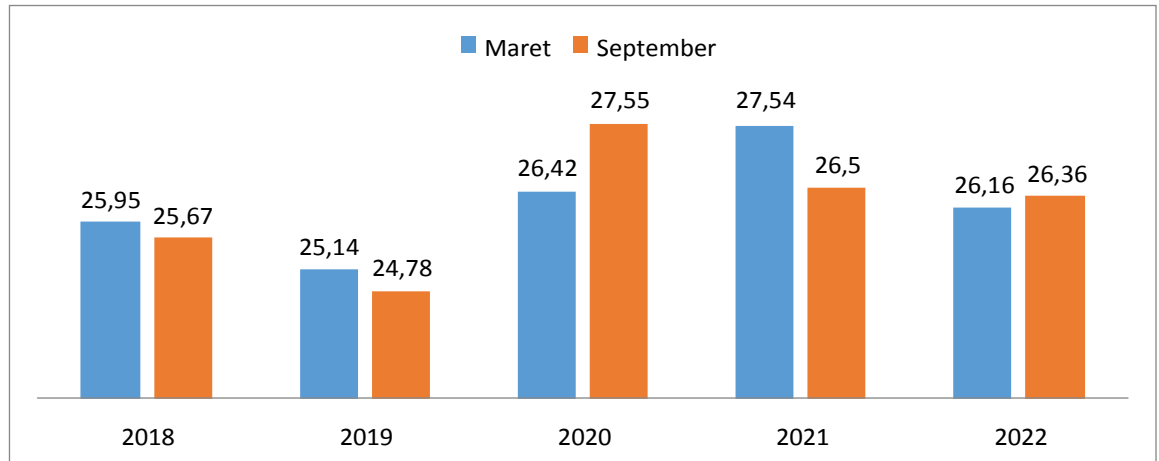
Penyebab kemiskinan di Indonesia masih besarnya penduduk miskin di Indonesia disebabkan oleh beberapa hal antara lain, pemerataan pembangunan belum menyebar secara merata terutama di daerah pedesaan, penduduk miskin di daerah pedesaan diperkirakan lebih tinggi dari penduduk miskin di daerah perkotaan. Kesempatan berusaha di daerah pedesaan dibandingkan dengan daerah perkotaan menyebabkan kurangnya sumber pendapatan bagi masyarakat miskin terutama di daerah pedesaan. Sementara itu masyarakat miskin banyak

menggantungkan hidupnya pada usaha mikro yang masih mengalami keterbatasan dalam memperoleh akses permodalan dan sangat rendah produktivitasnya.

Penanggulangan kemiskinan yang komprehensif memerlukan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha (sektor swasta) dan masyarakat merupakan pihak-pihak yang memiliki tanggung jawab sama terhadap penanggulangan kemiskinan. Pemerintah telah melaksanakan penanggulangan kemiskinan melalui berbagai program dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar warga negara secara layak, meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat miskin, penguatan kelembagaan sosial ekonomi masyarakat serta melaksanakan percepatan pembangunan daerah tertinggal dalam upaya mencapai masyarakat Indonesia yang sejahtera, demokratis dan berkeadilan (Murdiyana & Mulyana, 2017). Secara umum bantuan yang diberikan pemerintah untuk mengatasi kemiskinan seperti Dana Bantuan Operasional Satuan (BOS) untuk pendidikan, Bantuan Langsung Tunai (BLT), Dana Desa, Beras untuk Keluarga Miskin (Raskin), Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM), Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), Kenaikan Gaji buruh, Bantuan Presiden Usaha Mikro (BPUM), Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Bantuan Kartu Prakerja.

Kemiskinan dapat diartikan sebagai ketidakmampuan perekonomian dalam hal untuk memenuhi kebutuhan dasar namun juga secara umum belum dapat memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan (Wirawan and Arka, 2015). Secara nasional, jumlah penduduk miskin di Indonesia mengalami

fluktuasi dari tahun 2018-2022. Berikut merupakan data jumlah penduduk miskin di Indonesia:

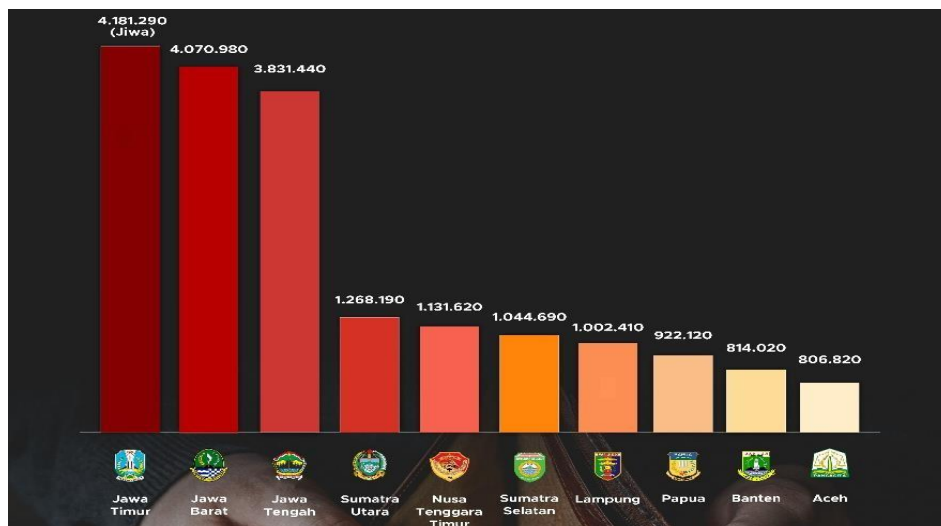


Gambar 1. 1 Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia 2018–2022 (Juta Orang)

Sumber: *Badan Pusat Statistik (BPS), 2022*

Jumlah penduduk miskin di Indonesia periode September 2022 tercatat sebanyak 26,36 juta orang. Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa angka penduduk miskin naik sekitar 200 ribuan jiwa. Namun apabila dibandingkan dengan periode September 2021, jumlah penduduk miskin menurun sekitar 140 ribuan orang.

Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita perbulan di bawah Garis Kemiskinan (GK), yang diperoleh dari hasil survey (sampel). Angka kemiskinan yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) yang merupakan data makro dan merupakan hasil Susenas (Survey Sosial Ekonomi Nasional) yang menunjukkan persentase penduduk miskin terhadap jumlah penduduk dalam suatu wilayah. Berikut merupakan data provinsi dengan jumlah penduduk miskin terbanyak di Indonesia pada tahun 2022 :



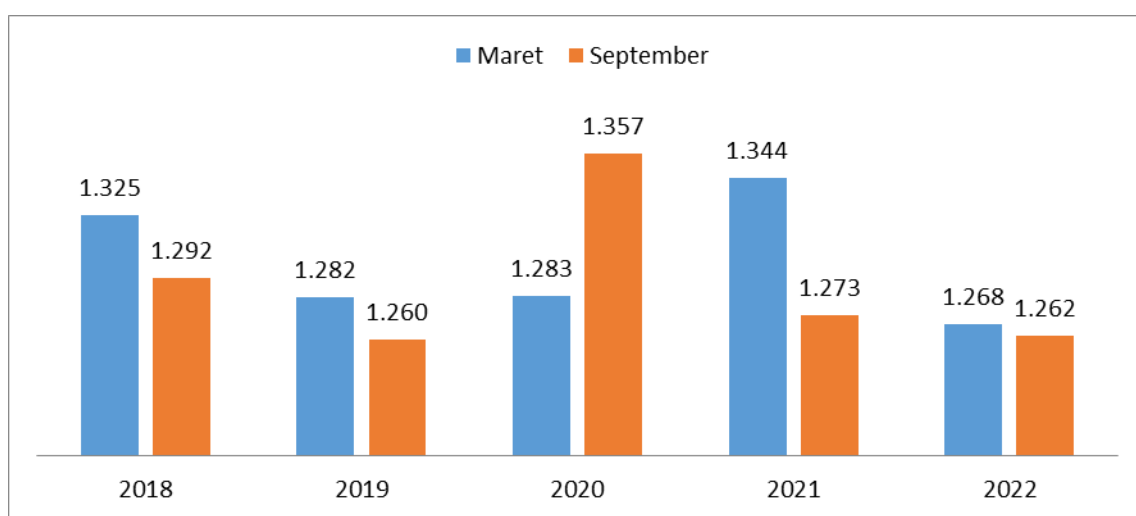
Gambar 1. 2 Terdapat 10 Provinsi dengan Jumlah Penduduk Miskin Terbanyak
Sumber: *Badan Pusat Statistik (BPS), 2022*

Berdasarkan provinsi, Jawa Timur menempati peringkat pertama provinsi dengan jumlah penduduk miskin terbanyak di Indonesia. Adapun jumlah penduduk miskin di Jawa Timur ialah sebanyak 4.181.290 orang pada Maret 2022. Jawa Barat menempati posisi ke-2 dengan total 4.070.980 penduduk miskin. Posisi ke-3 diraih oleh Jawa Tengah dengan total penduduk miskin sebanyak 3.831.440 orang per Maret 2022. Terdapat 3 posisi teratas provinsi dengan jumlah penduduk miskin terbanyak berada di Pulau Jawa. Pada posisi ke-4 dan ke-5 diraih oleh Sumatera Utara dan Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan jumlah penduduk miskin masing-masing sebanyak 1.268.190 serta 1.131.620 orang pada Maret 2022. Secara berurutan, di posisi ke-6 hingga ke-10 diraih oleh Sumatra Selatan (1.044.690), Lampung (1.002.410), Papua (922.120), Banten (814.020), dan Aceh (806.820).

Provinsi Sumatera Utara (Sumut) merupakan sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di bagian Utara pulau Sumatra. Provinsi ini beribu kota di Kota Medan, dengan luas wilayah 72.981,23 km². Sumatra Utara merupakan

provinsi dengan jumlah penduduk terbesar keempat di Indonesia, setelah provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah, dan terbanyak di pulau Sumatra. Pada Juni 2022 penduduk Sumatra Utara berjumlah 15.305.230 jiwa. Provinsi Sumatera Utara terdiri atas 25 Kabupaten dan 8 Kota memiliki permasalahan penanggulangan kemiskinan yang berbeda-beda.

Berikut merupakan data jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Utara:



Gambar 1. 3 Jumlah Penduduk Miskin Di Sumatera Utara 2018-2022 (Ribu Orang)

Sumber: *Badan Pusat Statistik (BPS), 2022*

Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilaksanakan pada bulan September 2022 menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Utara sebanyak 1.262,09 ribu jiwa atau sebesar 8,33 persen terhadap total penduduk Provinsi Sumatera Utara. Jumlah penduduk miskin tersebut menurun jika dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin pada bulan September 2021 yang mencatatkan jumlah penduduk miskin sebanyak 1.273,07 ribu jiwa atau sebesar 8,49 persen. Terjadi penurunan jumlah penduduk miskin

sebanyak 10,98 ribu jiwa pada periode September 2021- September 2022, dengan penurunan persentase penduduk miskin sebesar 0,16 poin.

Kemiskinan masih menjadi persoalan, walaupun angka kemiskinan menunjukkan penurunan namun bukan berarti berhenti dalam berupaya mengatasi keluarga miskin di perkotaan maupun di perdesaan. Berikut merupakan data jumlah penduduk miskin di perkotaan dan di perdesaan:

Daerah/Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (ribu orang)	Persentase Penduduk Miskin (%)	Perubahan Jumlah Penduduk Miskin (ribu orang)	Perubahan Persentase Penduduk Miskin (%)
Perkotaan				
Maret 2021	755,81	9,15		
September 2021	725,04	8,68		
Maret 2022	739,86	8,76	(15,95)	(0,39)
Perdesaan				
Maret 2021	588,05	8,84		
September 2021	548,03	8,26		
Maret 2022	528,33	7,98	(59,72)	(0,86)
Perkotaan+Perdesaan				
Maret 2021	1.343,86	9,01		
September 2021	1.273,07	8,49		
Maret 2022	1.268,19	8,42	(75,67)	(0,59)

Gambar 1. 4 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Sumatera Utara

Sumber: *Badan Pusat Statistika (BPS), 2022*

Apabila dilihat berdasarkan daerah, pada periode Maret 2021 - Maret 2022, penduduk miskin di perkotaan maupun perdesaan mengalami peningkatan. Persentase penduduk miskin di perkotaan mengalami penurunan yang lebih besar dibanding di perdesaan, yaitu sebesar 0,39 poin, yaitu dari 9,15 persen menjadi 8,76 persen atau turun sebanyak 15,95 ribu orang, yaitu dari 755,81 ribu orang menjadi 739,86 ribu orang. Penduduk miskin di perdesaan mengalami penurunan sebesar 0,87 poin dari 8,84 persen menjadi 7,98 persen atau turun sebanyak 59,72 ribu orang yaitu dari 588,05 ribu orang menjadi 528,33 ribu orang. Dengan kata lain jumlah penduduk miskin di perkotaan lebih banyak dibandingkan di perdesaan.

Salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan pembangunan yang dapat dijadikan tolok ukur secara makro adalah pertumbuhan ekonomi yang dicerminkan dari perubahan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita) dalam suatu daerah. PDRB didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang di hasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menandakan semakin baik kegiatan ekonomi daerah. Pertumbuhan ekonomi daerah tersebut ditunjukkan dari laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan (Todaro & Smith, 2011).

Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita (PDRB) Provinsi Sumatera Utara digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun, sehingga arah perekonomian daerah jelas. PDRB juga dapat mengatur sampai sejauh mana keberhasilan pemerintah dalam memanfaatkan sumber daya yang ada dan dapat digunakan sebagai perencanaan dan pengambilan keputusan yang salah satunya untuk mengurangi jumlah penduduk miskin. Umumnya PDRB dihitung berdasarkan dua pendekatan, yaitu dari sisi sektoral/lapangan usaha dan dari sisi penggunaan. Selanjutnya PDRB juga dihitung berdasarkan harga berlaku dan harga konstan. Total PDRB menunjukkan jumlah seluruh nilai tambah yang dihasilkan oleh penduduk dalam periode tertentu (Kuncoro, 2001).

Menurut data BPS Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1.1
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan
2010 Provinsi Sumatera Utara (Rupiah)

Tahun	PDRB (Rupiah)
2017	34.183.579
2018	35.570.497
2019	36.853.594
2020	36.175.157
2021	36.666.202

Sumber: *Badan Pusat Statistik (BPS), 2022*

PDRB Per Kapita pada tahun 2017 sebesar 34.183.579 rupiah dan mengalami kenaikan sampai pada tahun 2019, dan terjadi penurunan di tahun 2020 sebesar 36.175.157 rupiah dikarenakan terdampak Covid-19 kemudian pada tahun 2021 naik lagi menjadi 36.666.202 rupiah. Nilai PDRB Per Kapita menunjukkan hasil yang naik turun setiap tahun nya, akan tetapi belum mampu mengurangi angka kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara.

Pemerintah provinsi Sumatera Utara belum sepenuhnya berhasil dalam menanggulangi kemiskinan. Angka Kemiskinan Sumatera Utara merupakan penjumlahan dari angka kemiskinan dari seluruh kabupaten dan kota yang ada Sumatera Utara. Angka masyarakat miskin di sebagian besar daerah Sumut masih tergolong tinggi. Oleh karenanya, faktor-faktor penyebab kemiskinan perlu untuk dicari agar setiap kabupaten dan kota dapat memiliki acuan penanggulangan masalah kemiskinan. Kualitas dari Sumber Daya Manusia (SDM) tergolong salah satu factor yang menyebabkan munculnya masyarakat miskin. Indeks kualitas hidup dibagi (/) indeks pembangunan manusia merupakan cara untuk mengetahui hasil kualitas SDM. Ukuran kemajuan pembangunan daerah adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) daerah itu sendiri, yang berkorelasi negative dengan tingkat kemiskinan daerah, karena daerah dengan nilai IPM tinggi

idealnya memiliki kualitas hidup yang tinggi. Jika IPM tinggi, maka tingkat kemiskinan harus rendah.

Pemerintah sebagai pelaksana pembangunan tentunya membutuhkan manusia yang berkualitas sebagai modal dasar pembangunan. Untuk menghasilkan manusia yang berkualitas diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas SDMnya. Pembangunan manusia di Indonesia bertujuan dengan pengurangan kemiskinan. Investasi dibidang pendidikan dan kesehatan akan lebih berarti bagi penduduk miskin dibandingkan penduduk tidak miskin, karena asset utama penduduk miskin adalah tenaga kasar mereka (Ginting, 2008).

Pembangunan manusia di Indonesia identik dengan pengurangan kemiskinan. Investasi dibidang pendidikan dan kesehatan akan lebih berarti bagi penduduk miskin dibandingkan penduduk tidak miskin, karena aset utama penduduk miskin adalah tenaga kasar mereka. Tersedianya fasilitas-fasilitas dasar seperti pendidikan dan kesehatan yang murah akan sangat membantu untuk meningkatkan produktivitas masyarakat tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pembangunan manusia belum secara optimal dilakukan karena hanya terfokus pada pengangguran dan kemiskinan. Menurut *United Nations Development Programme* (UNDP), dalam IPM terdapat 3 indikator komposit yang digunakan untuk mengatur pencapaian rata-rata suatu negara dalam pembangunan manusia, yaitu : lama hidup, yang diukur dengan angka harapan hidup ketika lahir; pendidikan, yang diukur berdasarkan rata-rata lama bersekolah dan angka melek huruf penduduk usia 15 tahun ke atas; standar hidup, yang diukur dengan pengeluaran perkapita yang telah disesuaikan menjadi paritas daya beli. Ketiga indikator tersebut saling mempengaruhi satu sama lain, selain itu

dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti ketersediaan kesempatan kerja yang ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi, infrastruktur dan kebijakan pemerintah sehingga IPM meningkat. Berikut merupakan data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia :



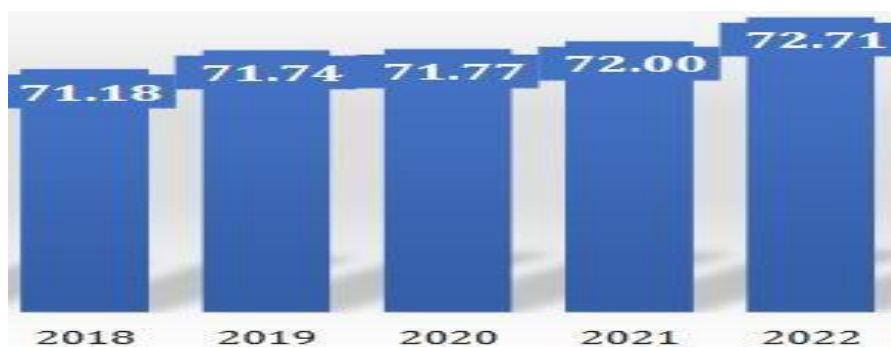
Gambar 1. 5 Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2022

Sumber: *Badan Pusat Statistik (BPS), 2022*

Dapat dilihat dari gambar sebelumnya bahwa selama tahun 2010–2022, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia rata-rata meningkat sebesar 0,77 persen per tahun. Kemudian pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2022 terjadi peningkatan pada semua dimensi, baik umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Pada dimensi umur panjang dan hidup sehat, bayi yang lahir pada tahun 2022 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 71,85 tahun, meningkat 0,28 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya. Pada dimensi pengetahuan, harapan lama sekolah penduduk umur 7 tahun meningkat 0,02 tahun dibandingkan tahun sebelumnya, dari 13,08 menjadi 13,10 tahun, sedangkan rata-rata lama sekolah penduduk umur 25 tahun ke atas meningkat 0,15 tahun, dari 8,54 tahun menjadi 8,69 tahun pada tahun 2022. Dimensi standar hidup layak yang diukur

berdasarkan rata-rata pengeluaran riil per kapita (yang disesuaikan) meningkat 323 ribu rupiah (2,90 persen) dibandingkan tahun sebelumnya.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator yang digunakan untuk melihat perkembangan pembangunan dalam jangka panjang, menurut *United Nations Development Programme* (UNDP), pembangunan hendaknya ditunjukkan kepada pengembangan sumber daya manusia. Dalam pemahaman ini, pembangunan dapat diartikan sebagai sebuah proses yang bertujuan mengembangkan pilihan-pilihan yang dapat dilakukan oleh manusia. Hal ini didasari oleh asumsi bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia akan diikuti oleh terbukanya berbagai pilihan dan peluang menentukan jalan hidup manusia secara bebas (Rapanna & Fajriah, 2018). Berikut merupakan data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Sumatera Utara :



Gambar 1. 6 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sumatera Utara Tahun 2018 – 2022
Sumber: *Badan Pusat Statistik (BPS)*, 2022

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sumatera Utara tahun 2022 mengalami peningkatan disbanding tahun sebelumnya. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sumatera Utara tahun 2022 adalah sebesar 72,71 atau tumbuh 0,99 persen (meningkat 0,71 poin) dibandingkan capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sumatera Utara tahun 2021. Peningkatan IPM tahun 2022

didukung oleh peningkatan disemua komponen penyusunnya. Komponen IPM dengan pertumbuhan tertinggi pada tahun 2022 adalah pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Pada 2022, pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan telah meningkat 3,32 persen disbanding tahun 2021.

Dari sisi pendidikan, pada tahun 2022 anak berusia 7 tahun memiliki harapan dapat menikmati pendidikan formal selama 13,31 tahun atau hampir setara dengan lamanya waktu untuk menamatkan pendidikan hingga setingkat Diploma I. Angka ini meningkat 0,04 tahun dibandingkan pada tahun 2021 yang mencapai 13,27 tahun. Selain itu, rata-rata lama sekolah penduduk umur 25 tahun ke atas juga meningkat 0,13 tahun, dari 9,58 tahun menjadi 9,71 tahun pada 2022. Dari sisi kesehatan, bayi yang lahir pada tahun 2022 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 69,61 tahun, lebih lama 0,38 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki dampak pada pengurangan dan kemiskinan. Harapan hidup, Pendidikan, dan konsumsi perkapita digunakan sebagai indikator dalam perhitungan untuk mencari Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Jika dalam suatu wilayah tingkat kualitas penduduknya tinggi, maka dalam wilayah tersebut akan sedikit juga jumlah penduduk miskinnya. Rendahnya IPM akan berakibat pada rendahnya produktivitas kerja dari penduduk. Rendahnya produktivitas penduduk mengakibatkan rendahnya perolehan pendapatan, sehingga menyebabkan tingginya jumlah penduduk miskin (Sukmaraga, 2011).

Faktor lain yang berpengaruh pada tingkat kemiskinan yaitu pengangguran yang memang sangat kompleks untuk dibahas dan merupakan isu penting, karena

dapat dikaitkan dengan beberapa indikator-indikator ekonomi yang mempengaruhi tingkat pengangguran antara lain pertumbuhan ekonomi negara, tingkat inflasi, kemiskinan, serta besaran upah yang berlaku. Apabila di suatu negara pertumbuhan ekonominya mengalami kenaikan, diharapkan akan berpengaruh pada penurunan jumlah pengangguran, hal ini diikuti dengan tingkat upah. Jika tingkat upah naik akan berpengaruh pada penurunan jumlah pengangguran pula. Sedangkan tingkat inflasi yang tinggi akan berpengaruh pada kenaikan jumlah pengangguran (Sukirno, 2008). Pengangguran merupakan masalah serius yang dihadapi dalam pembangunan sumber daya manusia yang tengah dilakukan saat ini. Krisis ekonomi yang kini dihadapi ternyata telah memporak porandakan tatanan kehidupan bangsa. Menurut data BPS angka pengangguran penduduk di Sumatera Utara dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1.2
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Penduduk Umur 15 Tahun Keatas Menurut Kab/Kota (Persen)

Kabupaten/ Kota	2017	2018	2019	2020	2021
Sumatera Utara	5.60	5.56	5.41	6.91	6.33
Nias	1.19	1.62	1.09	3.49	3.12
Mandailing Natal	5.75	4.43	6.37	6.50	6.12
Tapanuli Selatan	5.80	5.28	4.17	4.42	4.00
Tapanuli Tengah	7.39	6.38	7.26	7.54	7.24
Tapanuli Utara	1.89	1.42	1.33	2.94	1.54
Toba Samosir	2.18	2.15	1.26	2.50	0.83
Labuhan Batu	7.09	6.98	5.70	6.05	5.66
Asahan	5.95	5.26	6.86	7.24	6.39
Simalungun	5.62	5.10	4.39	4.58	4.17
Dairi	1.42	1.69	1.58	1.75	1.49
Karo	1.34	1.50	1.09	1.83	1.95
Deli Serdang	6.16	7.06	5.74	9.50	9.13
Langkat	3.57	4.67	5.30	7.02	5.12
Nias Selatan	1.28	3.77	2.25	4.15	3.91

Tabel 1.2 (sambungan)
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Penduduk Umur 15 Tahun Keatas Menurut
Kab/Kota (Persen)

Humbang Hasundutan	0.31	0.34	0.33	0.84	1.94
Pakpak Bharat	0.49	0.43	0.19	1.93	1.36
Samosir	1.28	1.35	1.25	1.20	0.70
Serdang Bedagai	5.98	5.10	4.37	5.54	3.93
Batu Bara	5.00	5.39	6.69	6.48	6.62
Padang Lawas Utara	3.21	3.15	3.21	3.11	3.19
Padang Lawas	4.24	4.10	4.24	4.11	4.07
Labuhan Batu Selatan	5.68	4.79	4.80	4.90	4.71
Labuan Batu Utara	6.35	5.67	5.84	6.82	5.71
Nias Utara	2.67	2.40	3.07	4.54	3.00
Nias Barat	1.23	1.23	1.63	1.71	0.74
Sibolga	9.29	8.61	7.40	8.00	8.72
Tanjung Balai	5.50	5.58	6.82	6.97	6.59
Pematang Siantar	8.80	12.14	11.09	11.50	11.00
Tebing Tinggi	9.73	7.23	8.60	9.98	8.37
Medan	9.46	8.25	8.53	10.74	10.81
Binjai	5.95	7.40	6.14	8.67	7.86
Padang Sidempuan	3.78	5.18	4.34	7.45	7.18
Gunung Sitoli	6.00	5.92	5.59	5.94	4.80

Sumber: *Badan Pusat Statistik (BPS), 2022*

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Sumatera Utara meningkat 0,32 persen menjadi 6,33% pada Agustus 2021 dibanding posisi Februari 2021. Namun, jika dibandingkan dengan posisi Agustus 2020, TPT di provinsi tersebut turun 0,58 persen. Jumlah penduduk yang menganggur bertambah 26 ribu jiwa (5,79%) menjadi 475 ribu jiwa pada Agustus 2021 dari posisi Februari 2021. Sementara, jumlah penduduk yang bekerja hanya bertambah 6 ribu jiwa (0,09%). Kemudian, jumlah angkatan kerja naik 32 ribu jiwa (0,43%) menjadi 7,51 juta jiwa pada periode yang sama. Kondisi tersebut yang membuat angka pengangguran di Sumut meningkat pada Agustus 2021.

Penduduk usia kerja yang terdampak Covid-19 pada Agustus 2021 berjumlah 814 ribu jiwa atau 7,49% dari total penduduk usia kerja. Angka tersebut lebih besar dibanding posisi Februari 2021 sebanyak 694 ribu jiwa (6,44%). Sementara, sebanyak 84 ribu jiwa penduduk Sumut yang menganggur karena terdampak Covid-19 pada Agustus 2021. Terdapat pula 28 ribu jiwa yang menjadi bukan angkatan kerja karena terdampak Covid-19. Ada pula 59 ribu jiwa sementara tidak bekerja dan 643 ribu jiwa penduduk di provinsi tersebut mengalami pengurangan jam kerja karena Covid-19.

Masalah pengangguran selalu menjadi permasalahan yang sulit terpecahkan di setiap negara. Sebab jumlah penduduk yang bertambah semakin besar tiap tahunnya, akan menyebabkan meningkatnya jumlah orang pencari kerja, dan seiring itu tenaga kerja juga akan bertambah. Jika tenaga kerja tidak dapat terserap ke dalam lapangan pekerjaan maka mereka akan tergolong ke dalam orang yang menganggur. Pengangguran terjadi disebabkan antara lain, yaitu karena kondisi ekonomi, Kebijakan Pemerintah yang tidak berpihak kepada rakyat, Pengembangan sektor ekonomi non-real, pendidikan yang rendah dan tidak memiliki keterampilan, keterbatasan lapangan kerja yang tersedia lebih kecil dari jumlah pencari kerja, kompetensi pencari kerja tidak sesuai dengan pasar kerja, memiliki pendidikan yang tinggi tapi tidak memiliki peluang kerja dikarenakan tidak memiliki akses sehingga berpotensi untuk tidak dapat tertampungnya lulusan program pendidikan di lapangan kerja setiap tahun selalu meningkat tidak pernah mengalami penurunan, budaya suatu daerah dimana yang berkerja itu hanya perempuan saja sementara kaum adam tidak berkerja, Selain itu juga kurang efektifnya informasi pasar kerja bagi para pencari kerja. Fenomena

pengangguran juga berkaitan erat dengan terjadinya pemutusan hubungan kerja, yang disebabkan antara lain; perusahaan yang menutup/mengurangi bidang usahanya akibat krisis ekonomi atau keamanan yang kurang kondusif; peraturan yang menghambat investasi, hambatan dalam proses ekspor impor, dan lain-lain.

Keterbatasan lapangan pekerjaan yang tersedia di Indonesia sangat cukup tinggi dari tahun ke tahun, lapangan pekerjaan merupakan indikator penting tingkat kesejahteraan masyarakat dan sekaligus menjadi indikator keberhasilan penyelenggaraan "pendidikan" dalam mengurangi angka kemiskinan yang ada. Sementara dampak sosial dari jenis pengangguran ini relatif lebih besar dan banyak efek negatif dari hal ini salah satunya tingkat kriminalitas tiap daerah juga ikut bertambah karena dorongan ekonomi. Mengingat kompleksnya masalah ini, maka upaya pemecahannya pun tidak sebatas pada kebijakan sektor pendidikan saja, namun merembet pada masalah lain secara multi dimensional (Khodijah Ishak, 2018).

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, selama periode 2018-2022 telah terjadi penurunan kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara. Namun kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara masih lebih tinggi dibandingkan dengan kemiskinan nasional. Mengingat kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara dipengaruhi oleh banyak faktor, maka dalam penelitian ini terdapat empat faktor yang mempengaruhi kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara yaitu Jumlah Penduduk Miskin, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Pengangguran. Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk mengkaji atau menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan pada penjelasan latar belakang masalah diatas, maka permasalahan yang dapat diidentifikasi adalah:

1. Provinsi Sumatera Utara merupakan provinsi pertama termiskin di pulau Sumatera dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 1.268.190 pada bulan Maret 2022.
2. Jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Utara lebih banyak di perkotaan dibandingkan di perdesaan pada bulan Maret 2021 sampai Maret 2022.
3. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Provinsi Sumatera Utara mengalami penurunan di tahun 2022 sebesar Rp. 36.175.157
4. Tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Sumatera Utara meningkat 0,32 persen menjadi 3,66% pada bulan Agustus 2021.

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah yang telah diuraikan, maka penulis membatasi masalah yang akan diteliti mengenai analisis faktor yang mempengaruhi kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara sehingga penulis memfokuskan pada Jumlah Penduduk, Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita (PDRB), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Pengangguran di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2012-2022. Alasan penelitian ini dibatasi agar lebih terarah dan tidak menyimpang dari yang dipersoalkan dan juga dapat mencapai sasaran yang di harapkan.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada penjelasan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perkembangan kemiskinan di Indonesia pada tahun 2012-2022?
2. Bagaimana perkembangan kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2012-2022?
3. Faktor apa saja yang mempengaruhi kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Melakukan analisis ekonomi secara deskriptif tentang perkembangan tingkat kemiskinan di Indonesia pada tahun 2012-2022.
2. Melakukan analisis ekonomi secara deskriptif tentang perkembangan tingkat kemiskinan di Povinsi Sumatera Utara pada tahun 2012-2022.
3. Mengestimasi faktor yang mempengaruhi kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara.

1.6 Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan di atas, maka manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi penulis, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

2. Bagi pemerintah Provinsi Sumatera Utara, hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu referensi atau informasi untuk dijadikan acuan dalam menetapkan kebijakan yang tepat guna mengurangi tingkat kemiskinan.
3. Bagi masyarakat umum, diharapkan dapat menambah wawasan dan berguna sebagai salah satu informasi mengenai masalah kemiskinan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pendapatan Nasional

Pendapatan nasional mempunyai peran yang sangat penting dalam suatu perekonomian negara. Dengan pendapatan nasional negara dapat mengetahui mengenai seberapa efisien sumber daya yang ada dalam perekonomian yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar produksi barang dan jasa. Menurut Sadono Sukirno pendapatan nasional adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu tahun tertentu. Secara fiktif pendapatan nasional merupakan nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat dalam suatu negara, dalam kurun waktu tertentu prinsip ini mewakili konsep Produk Domestik Bruto (PDB) atau *Gross domestic Product* (GDP) dan Produk Nasional Bruto (PNB) atau *Gross National Product* (GNP).

Pendapatan nasional merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi disuatu negara dalam periode tertentu. Pendapatan nasional adalah PDB, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Pada dasarnya PDB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu. PDB atas harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga berlaku pada setiap tahun. Sedangkan PDB atas dasar konstan menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga berlaku pada satu tahun tertentu sebagai dasar. PDB dan PNB atas dasar harga berlaku dapat

digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi, sedangkan harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ketahun.

Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan jumlah nilai produksi barang-barang dan jasa-jasa akhir yang dihasilkan oleh setiap sektor produktif dalam suatu negara selama satu periode tertentu (Arsyad, 1999). Pengertian Produk Domestik Bruto (PDB) dan produk Nasional Bruto (PNB) sebenarnya berbeda, pada PNB digunakan istilah national karena batasannya nasional kewarganegaraan. Hal ini menunjukkan bahwa barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara yang berada di dalam negeri maupun luar negeri harus dimasukkan ke dalam PNB. Sedangkan istilah domestic digunakan karena batasannya wilayah suatu negara, termasuk di dalamnya warga negara asing dan perusahaan-perusahaan asing.

Dalam dunia perekonomian baik itu di negara berkembang maupun negara maju, produksi barang dan jasa tidak hanya berasal dari negara tersebut, tetapi juga berasal dari negara lain. Adanya perusahaan multinasional yang beroperasi di beberapa negara akan membantu menaikkan nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh negara tersebut. Operasi tersebut merupakan bagian penting dari kegiatan ekonomi suatu negara. Nilai produksi yang disumbangkan perlu dihitung dalam pendapatan nasional yang berupa PDB. Sehingga, PDB dapat diartikan sebagai nilai barang dan jasa suatu negara yang diproduksi milik warga negara tersebut dan negara asing pada negara tersebut (Sukirno, 2002).

PDB digunakan sebagai indikator untuk mengetahui kondisi perekonomian suatu negara dalam suatu periode tertentu baik itu atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDB atas dasar berlaku menjelaskan

nilai tambah barang dan jasa yang dihitung berdasarkan harga yang berlaku setiap tahunnya, sedangkan PDB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu. PDB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat struktur ekonomi dan pergeserannya, sedangkan untuk PDB atas harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun (BPS, 2019).

Tingkat pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) digunakan sebagai indikator untuk menentukan pertumbuhan ekonomi. Perekonomian dikatakan tumbuh yaitu ketika pendapatan riil masyarakat pada tahun tertentu lebih besar daripada pendapatan riil masyarakat tahun sebelumnya. Jadi, dapat pula dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan perekonomian suatu negara yang diukur menggunakan Produk Domestik Bruto (PDB).

Metode Perhitungan Produk Domestik Bruto (PDB) Salah satu dari kegunaan penting dari pendapatan nasional adalah untuk mengetahui tingkat output atau PDB suatu negara dari tahun ke tahun. Berdasarkan teori ekonomi terdapat tiga metode untuk menghitung angka pendapatan nasional (PDB) yaitu sebagai berikut (Arsyad, 1999):

1) Metode Produksi

Pendapatan nasional dihitung dengan cara menjumlahkan nilai produksi barang-barang dan jasa-jasa yang dihasilkan oleh setiap sektor produktif dalam suatu negara selama satu periode tertentu. Sektor-sektor produktif dibagi menjadi sebelas sektor yaitu pertanian, industri pengolahan pertambangan dan galian, listrik, air dan gas, bangunan, pengangkutan dan komunikasi, perdagangan, bank

dan lembaga keuangan, sewa rumah, pertahanan, dan jasa-jasa lainnya. Jumlah nilai produksi barang-barang dan jasa-jasa akhir yang dihasilkan selama satu tahun fiskal disebut Produk Domestik Bruto (PDB). Teknis perhitungan pendapatan nasional dengan metode produksi ini dengan cara menjumlahkan nilai (*value added*) yang diciptakan. Cara ini dilakukan untuk menghindari terjadinya perhitungan berganda (*double atau multiple counting*). Oleh sebab itu metode produksi ini juga dikenal dengan metode nilai tambah (*value added*).

2) Metode Pendapatan

Pendapatan nasional menurut metode ini dihitung dengan cara menjumlahkan pendapatan faktor-faktor produksi yang digunakan dalam memproduksi barang-barang dan jasa-jasa. Faktor-faktor produksi seperti tanah, modal, tenaga dan wiraswasta (*entrepreneur*) yang digunakan diberi balas jasa yang masing-masing bernama sewa, bunga upah dan gaji, dan laba. Faktor-faktor produksi tersebut dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang dalam masyarakat, maka balas jasanya kembali ke masyarakat sebagai pendapatan nasional.

3) Metode Pengeluaran

Perhitungan pendapatan nasional dengan cara ini yaitu dengan menjumlahkan seluruh pengeluaran dari lapisan masyarakat. Pendapatan yang diterima dari semua lapisan masyarakat akan dibelanjakan pada berbagai barang dan jasa atau di tabung. Pengeluaran dalam metode ini dibagi ke dalam

- a. Pengeluaran konsumsi perorangan dan rumah tangga (*personal consumption expenditure*) yang terdiri dari: pengeluaran untuk barang-barang yang tahan

- lama (durable goods) dan yang tidak tahan lama. Pengeluaran ini biasa disingkat **C**.
- b. Pengeluaran konsumsi pemerintah (government expenditure) yang disingkat dengan **G**.
 - c. Investasi domestik bruto yang terdiri dari: bangunan-bangunan baru, alat-alat produksi yang tahan lama, dan persediaan barangbarang oleh perusahaan-perusahaan. Investasi disingkat dengan **I**.
 - d. Ekspor (**X**) dikurangi impor (**M**) Menurut pendekatan pengeluaran, PDB (yang disingkat dengan **Y**) adalah jumlah dari semua komponen dari permintaan akhir, adapun perhitungannya sebagai berikut:

$$Y = C + I + G + (X - M)$$

Suatu ekonomi dikatakan mengalami pertumbuhan ataupun perkembangan jika tingkat kegiatan ekonomi yang dicapai lebih tinggi dari waktu sebelumnya. Dengan kata lain, perkembangan terjadi jika jumlah barang dan jasa secara fisik yang dihasilkan perekonomian tersebut bertambah besar pada tahun-tahun berikutnya (Arsyad, 1999).

2.1.2 Indeks Pembangunan Manusia

Indikator yang paling luas digunakan untuk mengukur status komparatif pembangunan sosio – ekonomi disajikan dalam laporan – laporan tahunan UNDP yang berjudul *Human Development Report* (Laporan Pembangunan Manusia). Inti semua laporan ini, yang dimulai pada tahun 1990, adalah pembuatan penyempurnaan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) / *Human Development Index (HDI)* (Todaro & Smith, 2011). Konsep IPM pertama kali dipublikasikan UNDP melalui *Human Development Report* tahun 1996, yang kemudian berlanjut

setiap tahun. Dalam publikasi ini pembangunan manusia didefinisikan sebagai “A *Process of Enlarging People’s Choices*” atau proses yang meningkatkan aspek kehidupan masyarakat. Aspek terpenting kehidupan ini dilihat dari usia yang panjang dan hidup sehat, tingkat pendidikan yang memadai, dan standar hidup yang layak. Secara spesifik UNDP menetapkan empat elemen utama dalam pembangunan manusia, yaitu produktivitas (*productivity*), pemerataan (*equity*), keberlanjutan (*sustainability*), dan pemberdayaan (*empowerment*).

Menurut UNDP, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup:

a. Umur Panjang dan Sehat

Untuk mengukur dimensi umur panjang dan sehat digunakan Angka Harapan Hidup (AHH) yang merupakan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup. Penghitungan angka harapan hidup melalui pendekatan tak langsung (*indirect estimation*). Jenis data yang digunakan adalah Anak Lahir Hidup (ALH) dan Anak Masih Hidup (AMH). Indeks harapan hidup dihitung dengan menghitung nilai maksimum dan nilai minimum harapan hidup sesuai standar UNDP, yaitu angka tertinggi sebagai batas atas untuk penghitungan indeks dipakai 85 tahun dan terendah adalah 25 tahun.

b. Pengetahuan

Untuk mengukur dimensi pengetahuan yang diukur melalui tingkat pendidikan. Dalam hal ini, indikator yang digunakan adalah rata-rata lama sekolah (*mean years of schooling*) dan angka melek huruf. Pada proses pembentukan IPM,

rata-rata lama sekolah memiliki bobot sepertiga dan angka melek huruf diberi bobot dua per tiga, kemudian penggabungan kedua indikator ini digunakan sebagai indeks pendidikan sebagai salah satu komponen pembentuk IPM.

Rata-rata lama sekolah menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Penghitungan rata-rata lama sekolah menggunakan dua batasan yang dipakai sesuai kesepakatan beberapa negara. Rata-rata lama sekolah memiliki batas maksimumnya 15 tahun dan batas minimum sebesar 0 tahun.

Angka melek huruf adalah persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis huruf latin dan atau huruf lainnya. Seperti halnya rata-rata lama sekolah, angka melek huruf juga menggunakan batasan yang dipakai sesuai kesepakatan beberapa negara. Batas maksimum untuk angka melek huruf adalah 100, sedangkan batas minimumnya 0 (nol). Nilai 100 menggambarkan kondisi 100 persen atau semua masyarakat mampu membaca dan menulis, sedangkan nilai 0 mencerminkan kondisi sebaliknya.

c. Standar Hidup Layak

Dimensi lain dari ukuran kualitas hidup manusia adalah standar hidup layak. Dalam cakupan lebih luas, standar hidup layak menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai dampak semakin membaiknya ekonomi. Indikator digunakan untuk mengukur standar hidup layak ialah indikator daya beli. Indikator ini juga dipengaruhi oleh pengetahuan serta peluang yang ada untuk merealisasikan pengetahuan dalam berbagai kegiatan produktif sehingga menghasilkan output baik berupa barang maupun jasa sebagai pendapatan. Kemudian pendapatan yang ada menciptakan pengeluaran atau

konsumsi. Pengeluaran perkapita memberikan gambaran tingkat daya beli PPP (Purchasing Power Parity) masyarakat, dan sebagai salah satu komponen yang digunakan dalam melihat status pembangunan manusia di suatu wilayah.

Sebelum penghitungan IPM, setiap komponen IPM harus dihitung indeksinya. Formula yang digunakan dalam penghitungan indeks komponen IPM adalah sebagai berikut:

$$\text{Indeks } X(i) = \frac{X(i) - X(\min)}{X(\max) - X(\min)} \dots \dots \dots (2.2)$$

Keterangan:

(*i*) = Komponen IPM ke-*i*

(*min*) = Nilai minimum dari komponen IPM ke-*i*

(*maks*) = Nilai maksimum dari komponen IPM ke-*i*

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi salah satu indikator yang penting dalam melihat sisi lain dari pembangunan. Manfaat penting IPM antara lain yaitu yang pertama, IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). Kedua, IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara. Ketiga, Bagi Indonesia, IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja Pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU). (www.ipm.bps.go.id)

Untuk melihat capaian IPM antar wilayah dapat dilihat melalui pengelompokkan IPM ke dalam beberapa kategori, yaitu:

1. IPM < 60 : IPM rendah

2. $60 \leq \text{IPM} < 70$: IPM sedang
3. $70 \leq \text{IPM} < 80$: IPM tinggi
4. $\text{IPM} \geq 80$: IPM sangat tinggi

IPM yang lebih kecil maka di kategorikan sebagai wilayah dengan IPM rendah. Untuk IPM bersekitar antara 60 sampai dengan 70 maka di kategorikan sebagai wilayah dengan IPM sedang. Akan tetapi, jika IPM bersekitar 70 sampai dengan 80 dikategorikan termasuk IPM tinggi. Sedangkan, untuk yang memiliki IPM 80 keatas maka wilayah tersebut termasuk memiliki IPM yang sangat tinggi. (www.ipm.bps.go.id).

2.1.3 Teori Kependudukan

Berdasarkan penjelasan resmi Badan Pusat Statistik, istilah penduduk dapat didefinisikan sebagai semua orang yang tinggal atau berdomisili di suatu wilayah dan menetap di wilayah tersebut selama enam bulan atau lebih dan atau orang tersebut tinggal kurang dari enam bulan tetapi bertujuan untuk menetap. Istilah penduduk juga dapat diartikan secara lebih luas lagi, yaitu warga yang mendiami suatu daerah geografis tertentu. Penduduk lebih identik sebagai warga yang menetap di suatu daerah tertentu dan telah diakui keberadaannya di daerah tersebut melalui adanya bukti, seperti bukti yang tertera pada kartu identitas.

Istilah penduduk cukup lekat kaitannya dengan beberapa aspek pembahasan dalam keilmuan, layaknya sosiologi, geografi, maupun ekonomi. Melalui sudut pandang ekonomi, penduduk sering kali dikaitkan dengan banyak hal, seperti di antaranya yaitu dalam hal pemasaran dan unit-unit ekonomi lainnya. Selain itu, permasalahan yang berkaitan dengan kependudukan biasa dipelajari juga sebagai bagian dari ilmu demografi. Ilmu demografi itu sendiri

dapat mencakup pembahasan terkait jumlah penduduk, persebaran geografisnya, serta berbagai hal lainnya yang masih berkaitan dengan kependudukan dalam sudut pandang analisis kuantitatif.

Pertumbuhan penduduk merupakan suatu bentuk keseimbangan yang dinamis antara berbagai kekuatan yang mampu menambah jumlah penduduk dengan berbagai kekuatan lainnya yang mampu mengurangi jumlah penduduk yang berlangsung secara terus-menerus. Terdapat tiga variabel utama atau pemicu yang dapat sangat berpengaruh terhadap tinggi rendahnya angka pertumbuhan penduduk, yaitu kelahiran (*birth*), kematian (*death*) dan perpindahan penduduk atau migrasi (*migration*).

Pertumbuhan penduduk pada umumnya akan melewati empat tahapan periode, di antaranya adalah sebagai berikut:

a. Periode I

Tahapan pertama yang akan dilalui oleh pertumbuhan penduduk adalah kondisi pada saat pertumbuhan penduduk berjalan lambat dengan angka kelahiran dan kematian yang rendah, periode ini biasa disebut juga dengan periode statis.

b. Periode II

Tahapan kedua yang akan dilalui oleh pertumbuhan penduduk adalah kondisi pada saat pertumbuhan penduduk berjalan cepat dengan kematian yang menurun dan angka kelahiran cenderung tinggi bersamaan dengan adanya perbaikan gizi dan kesehatan.

c. Periode III

Tahapan ketiga yang akan dilalui oleh pertumbuhan penduduk adalah kondisi pada saat pertumbuhan penduduk kembali menurun dikarenakan adanya pembatasan jumlah anggota keluarga yang menekan angka kelahiran.

d. Periode IV

Tahapan keempat yang akan dilalui oleh pertumbuhan penduduk adalah kondisi pada saat pertumbuhan penduduk rendah dengan angka kematian stabil dan angka kelahiran menurun, periode ini biasa disebut juga dengan periode penduduk stasioner.

Kepadatan penduduk merupakan ukuran jumlah penduduk yang dibagi berdasarkan luas wilayah geografis tertentu. Semakin banyak jumlah penduduk yang mendiami suatu wilayah dengan luas yang sempit, maka tingkat kepadatan penduduk di wilayah tersebut termasuk ke dalam kategori tingkat kepadatan yang tinggi. Sedangkan, apabila jumlah penduduk yang sedikit mendiami suatu wilayah yang luas, maka tingkat kepadatan penduduk di wilayah tersebut rendah.

Pengendalian jumlah penduduk merupakan suatu rancangan kegiatan yang ditujukan untuk membatasi laju pertumbuhan penduduk. Kebanyakan dari teknik pengendalian jumlah penduduk yang umum di masyarakat adalah dengan cara mengurangi angka kelahiran. Upaya pengendalian jumlah penduduk yang diterapkan oleh Indonesia salah satunya adalah melalui program Keluarga Berencana (KB) yang dapat mengendalikan laju pertumbuhan penduduk dengan menekan angka kelahiran baru.

Secara umum, terdapat dua cara yang biasa digunakan oleh pemerintah dalam menerapkan pengendalian jumlah penduduk. Pertama adalah *positive check*, yaitu suatu teknik pengendalian yang tidak moralis dan tidak dapat

dikontrol, contohnya seperti adanya wabah dan terjadinya peperangan. Kedua adalah *preventive check*, yaitu teknik pengendalian jumlah penduduk dengan melakukan pengekangan moral untuk membatasi kelahiran dengan menunda pernikahan atau pembatasan jumlah anggota keluarga.

1. Teori Kependudukan Malthusian (Thomas Robert Malthus)

Malthus adalah orang pertama yang mengemukakan tentang penduduk. Dalam "*Essay on Population*", Malthus beranggapan bahwa bahan makanan penting untuk kelangsungan hidup, nafsu manusia tak dapat ditahan dan pertumbuhan penduduk jauh lebih cepat dari bahan makanan. Teori Malthus menyebutkan bahwa pertumbuhan penduduk mengikuti deret ukur sedangkan pertumbuhan ketersediaan pangan mengikuti deret hitung, pada kasus ini dimana terdapat permasalahan meledaknya jumlah penduduk dikota yang tidak diimbangi dengan ketersediaan pangan pun berkurang, hal ini merupakan perimbangan yang kurang menguntungkan jika kita kembali kepada teori Malthus (Edmund Conway, 2015).

Teori Malthus jelas menekankan tentang pentingnya keseimbangan pertambahan jumlah penduduk menurut deret ukur terhadap persediaan bahan makanan menurut deret hitung. Teori Malthus tersebut sebetulnya sudah mempersoalkan daya dukung lingkungan dan daya tampung lingkungan. Tanah sebagai suatu komponen lingkungan alam tidak mampu menyediakan hasil pertanian untuk mencukupi kebutuhan jumlah penduduk yang terus bertambah dan makin banyak. Daya dukung tanah sebagai komponen lingkungan menurun, karena beban manusia yang makin banyak. Jumlah penduduk harus seimbang dengan batas ambang lingkungan, agar tidak menjadi beban lingkungan atau

mengganggu daya dukung dan daya tampung lingkungan, dengan menampakkan bencana alam berupa banjir, kekeringan, gagal panen, kelaparan, wabah penyakit dan kematian.

Menurut pendapatnya, faktor pencegah dari ketidakseimbangan penduduk dan manusia antara lain *Preventive checks* (penundaan perkawinan, mengendalikan hawa nafsu dan pantangan kawin), *Positive checks* (bencana alam, wabah penyakit, kejahatan dan peperangan). Robert Malthus ini mengemukakan beberapa pendapat tentang kependudukan, yaitu :

- a. Penduduk (seperti juga tumbuhan dan binatang) apabila tidak ada pembatasan akan berkembang biak dengan sangat cepat dan memenuhi dengan cepat beberapa bagian dari permukaan bumi.
- b. Manusia untuk hidup memerlukan bahan makanan, sedangkan laju pertumbuhan makanan jauh lebih lambat (deret hitung) dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk (deret ukur).

2. Teori Kependudukan Marxist (Karl & F. Angel)

Aliran ini tidak sependapat dengan Malthus (bila tidak dibatasi penduduk akan kekurangan makanan). Menurut Marxist tekanan penduduk di suatu negara bukanlah tekanan penduduk terhadap bahan makanan, tetapi tekanan terhadap kesempatan kerja (misalnya di negara kapitalis) Marxist juga berpendapat bahwa semakin banyak jumlah manusia semakin tinggi produk yang dihasilkan, jadi dengan demikian tidak perlu diadakan pembatasan penduduk. Negara-Negara yang mendukung teori Malthus umumnya adalah negara berekonomi kapitalis seperti USA, Inggris, Prancis, Australia, Canada, dll Sedangkan negara-negara

yang mendukung teori Marxist umumnya adalah negara-negara berekonomi Sosialis seperti Eropa Timur, RRC, Korea, Rusia dan Vietnam.

Dasar Pegangan Marxist adalah beranjak dari pengalaman bahwa manusia sepanjang sejarah akan dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Beda pandangan Marxist dan Maltus adalah pada "*Natural Resource*" tidak bisa dikembangkan atau mengimbangi kecepatan pertumbuhan penduduk. Menurut Marxist tekanan penduduk di suatu negara bukanlah tekanan penduduk terhadap bahan makanan, tetapi tekanan terhadap kesempatan kerja (misalnya di negara kapitalis). Marxist juga berpendapat bahwa semakin banyak jumlah manusia semakin tinggi produk yang dihasilkan, jadi dengan demikian tidak perlu diadakan pembatasan penduduk. Berikut beberapa pendapat aliran Marxis :

- a. Populasi manusia tidak menekan makanan, tapi mempengaruhi kesempatan kerja.
- b. Kemerabatan bukan terjadi karena cepatnya pertumbuhan penduduk, tapi karena kaum kapitalis mengambil sebagian hak para buruh.
- c. Semakin tinggi tingkat populasi manusia, semakin tinggi produktifitasnya, jika teknologi tidak menggantikan tenaga manusia sehingga tidak perlu menekan jumlah kelahirannya, ini berarti ia menolak teori Malthus tentang moral restraint untuk menekan angka kelahiran.

3. Teori Kependudukan Neo-Malthusian (Garreth Hardin & Paul Ehrlich)

Pada abad 20 teori Malthus mulai diperdebatkan kembali. kelompok ini menyokong aliran Malthus, akan tetapi lebih radikal lagi dan aliran ini sangat menganjurkan untuk mengurangi jumlah penduduk dengan menggunakan cara-

cara “*Preventif Check*” yaitu menggunakan alat kontrasepsi. Tahun 1960an dan 1970an foto-foto telah diambil dari ruang angkasa dengan menunjukkan bumi terlihat seperti sebuah kapal yang berlaya dengan persediaan bahan bakar dan bahan makanan yang terbatas. Pada suatu saat kapal ini akan kehabisan bahan bakar dan bahan makanan tersebut sehingga akhirnya malapetaka menimpa kapaltersebut. Tahun 1871 Ehrlich menulis buku “*The Population Bomb*” dan kemudian direvisi menjadi “*The Population Explotion*” yang berisi:

- a. Sudah terlalu banyak manusia di bumi ini.
- b. Keadaan bahan makanan sangat terbatas.
- c. Lingkungan rusak sebab populasi manusia meningkat.

Analisis ini dilengkapi oleh Meadow (1972), melalui buku “*The Limit to Growth*” ia menarik hubungan antara variabel lingkungan (penduduk, produksi pertanian, produksi industri, sumber daya alam) dan polusi. Tapi walaupun begitu, malapetaka tidak dapat dihindari, hanya manusia cuma menunggunya, dan membatasi pertumbuhannya sambil mengelola alam dengan baik. Kritikan terhadap Meadow umumnya dilakukan oleh sosiolog yang menyindir Meadow karena tidak mencantumkan variabel sosial-budaya dalam penelitiannya. Karena itu Mesarovic dan Pestel (1974) merevisi gagasan Meadow & mencantumkan hubungan lingkungan antar kawasan (Edmund Conway, 2015).

4. Teori Kependudukan Kontemporer

a. John Stuart Mill

Seorang ahli filsafat dan ahli ekonomi berkebangsaan Inggris dapat menerima pendapat Malthus mengenai laju pertumbuhan penduduk melampaui laju pertumbuhan bahan makanan sebagai suatu aksioma. Namun demikian dia

berpendapat bahwa pada situasi tertentu manusia dapat mempengaruhi perilaku demografinya. Selanjutnya ia mengatakan apabila produktivitas seorang tinggi ia cenderung ingin memiliki keluarga kecil. Dalam situasi seperti ini fertilitas akan rendah. Jadi taraf hidup (standard of living) merupakan determinan fertilitas. Tidaklah benar bahwa kemiskinan tidak dapat dihindarkan (seperti dikatakan Malthus) atau kemiskinan itu disebabkan karena sistem kapitalis (seperti pendapat Marx) dengan mengatakan, kalau suatu waktu di suatu wilayah terjadi kekurangan bahan makanan, maka keadaan ini hanyalah bersifat sementara saja. Pemecahannya ada dua kemungkinan yaitu : mengimpor bahan makanan, atau memindahkan sebagian penduduk wilayah tersebut ke wilayah lain. Memperhatikan bahwa tinggi rendahnya tingkat kelahirann ditentukan oleh manusia itu sendiri, maka Mill menyarankan untuk meningkatkan tingkat golongan yang tidak mampu. Dengan meningkatnya pendidikan penduduk maka secara rasional maka mereka mempertimbangkan perlu tidaknya menambah jumlah anak sesuai dengan karier dan usaha yang ada. Di sampan itu Mill berpendapat bahwa pentingnya distribusi kekayaan para konglomerat eropa.

b. Arsene Dumont

Seorang ahli demografi bangsa Perancis yang hidup pada akhir abad ke-19. Pada tahun 1880 dia menulis sebuah artikel berjudul *Depopulation et Civilization*. Ia melancarkan teori penduduk baru yang disebut dengan teori kapilaritas sosial (*theory of social capilarity*). Kapilaritas sosial mengacu kepada keinginan seseorang untuk mencapai kedudukan yang tinggi di masyarakat, misalnya: seorang ayah selalu mengharapkan dan berusaha agar anaknya memperoleh kedudukan sosial ekonomi yang tinggi melebihi apa yang dia sendiri

telah mencapainya. Untuk dapat mencapai kedudukan yang tinggi dalam masyarakat, keluarga yang besar merupakan beban yang berat dan perintang. Konsep ini dibuat berdasarkan atas analogi bahwa cairan akan naik pada sebuah pipa kapiler. Teori kapilaritas sosial dapat berkembang dengan baik pada negara demokrasi, dimana tiap-tiap individu mempunyai kebebasan untuk mencapai kedudukan yang tinggi di masyarakat. Di negara Perancis pada abad ke-19 misalnya, dimana system demokrasi sangat baik, tiap-tiap orang berlomba mencapai kedudukan yang tinggi dan sebagai akibatnya angka kelahiran turun dengan cepat. Di negara sosialis dimana tidak ada kebebasan untuk mencapai kedudukan yang tinggi di masyarakat, system kapilaritas sosial tidak dapat berjalan dengan baik.

c. Emile Durkheim

Seorang ahli sosiologis Perancis yang hidup pada akhir abad ke-19. Apabila Dumont menekankan perhatiannya pada faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk, maka Durkheim menekankan perhatiannya pada keadaan akibat dari adanya pertumbuhan penduduk yang tinggi (Weeks, 1992). Ia mengatakan, akibat dari tingginya pertumbuhan penduduk, akan timbul persaingan diantara penduduk untuk dapat mempertahankan hidup. Dalam memenangkan persaingan tiap-tiap orang berusaha untuk meningkatkan pendidikan dan keterampilan, dan mengambil spesialisasi tertentu, keadaan seperti ini jelas terlihat pada kehidupan masyarakat perkotaan dengan kehidupan yang kompleks. Apabila dibandingkan antara kehidupan masyarakat tradisional dan masyarakat perkotaan, akan terlihat bahwa pada masyarakat tradisional tidak terjadi persaingan dalam memperoleh pekerjaan, tetapi pada

masyarakat industri akan terjadi sebaliknya. Hal ini disebabkan ada masyarakat industri tingkat pertumbuhan dan kepadatan penduduknya tinggi.

d. Michael Thomas Sadler dan Doubleday

Kedua ahli ini adalah penganut teori fisiologis. Sadler mengemukakan, bahwa daya reproduksi manusia dibatasi oleh jumlah penduduk yang ada di suatu wilayah atau negara. Jika kepadatan penduduk tinggi, daya reproduksi manusia akan menurun, sebaliknya jika kepadatan penduduk rendah, daya reproduksi manusia akan meningkat. Thomson (1953) meragukan kebenaran teori ini setelah melihat keadaan di Jawa, India dan Cina dimana penduduknya sangat padat, tetapi pertumbuhan penduduknya juga tinggi. Dalam hal ini Malthus lebih konkret argumentasinya dari pada Sadler. Malthus mengatakan bahwa penduduk disuatu daerah dapat mempunyai tingkat fertilitas yang tinggi, tetapi dalam pertumbuhan alaminya rendah karena tingginya tingkat kematian. Namun demikian, penduduk tidak dapat mempunyai fertilitas tinggi, apabila tidak mempunyai kesuburan (fecunditas) yang tinggi, tetapi penduduk dengan tingkat kesuburan tinggi dapat juga tingkat fertilitasnya rendah. Teori Doubleday hampir sama dengan teori Sadler, hanya titik tolaknya berbeda. Kalau Sadler mengatakan bahwa daya reproduksi penduduk berbanding terbalik dengan tingkat kepadatan penduduk, maka Doubleday berpendapat bahwa daya reproduksi penduduk berbanding terbalik dengan bahan makanan yang tersedia. Jadi kenaikan kemakmuran menyebabkan turunnya daya reproduksi manusia. Jika suatu jenis makhluk diancam bahaya, mereka akan mempertahankan diri dengan segala daya yang mereka miliki. Mereka akan mengimbangi dengan daya reproduksi yang lebih besar (Iskandar, 1980). Menurut Doubleday, kekurangan bahan makanan akan

merupakan perangsang bagi daya reproduksi manusia, sedang kelebihan pangan justru merupakan faktor penekang perkembangan penduduk. Dalam golongan masyarakat yang berpendapatan rendah, seringkali terdiri dari penduduk dengan keluarga besar, sebaliknya orang yang mempunyai kedudukan yang lebih baik biasanya jumlah keluarganya kecil. Rupa-rupanya teori fisiologis ini banyak diilhami dari teori aksi dan reaksi dalam meninjau perkembangan penduduk suatu negara atau wilayah. Teori ini dapat menjelaskan bahwa semakin tinggi tingkat mortalitas penduduk semakin tinggi pula tingkat produksi manusia

2.1.4. Pengangguran

Menurut Sadono Sukirno, pengangguran adalah sebuah kondisi di mana seseorang yang berasal dari golongan angkatan kerja menginginkan untuk mendapatkan pekerjaan akan tetapi masih belum mampu untuk mendapatkannya (Riska Franita, 2016). Tidak semua orang yang tidak atau belum mendapatkan pekerjaan dapat disebut sebagai pengangguran. Seseorang dari golongan angkatan kerja yang memiliki kemauan kerja dan siap kerja, tetapi tidak berusaha untuk mencari pekerjaan dalam empat minggu terakhir, kriteria tersebut tidak dapat digolongkan sebagai pengangguran (Paulus Kurniawan dan Made Kembar Sri Budhi, 2015).

Definisi pengangguran dilihat dari sudut pandang ekonomi tidak identik dengan istilah tidak bekerja. Seseorang yang tidak memiliki kemauan untuk bekerja, tidak dapat digolongkan ke dalam kelompok pengangguran. Seseorang yang memiliki keinginan untuk bekerja dan telah berusaha untuk mencari pekerjaan akan tetapi masih belum bisa mendapatkannya, maka seseorang tersebut baru dapat digolongkan sebagai pengangguran. Pengangguran termasuk ke dalam

permasalahan makroekonomi yang dapat memberikan pengaruh terhadap kondisi fisik dan mental seseorang secara langsung. Kondisi seseorang yang sedang menganggur dapat memicu penurunan standar dalam kehidupannya. Selain itu, kondisi menganggur yang berlangsung dalam jangka waktu cukup lama mampu menimbulkan dampak psikologis bagi kebanyakan orang.

Pengangguran dapat dikategorikan menjadi beberapa jenis. Berikut ini adalah beberapa kategori dari pengangguran:

- a. Pengangguran Friksional, Pengangguran yang digolongkan ke dalam tipe friksional merupakan tenaga kerja pendatang baru yang mencari pekerjaan pertama dan tenaga kerja yang masih bersifat sementara. Hal tersebut terjadi karena tenaga kerja masih tergolong memungkinkan untuk mencari atau berpindah pekerjaan sesuai dengan kepuasan mereka.
- b. Pengangguran Struktural, Pengangguran yang digolongkan ke dalam tipe struktural merupakan tenaga kerja yang menganggur disebabkan oleh kemampuan atau keterampilan kerja yang tidak cocok dan masih belum memenuhi target dari perusahaan tempat pekerja tersebut melamar.
- c. Pengangguran Siklus, Pengangguran yang digolongkan ke dalam tipe siklus merupakan tenaga kerja yang menganggur akibat dari merosotnya siklus bisnis. Ketika perekonomian dalam kondisi resesi atau depresi, situasi tersebut dapat mendorong suatu perusahaan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja bagi beberapa karyawannya demi menstabilkan kembali kondisi keuangan perusahaan.
- d. Pengangguran Musiman, Pengangguran yang digolongkan ke dalam tipe musiman merupakan tenaga kerja yang menganggur karena adanya

perubahan pola waktu perekrutan tenaga kerja. Pengangguran musiman dapat dimisalkan seperti pekerja tani musim panen, instruktur ski, penjaga pantai dan lain-lain.

Permasalahan ketenagakerjaan merupakan pekerjaan rumah yang rumit bagi setiap negara. Salah satu permasalahan ketenagakerjaan yang sering kali menyita perhatian adalah masalah pengangguran. Hal tersebut tentunya juga dialami oleh Indonesia, sebagai negara dengan angka pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi pada setiap tahunnya. Masalah pengangguran sudah pasti telah akrab dengan kehidupan Indonesia yang menjadi salah satu negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia. Permasalahan terkait dengan tingginya angka pengangguran dapat memicu munculnya kelompok-kelompok masyarakat yang terpinggirkan, sehingga dimungkinkan dapat mengganggu stabilitas negara. Oleh karena itu, sangat diperlukan bagi setiap negara, khususnya Indonesia untuk mengetahui berbagai faktor pemicu munculnya masalah pengangguran yaitu orientasi kebijakan pembangunan ekonomi, kebijakan pengembangan Sumber Daya Manusia, daya saing industri dan globalisasi.

A. Teori Pengangguran Klasik

Teori Klasik menjelaskan pandangan bahwa pengangguran dapat dicegah melalui sisi penawaran dan mekanisme harga di pasar bebas supaya menjamin terciptanya permintaan yang akan menyerap semua penawaran. Menurut pandangan klasik, pengangguran terjadi karena mis-alokasi sumber daya yang bersifat sementara karena kemudian dapat diatasi dengan mekanisme harga (Gilarso. 2004). Jadi dalam Teori Klasik jika terjadi kelebihan penawaran tenaga kerja maka upah akan turun dan hal tersebut mengakibatkan produksi perusahaan

menjadi turun. Sehingga permintaan tenaga akan terus meningkat karena perusahaan mampu melakukan perluasan produksi akibat keuntungan yang diperoleh dari rendahnya biaya tadi. Peningkatan tenaga kerja selanjutnya mampu menyerap kelebihan tenaga kerja yang ada di pasar, apabila harga relatif stabil (Tohar. 2000).

B. Teori Pengangguran Keynes

Dalam menanggapi masalah pengangguran Teori Keynes mengatakan hal yang berlawanan dengan Teori Klasik, menurut Teori Keynes sesungguhnya masalah pengangguran terjadi akibat permintaan agregat yang rendah. Sehingga terhambatnya pertumbuhan ekonomi bukan disebabkan oleh rendahnya produksi akan tetapi rendahnya konsumsi. Menurut Keynes, hal ini tidak dapat dilimpahkan ke mekanisme pasar bebas. Ketika tenaga kerja meningkat, upah akan turun hal ini akan merugikan bukan menguntungkan, karena penurunan upah berarti menurunkan daya beli masyarakat terhadap barang-barang. Akhirnya produsen akan mengalami kerugian dan tidak dapat menyerap tenaga kerja.

Keynes menganjurkan adanya campur tangan pemerintah dalam mempertahankan tingkat permintaan agregat agar sektor pariwisata dapat menciptakan lapangan pekerjaan (Soesastro, dkk, 2005). Perlu dicermati bahwa pemerintah hanya bertugas untuk menjaga tingkat permintaan agregat, sementara penyedia lapangan kerja adalah sektor wisata. Hal ini memiliki tujuan mempertahankan pendapatan masyarakat agar daya beli masyarakat terjaga. Sehingga tidak memperparah resesi serta diharapkan mampu mengatasi pengangguran akibat resesi.

2.1.5. Kemiskinan

A. Definisi Kemiskinan

Kemiskinan merupakan ketidakmampuan untuk memenuhi standar minimum. Kemiskinan merupakan masalah global yang dihadapi dan menjadi perhatian orang di dunia. Negara miskin masih dihadapkan antara masalah pertumbuhan dan distribusi pendapatan yang tidak merata sementara itu, banyak negara berkembang yang mengalami pertumbuhan ekonomi yang tinggi namun, kurang memberikan manfaat bagi penduduk miskinnya (Todaro & Smith ,2011).

B. Jenis-Jenis Kemiskinan

Kemiskinan memiliki jenis-jenis yang beragam dilihat dari suat pandang yang berbeda-beda. Dilihat dari sudut pandang pendapatan, kemiskinan dibagi menjadi dua yaitu:

1. Kemiskinan Absolut

Seseorang dikategorikan termasuk kedalam kemiskinan absolut apabila hasil pendapatannya berada dibawah garis kemiskinan, tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum, yaitu : kebutuhan pangan, sandang, kesehatan, papan dan pendidikan.

2. Kemiskinan Relatif

Seseorang yang tergolong miskin sebenarnya telah hidup di atas garis kemiskinan tetapi masih berada dibawah garis kemampuan masyarakat sekitarnya.

Dilihat dari sisi penyebabnya kemiskinan dibagi menjadi dua yaitu:

1. Kemiskinan Kultural

Kemiskinan kultural adalah kemiskinan yang berkaitan erat dengan sikap seseorang atau sekelompok masyarakat yang tidak mau berusaha untuk memperbaiki tingkat kehidupannya, sekalipun ada usaha dari pihak lain yang membantunya.

2. kemiskinan struktural

Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh sistem pembangunan yang tidak adil dan juga disebabkan oleh faktor-faktor rekayasa manusia.

C. Penyebab Kemiskinan

(Todaro & Smith 2017) terdapat empat penyebab kemiskinan dipandang dari sisi ekonomi yaitu:

1. Terlalu menggantungkan diri pada sektor pertanian dengan produksi yang masih tradisional.
2. Kepemilikan sumber daya yang tidak sama sehingga menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan.
3. Kemiskinan muncul akibat perbedaan akses terhadap modal.
4. Perbedaan kualitas sumber daya manusia.

Penyebab kemiskinan di desa dan di kota. Kemiskinan di desa disebabkan oleh faktor-faktor, diantaranya:

- a. Ketidakberdayaan. Kondisi ini muncul karena kurangnya lapangan kerja, rendahnya harga produk yang dihasilkan, dan tingginya biaya pendidikan.

- b. Keterkucilan, rendahnya tingkat pendidikan, kurangnya keahlian, sulitnya transportasi, serta ketiadaan akses terhadap kredit menyebabkan mereka terkucil dan menjadi miskin.
- c. Kemiskinan materi. Kondisi ini diakibatkan kurangnya modal dan minimnya lahan pertanian yang dimiliki menyebabkan penghasilan mereka relatif rendah.
- d. Kerentanan, sulitnya mendapat pekerjaan, pekerjaan musiman, dan bencana alam, membuat mereka menjadi rentan dan miskin.
- e. Sikap. Sikap yang menerima apa adanya dan kurang termotivasi untuk bekerja keras membuat mereka menjadi miskin.

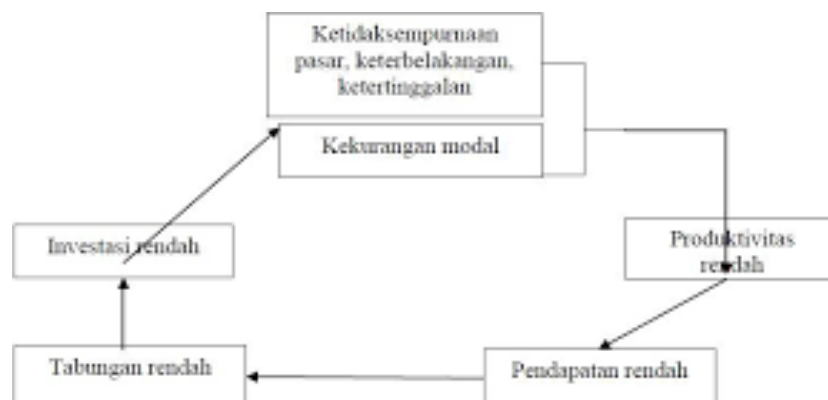
Penyebab kemiskinan di kota pada dasarnya disebabkan oleh faktor-faktor yang sama dengan kemiskinan yang terjadi di desa. Perbedaannya terletak pada penyebab dari faktor-faktor tersebut. Misalnya faktor ketidakberdayaan di kota cenderung disebabkan oleh kurangnya lapangan pekerjaan, dan tingginya biaya hidup.

Kuncoro (2006) mencoba mengidentifikasi penyebab kemiskinan dipandang dari sisi ekonomi. Pertama, secara mikro kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. Kedua, kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumber daya manusia. Ketiga, kemiskinan muncul akibat perbedaan akses dalam modal. Ketiga penyebab kemiskinan tersebut bermuara pada teori lingkaran setan kemiskinan (*Vicious Circle of Poverty*).

(Kuncoro, 2006) Adanya keterbelakangan, ketidaksempurnaan pasar, dan kurangnya modal mengakibatkan rendahnya pendapatan yang mereka terima.

Rendahnya pendapatan akan berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi.

Rendahnya investasi berakibat pada keterbelakangan, dan seterusnya.



Gambar 2. 1 Lingkaran Setan Kemiskinan Versi Nurkse

Sumber: *Kuncoro (2006: 120)*

D. Indikator Kemiskinan

Berdasarkan penjelasan Badan Pusat Statistik, istilah penduduk dapat didefinisikan sebagai semua orang yang tinggal atau berdomisili di suatu wilayah dan menetap di wilayah tersebut selama enam bulan atau lebih dan atau orang tersebut tinggal kurang dari enam bulan tetapi bertujuan untuk menetap. 15 Istilah penduduk juga dapat diartikan secara lebih luas lagi, yaitu warga yang mendiami suatu daerah geografis tertentu. Penduduk lebih identik sebagai warga yang menetap di suatu daerah tertentu dan telah diakui keberadaannya di daerah tersebut melalui adanya bukti, seperti bukti yang tertera pada kartu identitas. Istilah penduduk cukup lekat kaitannya dengan beberapa aspek pembahasan dalam keilmuan, layaknya sosiologi, geografi, maupun ekonomi. Melalui sudut pandang ekonomi, penduduk sering kali dikaitkan dengan banyak hal, seperti di antaranya yaitu dalam hal pemasaran dan unit-unit ekonomi lainnya. Selain itu, permasalahan yang berkaitan dengan kependudukan biasa dipelajari juga sebagai bagian dari ilmu demografi. Ilmu demografi itu sendiri dapat mencakup

pembahasan terkait jumlah 15 Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Tulungagung Dalam..., hlm. 96 23 penduduk, persebaran geografisnya, serta berbagai hal lainnya yang masih berkaitan dengan kependudukan dalam sudut pandang analisis kuantitatif Berdasarkan pendekatan kebutuhan dasar, BPS menggunakan tiga indikator kemiskinan, yaitu:

1. *Head Count Index*, yaitu persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan.
2. *Poverty Gap Index* (Indeks Kedalaman Kemiskinan), yang merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan.
3. *Poverty Severity Index* (Indeks Keparahan Kemiskinan) yang memberikan Gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Disamping itu, untuk mengukur tingkat kemiskinan BPS menggunakan konsep.

Kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Untuk kebutuhan minimum makanan digunakan patokan 2.100 kalori per orang per hari. Sedangkan untuk kebutuhan minimum bukan makanan meliputi pengeluaran untuk perumahan, sandang, serta aneka barang dan jasa lainnya. Jadi penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan di bawah garis kemiskinan.

2.1.6 Kebijakan Pemerintah

Kemiskinan merupakan masalah lama yang pada umumnya dihadapi hampir di semua negara-negara berkembang, terutama negara yang padat penduduknya seperti Indonesia. Kemiskinan seharusnya menjadi masalah bersama yang harus ditanggulangi secara serius, kemiskinan bukanlah masalah pribadi, golongan bahkan pemerintah saja, akan tetapi hal ini merupakan masalah setiap kita warga negara Indonesia (Herlina & Komariah, 2017). Kemiskinan merupakan salah satu masalah sosial penting yang dihadapi oleh pemerintah. Hal ini disebabkan bahwa kemiskinan akan menimbulkan masalah-masalah lainnya, seperti kejahatan, penyakit, dan penjajahan oleh bangsa lain. Banyak hal yang menjadi penyebab kemiskinan, antara lain pendidikan yang rendah, kesempatan kerja yang sempit, tidak meratanya perekonomian, dan lain-lain. Tentunya hal ini tidak boleh dibiarkan oleh pemerintah.

Menurut Ali & Alam, (2012) Kebijakan pemerintah pada hakikatnya merupakan kebijakan yang ditujukan untuk publik dalam pengertian yang seluasluasnya (negara, masyarakat dalam berbagai status serta untuk kepentingan umum), baik itu dilakukan secara langsung maupun tidak secara langsung yang tercermin pada berbagai dimensi kehidupan publik. Kebijakan pemerintah terkait strategi pengentasan kemiskinan di ditandai oleh upaya pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan yang dituangkan ke dalam peraturan perundang-undangan yang kemudian merumuskan program-program pengentasan kemiskinan. Mulai dari masa orde lama hingga masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla terus berupaya menurunkan jumlah masyarakat Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan (Murdiyana & Mulyana, 2017).

Menurut Liwiya et al., (2018) dalam pengentasan kemiskinan pemerintah memiliki peran yang besar. Namun dalam kenyataannya, program yang dijalankan oleh pemerintah belum mampu menyentuh pokok yang menimbulkan masalah kemiskinan ini. Ada beberapa program pemerintah yang sudah dijalankan dan dimaksudkan sebagai solusi untuk mengatasi masalah kemiskinan ini. Seperti di antaranya adalah program Bantuan Langsung Tunai merupakan usai penghapusan subsidi minyak tanah, dan program konversi bahan bakar gas, penerangan /lampu, infrastruktur, air bersih. Selain itu ada juga pelaksanaan bantuan di bidang kesehatan yaitu jaminan kesehatan masyarakat atau Jamkesmas. Namun kedua hal tersebut tidak memiliki dampak signifikan terhadap pengurangan angka kemiskinan.

Menurut Suripto, (2005) Pemerintah daerah perlu mempunyai kebijaksanaan pembangunan yang dilengkapi dengan program redistribusi pendapatan yaitu menciptakan keseimbangan antara pembangunan industri dan pertanian serta mengalokasikan sumber daya yang memadai untuk penyediaan kebutuhan dasar masyarakat. Untuk itu perlu dilakukan identifikasi permasalahan di setiap wilayah dan selanjutnya disusun Indonesia berjalan cukup baik. Hal ini kebijakan yang relevan. Pemerintah daerah perlu menyusun berbagai program penanggulangan kemiskinan secara terintegrasi. Program tersebut haruslah sustainable yang juga perlu mempertimbangkan kondisi lokal dimana kemiskinan itu terjadi.

A. Program Pemerintah dalam Menanggulangi Kemiskinan

Beberapa program yang dilakukan oleh pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan antara lain dengan memfokuskan arah pembangunan meliputi 5 hal antara lain:

1. Menjaga stabilitas harga bahan kebutuhan pokok.
2. Mendorong pertumbuhan yang berpihak pada rakyat miskin.
3. Menyempurnakan dan memperluas cakupan program pembangunan berbasis masyarakat.
4. Meningkatkan akses masyarakat miskin kepada pelayanan dasar.
5. Membangun dan menyempurnakan system perlindungan sosial bagi masyarakat miskin.

Dari lima fokus program pemerintah tersebut, diharapkan jumlah rakyat miskin yang ada dapat tertanggulangi sedikit demi sedikit. Beberapa Langkah teknis yang dilakukan pemerintah terkait lima program tersebut dengan menjaga stabilitas harga bahan kebutuhan pokok yang bertujuan menjamin daya beli masyarakat miskin atau keluarga miskin untuk memenuhi kebutuhan pokok terutama beras dan kebutuhan pokok utama selain beras. Program yang berkaitan dengan fokus ini seperti, penyediaan cadangan beras pemerintah 1 juta ton dan stabilisasi/kepastian harga komoditas primer. Mendorong pertumbuhan yang berpihak pada rakyat miskin. Program ini bertujuan mendorong terciptanya dan terfasilitasinya kesempatan berusaha yang lebih luas dan berkualitas bagi masyarakat atau keluarga miskin. Beberapa program yang berkenaan dengan fokus ini antara lain:

1. Penyediaan dana bergulir untuk kegiatan produktif skala usaha mikro dengan pola bagi hasil/syariah dan konvensional.
2. Bimbingan teknis/pendampingan dan pelatihan pengelola Lembaga Keuangan Mikro (LKM)/Koperasi Simpan Pinjam (KSP).
3. Pelatihan budaya, motivasi usaha, dan teknis manajemen usaha mikro.
4. Pembinaan sentra-sentra produksi di daerah terisolir dan tertinggal.
5. Fasilitasi sarana dan prasarana usaha mikro.
6. Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir.
7. Pengembangan usaha perikanan tangkap skala kecil.
8. Peningkatan akses informasi dan pelayanan pendampingan pemberdayaan dan ketahanan keluarga.
9. Percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah.
10. Peningkatan koordinasi penanggulangan kemiskinan berbasis kesempatan berusaha bagi masyarakat miskin.

Program pembangunan berbasis masyarakat untuk meningkatkan sinergi dan optimalisasi pemberdayaan masyarakat di kawasan perdesaan dan perkotaan serta memperkuat penyediaan dukungan pengembangan kesempatan berusaha bagi penduduk miskin antara lain:

1. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) di daerah perdesaan dan perkotaan.
2. Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah.
3. Program Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus.

4. Penyempurnaan dan pemantapan program pembangunan berbasis masyarakat.

Berikut ini adalah program-program pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan di Indonesia:

1. Anggaran untuk program-program yang berkaitan dilaksanakan dengan pendekatan pemberdayaan berbasis komunitas dan kegiatan padat karya.
2. Mendorong APBD untuk meningkatkan anggaran bagi penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja.
3. Tetap mempertahankan program lama seperti: BOS (Bantuan Operasional Sekolah), RASKIN (Beras Miskin), BLT (Bantuan Langsung Tunai), Asuransi Miskin, dsb.
4. Akselerasi pertumbuhan ekonomi dan stabilitas harga khususnya harga beras (antara lain: menjaga harga beras dipasaran tidak lebih dari Rp5000,-per Kg)
5. Memberikan kewenangan yang lebih luas kepada masyarakat dalam pengambilan keputusan pembangunan.
6. Sinergi masyarakat dengan pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan.
7. Mendayagunakan potensi dan sumberdaya lokal sesuai karakteristik wilayah.
8. Menerapkan pendekatan budaya lokal dalam proses pembangunan.
9. Prioritas kelompok masyarakat paling miskin dan rentan pada desadesa dan kampung-kampung paling miskin.

10. Kelompok masyarakat dapat menentukan sendiri kegiatan pembangunan yang dipilih tetapi tidak tercantum dalam negative list.
11. Kompetitif: desa-desa dalam Kecamatan harus berkompetisi untuk memperbaiki kualitas kegiatan dan cost effectiveness.
12. PPK, P2KP, PPIP SPADA dan diperkuat program-program kementerian/lembaga.
13. Program Keluarga Harapan (PKH), berupa bantuan khusus untuk pendidikan dan kesehatan.
14. Program pemerintah yang bertujuan meningkatkan akses masyarakat miskin kepada sumber permodalan usaha mikro dan kecil, listrik pedesaan, sertifikasi tanah, kredit mikro.
15. Program Pengembangan Bahan Bakar Nabati (EBN). Program ini dimaksudkan untuk mendorong kemandirian penyediaan energi terbarukan dengan menumbuhkan “Desa Mandiri Energi”.
16. Penegakan hukum dan HAM, pemberantasan korupsi dan reformasi birokrasi.
17. Percepatan pembangunan infrastruktur.
18. Pembangunan daerah perbatasan dan wilayah terisolir.
19. Revitalisasi pertanian, perikanan, kehutanan, dan perdesaan.
20. Peningkatan kemampuan pertahanan, pemantapan keamanan dan ketertiban, serta penyelesaian konflik.
21. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan.
22. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM-Mandiri)

B. Strategi dalam Mengatasi Kemiskinan Di Indonesia

Strategi pembangunan ekonomi adalah mengembangkan kesempatan kerja bagi penduduk yang ada sekarang dan upaya untuk mencapai stabilitas ekonomi, serta mengembangkan basis ekonomi dan kesempatan kerja yang beragam. Pembangunan ekonomi dikatakan berhasil jika mampu memenuhi kebutuhan dunia usaha.

Menurut Lincoln Arsyad (2010) ada 4 strategi pembangunan ekonomi daerah, yaitu: *Pertama*, Strategi pengembangan fisik (*locality or physical development strategy*) untuk menciptakan identitas daerah kota, memperbaiki pesona atau kualitas hidup masyarakat dan memperbaiki daya tarik pusat kota dalam upaya memperbaiki dunia usaha daerah. *Kedua*, Strategi pengembangan dunia usaha (*business development strategy*) merupakan komponen yang penting karena daya tarik kreativitas atau daya tarik dunia usaha adalah cara terbaik untuk menciptakan perekonomian daerah yang sehat. *Ketiga*, Strategi pengembangan sumber daya manusia (*human resource development strategy*) Hal ini dapat dilakukan dengan cara membuat pelatihan, membuat bank keahlian, mendukung lembaga ketrampilan dan pendidikan di daerah, dan mengembangkan lembaga pelatihan bagi orang cacat. *Keempat*, Strategi pengembangan masyarakat (*community-based development strategy*), kegiatan untuk memberdayakan suatu kelompok masyarakat tertentu pada suatu daerah. Tujuannya adalah untuk menciptakan manfaat sosial.

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Rusdarti Rusdarti dan Lesta Karolina Sebayang, 2013	Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah	Menunjukkan bahwa penurunan tingkat pengangguran tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Faktanya bahwa jumlah orang miskin di daerah lebih besar daripada kota. Secara statistik, PDRB dan variabel lainnya seperti pengeluaran publik berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan sedangkan pengangguran pengaruhnya tidak signifikan.
2.	Shelva Edna Safitri, Nunuk Triwahyuningtyas dan Sugianto, 2022	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan di Provinsi Banten	Menunjukkan bahwa subsidi pemerintah memiliki pengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Banten, PDRB memiliki pengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Banten, IPM tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Banten.

**Tabel 2.1 (Sambungan)
Penelitian Terdahulu**

3.	Dela Dwiazhari, 2020	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur	Menunjukkan bahwa seluruh variabel yakni PDRB, konsumsi, PMA, PMDN, kesehatan, dan pendidikan memiliki pengaruh negatif terhadap kemiskinan di Jawa Timur. dimana terdapat dua variabel yang memiliki inklusivitas yang baik dengan pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan yakni variabel PDRB dan kesehatan, yang artinya jika terjadi peningkatan pada variabel PDRB dan Kesehatan maka akan terjadi penurunan tingkat kemiskinan secara signifikan di Jawa Timur.
4.	Ira Yani Safitri, 2021	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara	Menunjukan bahwa variabel jumlah penduduk memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan di Sumatera Utara. Sedangkan IPM dan PDRB Perkapita memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Sumatera Utara. Diharapkan

**Tabel 2.1 (Sambungan)
Penelitian Terdahulu**

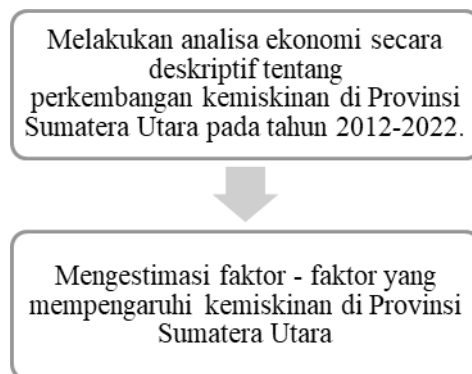
			pemerintah lebih memfokuskan pada pemberian berbagai pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan pengembangan keterampilan, khususnya di sektor pertanian dan industri dengan tetap memperhatikan prospek pasar atas output yang dihasilkan.
5.	Farathika Putri Utami, Irsad Lubis dan Rahmanta, 2022	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan di Aceh Bagian Timur	Menunjukkan bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan, semakin tinggi jumlah penduduk maka semakin tinggi pula tingkat kemiskinan suatu daerah, IPM tidak berpengaruh terhadap kemiskinan, IPM tinggi dan rendah tidak berpengaruh terhadap tingkat Kemiskinan, PDRB berpengaruh negatif terhadap kemiskinan, semakin tinggi PDRB daerah maka tingkat kemiskinan akan semakin terkendali, Pengangguran tidak mempengaruhi

**Tabel 2.1 (Sambungan)
Penelitian Terdahulu**

			kemiskinan, tinggi rendahnya pengangguran tidak selalu menunjukkan tinggi rendahnya tingkat kemiskinan di daerah Aceh bagian timur.
--	--	--	---

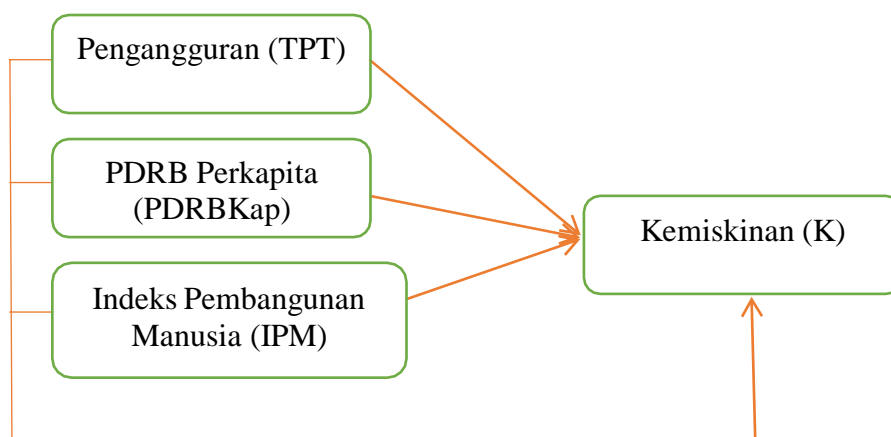
2.3 Kerangka Berpikir Konseptual

Kerangka konseptual adalah keterkaitan antara teori-teori atau konsep yang mendukung dalam penelitian yang digunakan sebagai pedoman dalam menyusun sistematis penelitian. Kerangka konseptual menjadi pedoman peneliti untuk menjelaskan secara sistematis teori yang digunakan dalam penelitian. Penelitian ini memiliki kerangka konseptual yang akan dijelaskan pada gambar dibawah ini dan lebih jelasnya akan dijelaskan pada pembahasan selanjutnya.



Gambar 2.2 Kerangka Konseptual

2.3.1 Kerangka Konseptual Model Estimasi



Gambar 2. 3 Bagan Kerangka Model Estimasi

Dalam Model ini, Variabel Jumlah Penduduk, Pendapatan Domestik Regional Bruto Per Kapita (PDRB), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Pengangguran merupakan variabel bebas yang mempengaruhi secara langsung terhadap Kemiskinan, yang dimana Kemiskinan merupakan variabel terikat.

2.4 Hipotesis

Berdasarkan tujuan penelitian, landasan teori dan penelitian-penelitian terdahulu, maka didapat hipotesa sebagai berikut :

1. Terdapat pengaruh antara Pengangguran terhadap Kemiskinan.
2. Terdapat pengaruh antara Pendapatan Domestik Regional Bruto Per Kapita terhadap Kemiskinan.
3. Terdapat pengaruh antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara.
4. Terdapat pengaruh secara simultan antara Pengangguran, Pendapatan Domestik Regional Bruto Per Kapita dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara variabel yang telah ditentukan untuk menjawab rumusan masalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu data yang berbentuk kalimat verbal dan data kuantitatif yaitu data yang berbentuk angka dan bilangan. Data yang digunakan adalah data time series, yaitu data yang secara kronologi disusun menurut waktu pada suatu variable tertentu. Data yang diteliti adalah di Provinsi Sumatera Utara dan waktu penelitian yang dihimpun adalah pada tahun 2012 sampai 2022 yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

3.2 Definisi Operasional

Defenisi operasional merupakan acuan dari tinjauan pustaka yang digunakan untuk melakukan penelitian dimana antara variabel yang satu dengan variabel yang lainnya dapat dihubungkan sehingga penelitian dapat disesuaikan dengan data yang diinginkan. Adapun variabel yang terdapat dalam penelitian ini ialah: Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita (PDRB), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Pengangguran terhadap Kemiskinan.

Tabel 3.1
Defenisi Operasional Variabel

Variabel	Defenisi Operasional	Sumber Data
Kemiskinan	Penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan (Jiwa)	BPS (Badan Pusat Statistik) www.bps.go.id
Pengangguran (TPT)	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	BPS (Badan Pusat Statistik) www.bps.go.id
Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita (PDRB)	Jumlah penduduk dibagi pendapatan (satuan juta rupiah)	BPS (Badan Pusat Statistik) www.bps.go.id
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Tingkat kualitas hidup penduduk Indonesia (%)	BPS (Badan Pusat Statistik) www.bps.go.id

3.3 Tempat dan Waktu Penelitian

3.3.1 Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Provinsi Sumatra Utara.

3.3.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini direncanakan selama 3 bulan yang dimulai dari April sampai Juli 2023.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan pengambilan data sekunder melalui website - website resmi seperti Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Keuangan RI (Kemenkeu RI) dan Bank Indonesia dengan objek penelitian di Provinsi Sumatera Utara dan kurun waktu selama 10 tahun (2012 – 2022).

3.5 Teknik Analisis Data

3.5.1 Metode Analisis Deskriptif

Metode analisis deskriptif merupakan suatu metode analisa sederhana yang dapat digunakan untuk menggambarkan kondisi observasi dengan menyajikan dalam bentuk tabel, grafik, maupun narasi dengan tujuan memudahkan pembaca dalam menafsirkan hasil penelitian. Metode analisis deskriptif dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana perkembangan tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara.

3.5.2 Menggunakan Apk E-views 2010

E-views merupakan program komputer yang digunakan untuk mengolah data statistik dan data ekonometri. E-views dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah yang berbentuk time-series, cross section, maupun data panel.

3.5.3 Metode Analisis Model Ekonometrika

1. Model Estimasi

Penelitian ini mengenai faktor yang mempengaruhi kemiskinan dengan menggunakan data times series yaitu data runtun waktu 10 tahun (dari tahun 2012 sampai 2022), model ekonometrika pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$K = \beta_0 + \beta_1 \text{TPT} + \beta_2 \text{PDRB Kap} + \beta_3 \text{IPM} + e$$

Dimana :

K = Kemiskinan

TPT = Tingkat Pengangguran Terbuka

PDRB Kap = Produk Domestik Regional Bruto

IPM = Indeks Pembangunan Manusia

β_0 = Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ = Koefisien

e = *term of error*

Setelah model penelitian diestimasi maka akan diperoleh nilai dan besaran masing-masing parameter dalam model persamaan diatas. Nilai dari parameter positif dan negatif selanjutnya akan diperoleh untuk menguji hipotesa penelitian.

2. Metode Estimasi

Metode estimasi pada penelitian ini adalah untuk mengestimasi semua variable yang diamati menggunakan data data runtut waktu (time series) dalam kurun waktu 10 tahun (dari tahun 2012 sampai 2022). Analisis trend dalam kurun waktu tersebut dapat dianalisis dengan menggunakan metode kuadrat terkecil atau OLS (*Ordinary Least Square*) dalam bentuk regresi linier berganda (*multiple regression model*) yang disajikan lebih sederhana serta mudah dipahami. Asumsi-asumsi yang mendasari model regresi linear dengan menggunakan metode OLS adalah sebagai berikut :

1. Nilai rata-rata disturbance tern $= 0$
2. Tidak terdapat Korelasi serial (*serial auto correlation*) diantara disturbancetern $COV(\epsilon_t, \epsilon_j) = 0 : I \neq j$
3. Sifat momocidentecity dari disturbance tern $Var(\epsilon_t) = \sigma^2$
4. Covariance antar ϵ_t dari setiap variabel bebas (x) = 0 setiap variabel bebas (x) = 0
5. Tidak terdapat bias dalam spesifikasi model regresi. Artinya,

model regresi yang diuji secara tepat telah dispesifikasikan atau diformulasikan.

6. Tidak terdapat *collinearity* antara variabel-variabel bebas. Artinya, variabel-variabel bebas tidak mengandung hubungan linier tertentu antara sesamanya.

Jika model berganda yang diestimasi melalui OLS memenuhi suatu set asumsi (*asumsi gauss-markov*), maka dapat ditunjukkan bahwa parameter yang diperoleh adalah bersifat BLUE (*best linear unbiased estimator*) (Gujarati, 2012).

3. Tahapan Analisis

A. Penaksiran

1) Kolerasi (r)

Koefisien korelasi merupakan derajat keeratan antara variabel terikat dengan variabel bebas yang diamati. Koefisien korelasi biasanya dilambangkan dengan huruf r dimana bervariasi mulai -1 sampai +1. Nilai r -1 atau +1 menunjukkan hubungan yang kuat antara variabel-variabel tersebut, jika nilai $r = 0$, mengindikasikan tidak ada hubungan antara variabel-variabel tersebut. Sedangkan tanda + (positif) dan - (negatif) memberikan informasi mengenai arah dari hubungan antara variabel-variabel tersebut.

2) Uji Koefisien Determinasi (D)

Koefisien determinasi bertujuan untuk mengetahui seberapa besar persentase sumbangan variabel bebas terhadap variabel terikat yang dapat dinyatakan dalam persentase. Namun tidak dapat

dipungkiri ada kalanya dalam penggunaan koefisien determinasi (D) terjadi bias terhadap satu variabel bebas yang dimasukkan dalam model. Sebagai ukuran kesesuaian garis regresi dengan sebaran data, menghadapi masalah karena tidak memperhitungkan derajat bebas. Sebagai alternatif digunakan *corrected* atau $\text{adjusted } R^2$ (Kuncoro, 2018).

B. Pengujian (*Test Diagnostic*)

1) Uji Parsial (Uji t)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas secara individual dalam menerangkan variasi variabel terikat (Gujarati, 2012). Uji t dilakukan untuk melihat signifikan dari pengaruh X_1 , X_2 , X_3 dan X_4 secara *individual* terhadap Y. Dalam hal ini pengujian dilakukan adalah sebagai berikut:

Perumusan Hipotesis

Hipotesis $H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = 0$

(tidak ada hubungan yang signifikan antara masing-masing variabel jumlah penduduk miskin, produk domestik regional bruto, indeks pembangunan manusia dan pengangguran terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara).

Hipotesis $H_a : \beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_3 \neq \beta_4 \neq 0$

(ada hubungan yang signifikan antara masing-masing variabel jumlah penduduk miskin, produk domestik regional bruto, indeks pembangunan manusia dan pengangguran terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara).

Uji statistik yang digunakan adalah uji t. dimana t hitung adalah :

$$t_h = \frac{\beta_i}{se-\beta_i} \dots \dots \dots (3.4)$$

dimana:

β_1 = Jumlah Penduduk

β_2 = Produk Domestik Regional Bruto

β_3 = Indeks Pembangunan Manusia

β_4 = Pengangguran

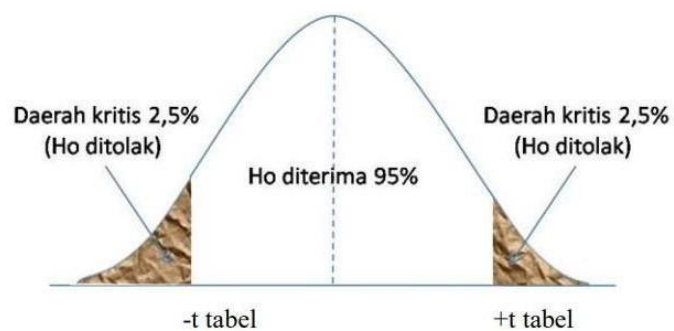
se β_i = Standar eror β_i

Nilai t_{hitung} akan dibandingkan dengan $t_{tabel} = \pm t (\alpha / 2, n - 1)$.

Kriteria Uji :

Terima H_0 jika $-t_{tabel} < t_{hitung} < +t_{tabel}$, hal lain tolak H_0 atau dalam distribusi kurva normal t dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Kesimpulan :



Gambar 3.1 Uji t-hitung

Sesuai kriteria uji maka terima H_0 atau tolak H_0 .

2) Uji Simultan (Uji F)

Digunakan untuk mengetahui pada model jumlah penduduk miskin, produk domestik regional bruto, indeks pembangunan manusia dan

pengangguran secara keseluruhan berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Dengan langkah Langkah sebagai berikut :

Perumusan Hipotesis

Hipotesis $H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = 0$

(tidak ada hubungan yang signifikan secara serentak antara variabel variabel jumlah penduduk miskin, produk domestik regional bruto, indeks pembangunan manusia dan pengangguran terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara).

Hipotesis $H_a : \beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_3 \neq \beta_4 \neq 0$

(ada hubungan yang signifikan secara serentak antara variabel jumlah penduduk miskin, produk domestik regional bruto, indeks pembangunan manusia dan pengangguran terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara).

Uji statistik yang digunakan adalah uji F, dimana F hitung adalah :

$$F = \frac{R^2/K-1}{(1-R^2)/(n-k)} \dots\dots\dots(3.5)$$

Dimana:

k = Jumlah parameter yang diestimasi

n = Jumlah data yang di observasi

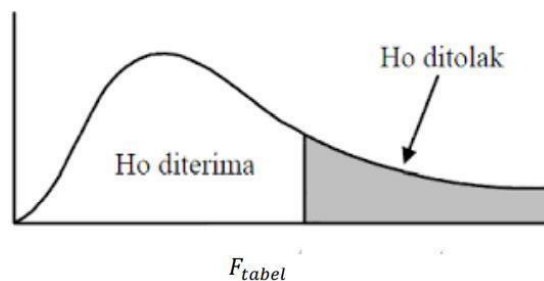
Nilai F_{hitung} akan dibandingkan dengan $F_{tabel} = F(\alpha, n - k - 1)$

dengan derajat kesalahan $\alpha = 10\%$

1. Kriteria Uji:

Terima jika H_0 jika $F_{hitung} < F_{tabel}$, hal lain tolak H_0 .

Atau dalam distribusi kurva F dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 3. 2 Uji f-hitung

2. Kesimpulan terima atau tolak H_0 :

Memberikan kesimpulan sesuai kriteria uji maka terima H_0 .

3) Uji Asumsi Klasik

Metode OLS mendapatkan nilai estimator yang diharapkan dapat memenuhi sifat estimator OLS yang BLUE (*Blue Linear Unbiased Estimator*) dengan cara meminimumkan kuadrat simpangan setiap observasi dalam sampel. Secara singkat dapat disimpulkan bahwa terdapat tiga asumsi dalam metode estimasi OLS yang harus dipenuhi dalam pengujian berdasarkan criteria ekonometrika, yaitu:

1. Tidak ada masalah hubungan antara variabel independen dalam regresi berganda yang digunakan (tidak multikolinearitas).
2. Varian variabel yang konstan (tidak heterokedastisitas).
3. Tidak ada hubungan variabel gangguan antara satu observasi dengan observasi berikutnya (tidak ada autokorelasi).

4) Multikolinieritas

Multikolinieritas berhubungan dengan situasi dimana ada linear baik yang pasti atau mendekati pasti antara variabel independen. Masalah multikolinieritas timbul bila variabel-variabel independen berhubungan satu sama lain. Selain mengurangi kemampuan untuk menjelaskan dan memprediksi, multikolinieritas juga menyebabkan kesalahan baku koefisien (uji t) menjadi indikator yang tidak terpercaya (Gujarati, 2012).

Uji multikolinieritas ini bertujuan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel bebas saling berhubungan secara linear dalam model persamaan regresi. Apabila terjadi multikolinieritas, akibatnya variabel penafsiran menjadi cenderung terlalu besar, t-hitung tidak bias, namun tidak efisien.

Dalam penelitian ini uji multikolinieritas dilakukan dengan menggunakan *auxiliary regression* untuk mendekteksi adanya multikolinieritas. Kriterianya adalah jika R^2 regresi persamaan utama lebih dari R^2 regresi *auxiliary* maka didalam model ini tidak terjadi multikolinieritas.

5) Heterokedastisitas

Heterokedastisitas adalah keadaan dimana varians dari setiap gangguan tidak konstan. Dampak adanya hal tersebut adalah tidak efisisennya proses estimasi, sementara hasil estimasinya sendiri tetap konsisten dan tidak bias serta akan mengakibatkan hasil uji t dan uji f dapat menjadi tidak "*reliable*" atau tidak dapat dipertanggung jawabkan.

Untuk mengetahui ada atau tidaknya heterokedastisitas dapat digunakan Uji White. Secara manual uji ini dilakukan dengan melakukan regresi kuadrat dengan variabel bebas kuadrat dan perkalian variabel bebas. Nilai R² yang didapat digunakan untuk menghitung χ^2 , dimana $\chi^2 = n \cdot R^2$ (Gujarati, 2012). Dimana pengujiannya adalah jika nilai probability Observasion R-Squared lebih besar dari taraf nyata 5%, Maka hipotesis alternatif adanya heteroskedastisitas dalam model ditolak.

6) Autokorelasi

Autokorelasi adalah keadaan dimana variabel gangguan pada periode tertentu berkorelasi dengan variabel pada periode lainnya, dengankata lain variabel gangguan tidak random. Faktor-faktor yang menyebabkan autokorelasi antara lain kesalahan dalam menentukan model, menggunakan lag pada model memasukkan variabel yang penting. Akibat dari adanya autokorelasi adalah parameter bias dan variannya minimum, sehingga tidak efisien (Gujarati, 2012).

Untuk menguji ada tidaknya autokorelasi salah satunya diketahui dengan melakukan Uji *Durbin Watson Test*. Dimana apabila di dan du adalah batas bawah dan batas atas, statistik menjelaskan apabila nilai *Durbin Watson* berada pada $2 < DW < 4$ -du maka autokorelasi atau *no-autocorrelation* (Gujarati, 2012).

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Perkembangan Tingkat Kemiskinan di Indonesia Tahun 2012 - 2022

4.1.1 Tingkat kemiskinan di Indonesia

Indonesia saat ini memasuki era bonus demografi, dimana penduduk usia produktif jauh lebih banyak di banding dengan usia tidak produktif. Jika bonus demografi ini dapat dikelola dengan baik oleh pemerintah, kondisi ini akan menjadi modal penting untuk membangun untuk menuju 100 tahun Indonesia merdeka pada 2045. Namun, jika tidak dikelola dengan baik dapat menjadi boomerang dan menjadi beban bagi negara. Pertumbuhan penduduk Indonesia dapat di lihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Menurut Provinsi di Indonesia Tahun 2018 –
2022**

Provinsi di Indonesia	Jumlah Penduduk Menurut Provinsi di Indonesia (Ribuan Jiwa)				
	2018	2019	2020	2021	2022
Aceh	5243.4	5316.3	5274.9	5333.7	5407.9
Sumatera Utara	14476.0	14639.4	14799.4	14936.2	15115.2
Sumatera Barat	5411.8	5479.5	5534.5	5580.2	5640.6
Riau	6717.6	6835.1	6394.1	6493.6	6614.4
Kep. Riau	2174.8	2241.6	2064.6	2118.2	2179.8
Jambi	3527.1	3566.2	3548.2	3585.1	3631.1
Sumatera Selatan	8391.5	8497.2	8467.4	8550.9	8657.0
Kep. Bangka Belitung	1432.1	1451.1	1455.7	1473.2	1494.6
Bengkulu	1948.6	1971.8	2010.7	2032.9	2060.1
Lampung	8377.7	8457.6	9007.8	9081.8	9176.6
DKI Jakarta	10428.0	10504.1	10562.1	10609.7	10680.0
Jawa Barat	48475.5	49023.2	48274.2	48782.4	49405.8
Banten	12530.8	12714.3	11904.6	12061.5	12252.0
Jawa Tengah	34358.5	34552.5	36516.0	36742.5	37032.4
DI Yogyakarta	3818.3	3868.6	3668.7	3712.9	3761.9
Jawa Timur	39521.9	39744.8	40665.7	40878.8	41150.0

Kalimantan Barat	4985.1	5045.7	5414.4	5470.8	5541.4
Kalimantan Tengah	2612.6	2649.8	2670.0	2702.2	2741.1
Kalimantan Selatan	4162.4	4216.3	4073.6	4122.6	4182.1
Kalimantan Timur	3573.8	3619.7	3766.0	3808.2	3859.8
Kalimantan Utara	682.8	695.6	701.8	713.6	727.8
Sulawesi Utara	2474.4	2494.1	2621.9	2638.6	2659.5
Gorontalo	1166.1	1176.4	1171.7	1181.0	1192.7
Sulawesi Tengah	3001.9	3042.1	2985.7	3021.9	3066.1
Sulawesi Selatan	8748.1	8819.5	9073.5	9139.5	9225.8
Sulawesi Barat	1340.1	1359.2	1419.2	1436.8	1458.6
Sulawesi Tenggara	2623.6	2663.7	2624.9	2659.2	2701.7
Bali	4309.2	4362.0	4317.4	4362.7	4415.1
Nusa Tenggara Barat	5077.7	5152.4	5320.1	5390.0	5473.7
Nusa Tenggara Timur	5360.3	5437.2	5325.6	5387.7	5466.3
Maluku	1749.5	1768.5	1848.9	1862.6	1881.7
Maluku Utara	1218.8	1235.7	1282.9	1299.2	1319.3
Papua Barat	941.4	963.6	1134.1	1156.8	1183.3
Papua	3300.2	3347.1	4303.7	4355.5	4418.6
Indonesia	264161.6	266911.9	270203.9	272682.5	275773.8

Sumber: BPS

Dapat di lihat dari tabel di atas bahwa jumlah penduduk Indonesia dari tahun ke tahun terus mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan. Yang akhirnya di tahun 2022 total penduduk Indonesia menjadi sebanyak 275.773,8 juta jiwa yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Banyaknya penduduk juga dapat menjadi masalah contohnya kemiskinan dan pengangguran data jumlah penduduk miskin yang ada di Indonesia dapat di lihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia Tahun 2012 – 2022

Provinsi	Jumlah Penduduk Miskin Menurut Provinsi (Ribu Jiwa)										
	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
ACEH	818.47	850.26	833.91	809.76	831.50	829.80	841.31	859.41	837.42	855.71	876.56
SUMATERA UTARA	1262.09	1273.07	1356.72	1260.50	1291.99	1326.57	1452.55	1508.14	1360.60	1390.80	1378.45
SUMATERA BARAT	343.82	339.93	364.79	343.09	353.24	359.99	376.51	349.53	354.74	380.63	397.86
RIAU	493.13	496.66	491.22	483.92	494.26	496.39	501.59	562.92	498.28	522.53	481.31
JAMBI	283.82	279.86	288.10	273.37	281.47	278.61	290.81	311.56	281.75	281.57	270.08
SUMATERA SELATAN	1054.99	1116.61	1119.65	1067.16	1076.40	1086.76	1096.50	1112.53	1085.80	1108.21	1042.04
BENGKULU	292.93	291.79	306.00	298.00	303.55	302.62	325.60	322.83	316.50	320.41	310.47
LAMPUNG	995.59	1007.02	1091.14	1041.48	1091.60	1083.74	1139.78	1100.68	1143.93	1134.28	1218.99
KEP. BANGKA BELITUNG	69.69	69.70	72.05	67.37	69.93	76.20	71.07	66.62	67.23	70.90	70.21
KEP. RIAU	148.89	137.75	142.61	127.76	125.36	128.43	119.14	114.83	124.17	125.02	131.22
DKI JAKARTA	494.93	498.29	496.84	362.30	372.26	393.13	385.84	368.67	412.79	375.70	366.77
JAWA BARAT	4053.62	4004.86	4188.52	3375.89	3539.40	3774.41	4168.11	4485.65	4238.96	4382.65	4421.48
JAWA TENGAH	3858.23	3934.01	4119.93	3679.40	3867.42	4197.49	4493.75	4505.78	4561.82	4704.87	4863.41
DI YOGYAKARTA	463.63	474.49	503.14	440.89	450.25	466.33	488.83	485.56	532.59	535.18	562.11
JAWA TIMUR	4236.51	4259.60	4585.97	4056.00	4292.15	4405.27	4638.53	4775.97	4748.42	4865.82	4960.54
BANTEN	829.66	852.28	857.64	641.42	668.74	699.83	657.74	690.67	649.19	682.71	648.25
BALI	205.36	211.46	196.92	156.91	168.34	176.48	174.94	218.79	195.95	186.53	160.95
NUSA TENGGARA BARAT	744.69	735.30	746.04	705.68	735.62	748.12	786.58	802.29	816.62	802.45	828.33
NUSA TENGGARA TIMUR	1149.17	1146.28	1173.53	1129.46	1134.11	1134.74	1150.08	1160.53	991.88	1009.15	1000.29
KALIMANTAN BARAT	356.51	354.00	370.71	370.47	369.73	388.81	390.32	405.51	381.92	394.17	355.70
KALIMANTAN TENGAH	144.52	141.03	141.78	131.24	136.45	137.88	137.46	148.13	148.82	145.36	141.90
KALIMANTAN SELATAN	201.95	197.76	206.92	190.29	195.01	194.56	184.16	189.16	189.50	183.27	189.21
KALIMANTAN TIMUR	242.30	233.13	243.99	220.91	222.39	218.67	211.24	209.99	252.68	255.91	246.11
KALIMANTAN UTARA	50.58	49.49	52.70	48.61	49.59	48.56	47.03	40.93	-	-	-
SULAWESI UTARA	187.33	186.55	195.85	188.60	189.05	194.85	200.35	217.15	197.56	200.16	177.54
SULAWESI TENGAH	389.71	381.21	403.74	404.03	413.49	423.27	413.15	406.34	387.06	400.09	409.60
SULAWESI SELATAN	782.32	765.46	800.24	759.58	779.64	825.97	796.81	864.51	806.35	857.45	805.92
SULAWESI TENGGARA	314.74	323.26	317.32	299.97	301.85	313.16	327.29	345.02	314.09	326.71	304.25

GORONTALO	187.35	184.60	185.31	184.71	188.30	200.91	203.69	206.51	195.10	200.97	187.73
SULAWESI BARAT	169.26	165.99	159.05	151.87	152.83	149.47	146.90	153.21	154.69	154.20	160.55
MALUKU	296.66	294.97	322.40	319.51	317.84	320.42	331.79	327.78	307.02	322.51	338.89
MALUKU UTARA	82.13	81.18	87.52	87.18	81.93	78.28	76.40	72.65	84.79	85.82	88.30
PAPUA BARAT	222.36	221.29	215.22	207.59	213.67	212.86	223.60	225.54	225.46	234.23	223.24
PAPUA	936.32	944.49	912.23	900.95	915.22	910.42	914.87	898.21	864.11	1057.98	976.37
INDONESIA	26363.2 7	26503.6 5	27549.6 9	24785.8 7	25674.5 8	26582.9 9	27764.3 2	28513.5 7	27727.7 8	28553.9 3	28594.6 4

Sumber: BPS.go.id

Dapat di lihat pada tabel di atas bahwa jumlah masyarakat miskin yang ada di Indonesia mengalami kenaikan dan penurunan Jumlah penduduk miskin tertinggi secara nasional ada di tahun 2012 yaitu 28594.64 dan mengalami tren penurunan jumlah penduduk miskin secara nasional menjadi 27727.78 di tahun 2014 dan mengalami kenaikan di tahun berikutnya menjadi 28513.53 rang dan mengalami penurunan di tahun tahun berikutnya sampai tahun 2020 secara Nasional jumlah masyarakat miskin mengalami kenaikan Kembali menjadi 27549.69 ribu orang dan tren penurunan mengikuti di tahun – tahun setelahnya.

Jumlah penduduk miskin menurut daerah mengalami kenaikan dan penurunan yang fluktuatif juga. Di tahun- tahun awal 2012 terlihat di setiap daerah memiliki jumlah masyarakat miskin yang sangat tinggi, contohnya saja Sumatera Utara pada tahun 2012 terdapat 1378.45 ribu masyarakat miskin dan di tahun 2013 naik menjadi 1390.80 ribu orang, di tahun selanjutnya yaitu 2014 jumlah masyarakat miskin di Sumatera Utara mengalami penurunan, menjadi 1360.60 dan naik menjadi 1508.14 di tahun 2015 dari tahun 2016 jumlah penduduk miskin mengalami penurunan menjadi 1452.55 dan terus menurun hingga tahun 2019 menjadi 1260.50 dan jumlah penduduk miskin di Sumatera Utara mengalami kenaikan Kembali di tahun 2020 menjadi 1356.72 dan di tahun berikutnya terus mengalami penurunan jumlah masyarakat miskin yang ada di Sumatera Utara.

Tren kenaikan dan penurunan jumlah penduduk miskin berkat beberapa program pemerintah yang fokus untuk pengentasan kemiskinan baik itu secara nasional maupun daerah.

Jumlah masyarakat miskin juga dipengaruhi oleh jumlah penduduk yang tidak mendapat pekerjaan, belum mendapat pekerjaan Kembali ataupun belum bekerja karena data akan mencatat pendapatan mereka setiap bulannya.

4.1.2 Indeks Kedalaman Kemiskinan di Indonesia (*Poverty Gap Index*)

Indeks Kedalaman Kemiskinan merupakan ukuran rata – rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks maka semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Sebaliknya, semakin kecil nilai indeks maka semakin mendekati garis kemiskinan. Index kedalaman kemiskinan Indonesia pada tahun 2012 – 2022 dapat di lihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4. 3 Index Kedalaman Kemiskinan Menurut Provinsi dan Daerah

Provinsi	Index kedalaman Kemiskinan Menurut Provinsi dan Daerah (Persen)										
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
ACEH	3.07	3.20	3.14	3.11	3.06	2.92	2.80	2.58	2.85	2.95	2.90
SUMATERA UTARA	1.82	1.72	1.71	1.89	1.96	1.50	1.46	1.48	1.60	1.45	1.41
SUMATERA BARAT	1.24	1.27	0.75	1.26	1.12	0.99	0.96	0.78	0.99	0.96	0.86
RIAU	1.13	1.18	1.20	1.45	1.36	0.96	1.05	1.11	1.32	1.09	0.97
JAMBI	1.37	1.12	1.12	1.60	1.42	0.99	1.26	1.17	1.18	1.09	1.19
SUMATERA SELATAN	1.85	2.49	2.41	1.88	1.96	2.40	2.06	2.14	2.26	2.33	1.79
BENGKULU	3.05	3.24	2.85	3.63	2.79	2.76	2.35	2.01	2.51	2.45	2.17
LAMPUNG	2.53	2.23	2.30	2.36	1.92	2.11	2.06	1.99	2.11	1.85	1.70
KEP. BANGKA BELITUNG	0.66	0.62	0.60	0.90	0.75	0.57	0.73	0.57	0.77	0.56	0.43
KEP. RIAU	0.85	1.02	0.74	0.86	0.71	1.18	0.59	0.90	1.21	0.95	0.89
DKI JAKARTA	0.56	0.39	0.60	0.27	0.43	0.61	0.50	0.40	0.67	0.75	0.68
JAWA BARAT	1.62	1.65	1.39	1.67	1.28	1.39	1.13	1.06	1.28	1.29	1.24
JAWA TENGAH	2.39	2.37	2.09	2.17	2.12	2.12	1.63	1.43	1.84	1.94	1.75
DI YOGYAKARTA	2.89	2.13	2.35	2.32	1.75	2.09	1.65	1.54	2.08	2.06	1.53
JAWA TIMUR	1.93	2.07	1.86	2.13	1.95	2.09	2.07	1.61	1.97	1.58	1.62

Provinsi	Index kedalaman Kemiskinan Menurut Provinsi dan Daerah (Persen)										
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
BANTEN	0.95	1.02	0.79	0.90	0.76	0.78	0.91	0.80	1.14	1.20	0.79
BALI	0.39	0.70	0.86	1.13	0.53	0.55	0.52	0.50	0.61	0.76	0.56
NUSA TENGGARA BARAT	3.20	2.72	2.92	2.72	2.63	2.63	2.38	2.12	2.74	2.50	2.57
NUSA TENGGARA TIMUR	3.47	3.04	3.25	4.62	3.83	4.16	4.55	4.13	4.16	4.79	3.74
KALIMANTAN BARAT	1.24	1.30	1.26	1.09	1.13	1.02	1.21	1.02	1.13	1.02	1.10
KALIMANTAN TENGAH	1.08	1.02	0.97	1.02	0.65	0.84	0.82	0.76	0.88	0.75	0.66
KALIMANTAN SELATAN	0.76	0.61	0.65	0.98	0.69	0.74	0.75	0.66	0.77	0.55	0.63
KALIMANTAN TIMUR	0.99	1.25	0.79	0.69	0.81	0.87	0.76	0.99	1.03	1.04	0.78
KALIMANTAN UTARA	1.18	-	-	0.70	0.88	1.32	0.91	1.12	0.86	0.89	0.60
SULAWESI UTARA	2.82	1.16	1.28	1.54	1.38	1.30	1.31	0.89	1.23	1.04	1.11
SULAWESI TENGAH	1.68	2.28	2.11	2.37	2.28	2.80	2.28	3.19	2.78	2.24	2.15
SULAWESI SELATAN	1.92	1.65	1.41	1.58	1.53	1.92	1.68	1.63	1.65	1.40	1.50
SULAWESI TENGGARA	3.21	1.83	2.09	2.05	1.98	2.09	2.09	2.23	2.23	2.40	2.05
GORONTALO	1.74	3.22	3.13	3.08	2.79	3.31	3.02	2.61	2.86	2.92	2.85
SULAWESI BARAT	4.38	1.30	1.94	1.54	1.85	1.81	1.56	1.44	1.95	1.90	2.09
MALUKU	0.85	3.52	4.11	4.79	3.76	3.41	3.31	3.74	3.76	3.49	3.08
MALUKU UTARA	5.71	0.89	1.16	1.15	0.92	0.81	1.25	1.08	1.09	0.94	1.23
PAPUA BARAT	7.35	5.89	5.92	5.29	6.28	7.41	6.50	5.64	6.07	5.84	5.25
PAPUA	1.90	6.56	6.42	0.85	7.44	6.25	5.91	6.07	6.90	6.31	7.28
INDONESIA	1.90	1.89	1.75	1.84	1.74	1.79	1.63	1.50	1.75	1.67	1.56

Sumber: BPS.go.id

Dapat di lihat pada data di atas bahwa index kedalaman kemiskinan di Indonesia secara nasional mengalami penurunan di tahun 2013 menjadi 1.89 dari 1.90 di tahun 2012 dan di tahun 2014 juga masih mengalami penurunan index dengan nilai 1.75 dan naik lagi di tahun 2015 menjadi 1.84 di tahun setelahnya yaitu 2016 terus mengalami penurunan menjadi 1.74 dan terus turun menjadi 1.50 di tahun 2019 dan Kembali naik menjadi 1.75 selama masa pandemic covid di

tahun 2020 dan tahun setelahnya 2021 sampai 2022 mengalami penurunan ketimpangan penduduk miskin yang dimana program pemerintah dalam meanggulangi kedalaman kemiskinan baik itu sebelum ,saat, dan setelah pandemic covid berhasil menurunkan angka index kedalaman kemiskinan secara nasional.

4.1.3 Garis Kemiskinan di Indonesia (GK)

Garis kemiskinan (GK) mencerminkan nilai rupiah pengeluaran minimum yang diperlukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya selama sebulan, baik kebutuhan makanan maupun kebutuhan non-makanan.

Tabel 4. 4 Garis Kemsikinan Menurut Provinsi dan Daerah

Provinsi	Garis Kemiskinan (Rupiah/Kapita/Bulan) Menurut Provinsi dan Daerah									
	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
ACEH	646232.00	577270.00	543685.00	517900.00	496752.00	479872.00	445488.00	420324.00	396939.00	374261.00
SUMATERA UTARA	615227.00	556437.00	520529.00	506538.00	465790.00	438894.00	413835.00	379898.00	349372.00	330517.00
SUMATERA BARAT	668643.00	592302.00	565531.00	551366.00	507557.00	475365.00	454674.00	423339.00	390862.00	360768.00
RIAU	686945.00	618552.00	572856.00	546515.00	499402.00	474626.00	439542.00	417768.00	386606.00	366057.00
JAMBI	684555.00	598178.00	552498.00	524643.00	492364.00	465233.00	448615.00	423855.00	390931.00	369835.00
SUMATERA SELATAN	548455.00	491658.00	470800.00	461122.00	441049.00	417828.00	400159.00	378739.00	346238.00	328335.00
BENGKULU	686223.00	624573.00	576921.00	568783.00	530655.00	490475.00	458435.00	425642.00	378881.00	358294.00
LAMPUNG	595992.00	535133.00	504330.00	477071.00	453053.00	427072.00	398378.00	386728.00	350024.00	326468.00
KEP. BANGKA BELITUNG	836425.00	753768.00	716460.00	705147.00	656148.00	595031.00	553681.00	516835.00	458055.00	416935.00
KEP. RIAU	733248.00	655506.00	619461.00	605210.00	570910.00	540062.00	505980.00	485496.00	431127.00	405578.00
DKI JAKARTA	773370.00	715052.00	683339.00	663355.00	607778.00	578247.00	520690.00	503038.00	459560.00	434322.00
JAWA BARAT	480785.00	438642.00	416699.00	402254.00	372260.00	354866.00	332145.00	318297.00	294700.00	281189.00
JAWA TENGAH	469623.00	427099.00	404451.00	387646.00	359526.00	339692.00	322799.00	308163.00	286014.00	268397.00
DI YOGYAKAR	573915.00	517353.00	488461.00	472666.00	432018.00	413631.00	370510.00	359470.00	333561.00	317925.00

TA										
JAWA TIMUR	499769. 00	459440. 00	428593. 00	418570. 00	399334. 00	372585. 00	329241. 00	314320. 00	293391. 00	278653. 00
BANTEN	617527. 00	567000. 00	532096. 00	507198. 00	468572. 00	421137. 00	382903. 00	365672. 00	324902. 00	300109. 00
BALI	530820. 00	474322. 00	451634. 00	424292. 00	393989. 00	371118. 00	357427. 00	341554. 00	316235. 00	298449. 00
NUSA TENGGARA BARAT	501586. 00	452855. 00	419924. 00	405087. 00	384479. 00	363697. 00	346581. 00	335284. 00	315470. 00	299886. 00
NUSA TENGGARA TIMUR	594016. 00	531194. 00	496191. 00	467314. 00	421855. 00	409382. 00	389661. 00	374355. 00	340459. 00	321163. 00
KALIMANTA N BARAT	592432. 00	540474. 00	504445. 00	477154. 00	434470. 00	401588. 00	366477. 00	347516. 00	307789. 00	280423. 00
KALIMANTA N TENGAH	557200. 00	499553. 00	478873. 00	443674. 00	403547. 00	378311. 00	357224. 00	339239. 00	316683. 00	299970. 00
KALIMANTA N SELATAN	588472. 00	536041. 00	508852. 00	483766. 00	447876. 00	434791. 00	399162. 00	371793. 00	336782. 00	313691. 00
KALIMANTA N TIMUR	772112. 00	706886. 00	675399. 00	643047. 00	601619. 00	564801. 00	535137. 00	504551. 00	459004. 00	435313. 00
KALIMANTA N UTARA	834774. 00	761840. 00	723478. 00	699082. 00	647330. 00	595802. 00	539499. 00	505262. 00	-	-
SULAWESI UTARA	460738. 00	423427. 00	402502. 00	377597. 00	352765. 00	331931. 00	314004. 00	302378. 00	269212. 00	255566. 00
SULAWESI TENGAH	565994. 00	516374. 00	492758. 00	481436. 00	437697. 00	430728. 00	399413. 00	376496. 00	349978. 00	324072. 00
SULAWESI SELATAN	443717. 00	403751. 00	375463. 00	354770. 00	327725. 00	303834. 00	286669. 00	274140. 00	246416. 00	235488. 00
SULAWESI TENGGARA	451180. 00	410332. 00	383839. 00	356235. 00	324276. 00	308624. 00	294286. 00	282230. 00	254015. 00	240089. 00
GORONTAL O	436651. 00	401219. 00	375740. 00	353074. 00	327369. 00	312931. 00	287156. 00	274581. 00	250157. 00	237600. 00
SULAWESI BARAT	428974. 00	382292. 00	356967. 00	340649. 00	326426. 00	318376. 00	280117. 00	269080. 00	245959. 00	230973. 00
MALUKU	682707. 00	613316. 00	584061. 00	545855. 00	484316. 00	461552. 00	424788. 00	404929. 00	369738. 00	358068. 00
MALUKU UTARA	573792. 00	533231. 00	494703. 00	484064. 00	449693. 00	413797. 00	405368. 00	378538. 00	339561. 00	317176. 00
PAPUA BARAT	741776. 00	683148. 00	635539. 00	618279. 00	583530. 00	523381. 00	508262. 00	478699. 00	440241. 00	414900. 00
PAPUA	723346. 00	643071. 00	622346. 00	603458. 00	566903. 00	508403. 00	479294. 00	445057. 00	408419. 00	387789. 00
INDONESIA	552349. 00	502730. 00	475477. 00	458380. 00	425770. 00	400995. 00	372114. 00	356378. 00	326853. 00	275779. 00

Sumber: BPS.go.id

Menurut data BPS, Garis kemiskinan merupakan suatu nilai pengeluaran minimum kebutuhan makanan yang harus dipenuhi agar tidak dikategorikan

miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.

Dapat di lihat Pada tabel di atas garis kemiskinan rupiah/per kapita masyarakat Indonesia setiap tahun mengalami kenaikan mulai dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2022 karena di akibatkan kenaikan harga bahan makanan dan non-makanan, bahan bakar dan komoditas pokok lainnya yang berimbas kepada pengeluaran setiap bulan rumah tangga yang ada di Indonesia. Kenaikan harga eceran komoditas pokok ini tentunya berpengaruh terhadap jumlah pengeluaran masyarakat miskin untuk memenuhi kebutuhan makanan mereka dan ini erat kaitannya dengan garis kemiskinan.

4.1.4 Indeks Keparahan Kemiskinan

Index keparahan kemiskinan (*Poverty Severity Index*) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

Tabel 4. 5 Indeks Keparahan Kemiskinan di Indonesia Menurut Daerah

Provinsi	Indeks Keparahan Kemiskinan Menurut Provinsi dan Daerah (Persen)										
	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
ACEH	0.61	0.75	0.71	0.66	0.75	0.81	1.00	0.83	0.72	0.85	0.99
SUMATERA UTARA	0.34	0.38	0.39	0.31	0.41	0.44	0.50	0.42	0.37	0.37	0.34
SUMATERA BARAT	0.16	0.24	0.20	0.21	0.24	0.23	0.24	0.21	0.22	0.21	0.29
RIAU	0.27	0.24	0.28	0.27	0.30	0.36	0.34	0.36	0.21	0.30	0.28
JAMBI	0.26	0.30	0.25	0.30	0.32	0.29	0.37	0.35	0.23	0.19	0.29
SUMATERA SELATAN	0.45	0.54	0.48	0.51	0.60	0.60	0.43	0.64	0.59	0.46	0.48
BENGKULU	0.58	0.62	0.56	0.58	0.61	0.75	0.77	0.97	0.70	0.74	1.40
LAMPUNG	0.41	0.42	0.41	0.44	0.48	0.51	0.70	0.59	0.53	0.52	0.51
KEP. BANGKA BELITUNG	0.13	0.11	0.13	0.10	0.14	0.08	0.15	0.14	0.16	0.11	0.08
KEP. RIAU	0.25	0.28	0.28	0.12	0.24	0.23	0.20	0.25	0.27	0.15	0.23
DKI JAKARTA	0.19	0.14	0.11	0.11	0.11	0.10	0.08	0.10	0.07	0.17	0.13
JAWA BARAT	0.33	0.38	0.22	0.24	0.34	0.37	0.37	0.43	0.38	0.30	0.41

JAWA TENGAH	0.42	0.45	0.34	0.30	0.45	0.57	0.63	0.65	0.56	0.54	0.53
DI YOGYAKARTA	0.51	0.65	0.46	0.38	0.50	0.55	0.59	0.83	0.48	0.55	1.14
JAWA TIMUR	0.38	0.43	0.43	0.45	0.50	0.45	0.47	0.52	0.44	0.43	0.38
BANTEN	0.27	0.26	0.23	0.18	0.20	0.19	0.17	0.23	0.19	0.16	0.15
BALI	0.13	0.15	0.10	0.11	0.18	0.16	0.09	0.14	0.07	0.10	0.12
NUSA TENGGARA BARAT	0.67	0.49	0.61	0.48	0.74	0.85	0.77	0.91	0.61	0.61	1.27
NUSA TENGGARA TIMUR	0.93	1.05	1.05	1.13	1.03	1.17	1.30	1.07	0.83	0.88	0.82
KALIMANTAN BARAT	0.24	0.23	0.23	0.26	0.28	0.29	0.32	0.32	0.18	0.28	0.20
KALIMANTAN TENGAH	0.27	0.15	0.20	0.14	0.21	0.21	0.20	0.21	0.17	0.19	0.26
KALIMANTAN SELATAN	0.13	0.13	0.16	0.15	0.16	0.16	0.16	0.18	0.14	0.11	0.13
KALIMANTAN TIMUR	0.23	0.34	0.24	0.21	0.20	0.21	0.28	0.22	0.28	0.19	0.28
KALIMANTAN UTARA	0.19	0.18	0.17	0.31	0.27	0.34	0.17	0.18	-	-	-
SULAWESI UTARA	0.26	0.28	0.25	0.25	0.30	0.35	0.46	0.33	0.26	0.26	0.23
SULAWESI TENGAH	0.68	0.64	0.77	0.63	0.74	0.72	0.73	0.66	0.52	1.04	0.66
SULAWESI SELATAN	0.32	0.37	0.39	0.34	0.38	0.46	0.55	0.45	0.37	0.48	0.41
SULAWESI TENGGARA	0.42	0.56	0.53	0.59	0.52	0.44	0.90	0.79	0.45	0.56	0.61
GORONTALO	0.85	0.72	0.65	0.63	0.75	1.01	1.47	1.24	0.90	0.90	0.71
SULAWESI BARAT	0.58	0.44	0.48	0.42	0.44	0.48	0.48	0.46	0.25	0.52	0.41
MALUKU	0.80	1.05	1.01	0.88	0.99	0.99	0.99	0.92	1.11	1.16	1.36
MALUKU UTARA	0.20	0.21	0.21	0.20	0.19	0.20	0.18	0.13	0.26	0.14	0.36
PAPUA BARAT	1.60	1.96	2.06	1.97	2.38	2.45	2.82	2.33	2.05	2.16	2.65
PAPUA	2.10	1.69	2.08	2.60	2.28	2.82	4.19	3.78	2.30	2.21	2.79
INDONESIA	0.39	0.42	0.38	0.37	0.44	0.48	0.53	0.53	0.43	0.43	0.47

Sumber: BPS.go.id

Dapat di lihat dari data di atas bahwa Indeks Keparahan kemiskinan di Indonesia cenderung menurun setiap tahun namun ada juga kenaikan presentasi Indeks Keparahan kemiskinan yang ada seperti di tahun 2015-2016 merupakan yang tertinggi selama rentang waktu 2012-2022. Di beberapa daerah yang padat seperti Provinsi Sumatera Utara juga mengalami trend naik dan turun yang fluktuatif.

4.2 Analisis Perkembangan Kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2012-2022.

4.2.1 Tingkat Kemiskinan Provinsi Sumatera Utara

Kemiskinan adalah salah satu permasalahan serius yang dihadapi oleh negara berkembang seperti Indonesia kemiskinan timbul akibat dari keterbatasan

orang dalam memenuhi kebutuhannya. Masalah kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara menjadi suatu masalah serius yang harus dihadapi. Kemiskinan merupakan permasalahan multidimesi Kompleks dan mencakup berbagai aspek. Akibat kompleksitas yang dimilikinya, maka penanggulangan kemiskinan memerlukan program yang terintegrasi dan tidak tumpang tindih. Pengentasan kemiskinan merupakan tantangan global terbesar yang dihadapi dunia dan menjadi syarat mutlak bagi pembangunan berkelanjutan. Khususnya di Sumatera Utara Jumlah Penduduk Miskin dari Tahun 2012 – 2022 dapat di lihat pada data di bawah ini.

Tabel 4.6 Jumlah Penduduk Miskin dari Tahun 2012 – 2022

Provinsi	Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Sumatera Utara
2022	1262.09
2021	1273.07
2020	1356.72
2019	1260.50
2018	1291.99
2017	1326.57
2016	1452.55
2015	1508.14
2014	1360.60
2013	1390.80
2012	1378.45

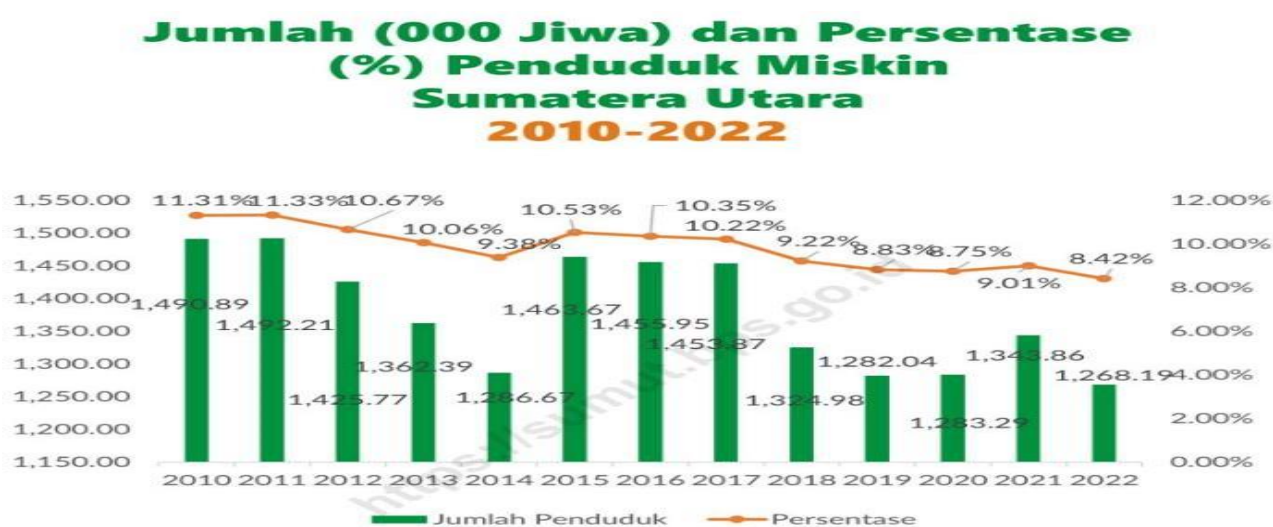
Sumber: BPS Sumatera Utara

Dapat di lihat pada data di atas bahwa Jumlah Penduduk miskin di Provinsi Sumatera Utara mencapai 1378.45 di tahun 2012 dan semakin naik di tahun berikutnya menjadi 1390.80 orang dan turun di tahun 2014 menjadi 1360.60 dan di tahun 2015 melonjak Kembali menjadi 1508.14 lalu di tahun berikutnya tren jumlah penduduk miskin di provinsi sumatera utara cenderung turun setiap tahunnya dan melonjak naik Kembali di tahun 2020 menjadi 1356.75 menjadi yang tertinggi di antara tahun sebelumnya yaitu tahun 2018-2019. Di tahun 2021 sampai tahun 2022 jumlah penduduk miskin mengalami penurunan. Ada beberapa

faktor yang ,menyebabkan turunnya jumlah masyarakat miskin di tahun tersebut antara lain program nasional tentang pengentasan kemiskinan melalui program PKH, dan KIP juga bantuan social lainnya yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Sumatera Utara.

Berdasarkan presentase Jumlah Penduduk Miskin Yang ada di Sumatera Utara, cenderung Mengalami penurunan setiap tahunnya kecuali tahun 2014 ke tahun 2015 yang mengalami kenaikan daripada tahun sebelumnya. Di tahun selanjutnya lagi-lagi terus mengalami penurunan secara konstan dari tahun sebelumnya sampai pada tahun 2022 . Jumlah Penduduk Miskin berdasarkan presentase di sumatera utara dapat di lihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 4.1 Presentase Penduduk Miskin Provinsi Sumatera Utara



Perkembangan tingkat kemiskinan di Sumatera Utara periode tahun 2012 – 2022 sesuai pengamatan peneliti ditunjukkan pada Gambar. 4.3 tingkat kemiskinan mencakup besaran jumlah dan presentase dari penduduk miskin. Pada periode tersebut perkembangan tingkat kemiskinan di Sumatera Utara relative berfluktuasi dari tahun ke tahun. Perkembangan penduduk miskin di Sumatera

Utara selama periode tahun 2012 – 2022 secara konsisten mengalami penurunan. Penurunan kemiskinan di daerah-daerah tidak terlepas dari program nasional seperti bantuan Program keluarga Harapan (PKH), Bantuan Operasional Sekolah, bantuan Siswa Miskin, Kartu Prakerja, Jamkesmas, Raskin dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) dan Program program Lainnya.

4.2.2 Indeks Kedalaman Kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara (*Poverty Gap Index*)

Indeks Kedalaman Kemiskinan merupakan ukuran rata – rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks maka semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Sebaliknya, semakin kecil nilai indeks maka semakin mendekati garis kemiskinan. Index kedalaman kemiskinan di Sumatera Utara pada tahun 2012 – 2022 dapat di lihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4. 7 Index Kedalaman Kemiskinan di Sumatera Utara (Persen)

Provinsi	Index Kedalaman Kemiskinan Provinsi Sumatera Utara (Persen)
2012	1.82
2013	1.72
2014	1.71
2015	1.89
2016	1.96
2017	1.50
2018	1.46
2019	1.48
2020	1.60
2021	1.45
2022	1.41

Sumber: BPS.go.id

Dapat di lihat pada data di atas bahwa indeks kedalaman kemiskinan masyarakat di Sumatera Utara mengalami penurunan presentase indeks yang artinya setiap tahun masyarakat miskin mendektai pengeluaran rata-rata yang ada

dan ditetapkan. Pada tahun 2012 indeks kedalaman kemiskinan ada di angka 1.82 persen dan terus mengalami pergerakan yang fluktuatif hingga di tahun 2016 mencapai angka indeks tertinggi, namun setelah itu angkanya terus menerus turun hingga sampai di tahun 2022 menjadi angka terendah dalam kurun waktu 2012 – 2022 yaitu 1.41 persen.

4.2.3 Garis Kemiskinan di Sumatera Utara

Garis kemiskinan (GK) mencerminkan nilai rupiah pengeluaran minimum yang diperlukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya selama sebulan, baik kebutuhan makanan maupun kebutuhan non-makanan.

Tabel 4.8 Garis Kemiskinan Provinsi Sumatera Utara

Tahun	Garis Kemsikinan (Rupiah/kapita/Bulan) Provinsi Sumatera Utara
2022	615227.00
2021	556437.00
2020	520529.00
2019	506538.00
2018	465790.00
2017	438894.00
2016	413835.00
2015	379898.00
2014	349372.00
2013	330517.00

Sumber: BPS.go.id

Dapat di lihat pada data di atas bahwa garis kemiskinan di setiap tahunnya mengalami kenaikan karena terjadinya kenaikan harga pokok barang kebutuhan masyarakat yang biasa dibeli untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Di tahun 2013 garis kemiskinan ada di angka 3305517 rupiah perbulan dan terus menerus

naik setiap tahunnya tabpa ada mengalami penurunan sama sekali, hingga akhirnya di tahun 2022 mencapai angka 615227 rupiah perbulan.

4.2.3 Indeks Keparahan Kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara

Index keparahan kemiskinan (*Poverty Severity Index*) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

Tabel 4.9 Indeks Keparahan Kemiskinan Provinsi Sumatera Utara

Tahun	Indeks Keparahan Kemiskinan Provinsi Sumatera Utara (Persen)
2022	0.34
2021	0.38
2020	0.39
2019	0.31
2018	0.41
2017	0.44
2016	0.50
2015	0.42
2014	0.37
2013	0.37
2012	0.34

Sumber: BPS.go.id

Dapat di lihat pada data di atas bahwa ketimpangan pengeluaran antara penduduk miskin yang ada di provinsi Sumatera Utara dalam persen. Setiap tahunnya mengalami perubahan naik dan turun, yang artinya terdapat ketimpangan pengeliuaran antara penduduk miskin yang ada di Sumatera Utara.

4.5 Estimasi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara

1. Jumlah Penduduk

Proyeksi jumlah penduduk provinsi Sumatera Utara bisa dibilang meningkat setiap tahunnya dimulai tahun 2012 sampai tahun 2022 dapat di lihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.10 Proyeksi Penduduk provinsi Sumatera Utara Tahun 2012-2022

Tahun	Jumlah Penduduk Provinsi Sumatera Utara
2012	13.408.202
2013	13.590.250
2014	13.766.851
2015	13.937.797
2016	14.102.911
2017	14.262.147
2018	14.415.391
2019	14.562.549
2020	14.703.532
2021	14.936.148
2022	15.115.206

Sumber: BPS Sumatera Utara

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa Penduduk provinsi sumatera utara bertambah banyak di mulai tahun 2012 sebanyak 13.408.202 jiwa menjadi 14.102.911 pada tahun 2014 dan terus bertambah hingga mencapai angka 14.936.148 jiwa pada tahun 2021 dan menjadi 15.115.260 pada tahun 2022. Dapat dikatakan bahwa kenaikan jumlah penduduk di seluruh Kabupaten/kota di provinsi sumatera utara sangat signifikan, penambahan jumlah penduduk memiliki baik atau buruk sesuai dengan penanganan pemerintah daerah yang ada, banyaknya jumlah penduduk juga dapat menjadi masalah bagi perkembangan

suatu daerah ataupun menjadi pendongkrak kemajuan suatu daerah, misalnya saja kemiskinan, pengangguran dan masih banyak masalah sosial kependudukan lainnya sehingga dapat menjadi tantangan tersendiri bagi suatu daerah. Isi positifnya dengan banyaknya jumlah penduduk adalah bonus demografi dan tenaga kerja yang terlatih sehingga dapat menjadi pendorong kemajuan suatu daerah.

2. Indeks pembangunan Manusia (IPM)

Indeks pembangunan manusia atau biasa disingkat dengan IPM merupakan capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur Panjang dan sehat, pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian yang sangat luas karena terkait banyak factor. Untuk mengukur dimensi Kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir,. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indicator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah, Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indicator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran perkapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak. Capaian IPM provinsi sumatera utara dari tahun 2012 sampai dengan 2022 dapat di lihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.11 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2012 - 2022

Tahun	Indeks Pembangunan Manusia
2012	67.74
2013	68.36
2014	68.87
2015	69.51
2016	70.00
2017	70.57
2018	71.18
2019	71.74
2020	71.77
2021	72.00
2022	72.71

Sumber: BPS Sumatera Utara

Dapat di lihat pada tabel di atas bahwa setiap tahunnya terjadi kenaikan persentase Indeks Pembangunan Manusia, yang artinya semua komponen penyusun IPM setiap tahunnya Mengalami kenaikan. Dari sisi Pendidikan anak berusia 7 tahun memiliki harapan dapat menikmati Pendidikan formal selama 13.31 tahun yang artinya setara dengan menamatkan Pendidikan hingga setingkat Diploma. Dari sisi Kesehatan bayi yang lahir memiliki harapan hidup hingga 69,91 tahun.

3. Pendapatan Domestik Regional Bruto

Pengertian Domestic regional bruto adalah transaksi ekonomi yang akan di hitung dan terjadi di wilayah domestic suatu daerah tanpa memperhatikan apakah transaksi dilakukan oleh masyarakat dari daerah tersebut ataupun masyarakat lain. Data Pendapatan Domestik Regional Bruto Provinsi Sumatera Utara dapat di lihat di bawah ini;

Tabel 4.12 PDRB perkapita Provinsi Sumatera Utara

Tahun	Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita
2012	28036879.18
2013	29343040.07
2014	30477071.97
2015	31637413.89
2016	32885087.69
2017	34183579.22
2018	35570497.00
2019	36853594.00
2020	36175157.00
2021	36666202.00
2022	37943827.31

Sumber: BPS Sumatera Utara

PDRB provinsi sumatera utara dapat dilihat pada tabel di atas terlihat fluktuatif dan dinamis bahkan dikarenakan terjadi pandemi covid-19 yang menyebabkan berbagai layanan lumpuh termasuk jual beli dan perdagangan, sehingga berdampak pada PDRB provinsi. Tetapi di tahun selanjutnya transaksi berangsur – angsur membaik dan mulai Kembali normal hingga mencapai transaksi sebelum diterpa pandemic covid.

4. Pengangguran

Pengangguran adalah istilah untuk orang yang tidak punya pekerjaan sedang mencari pekerjaan, atau sedang memepersiapkan pekerjaan. Umumnya penyebab pengangguran adalah ketidakseimbangan laju pertumbuhan penduduk dengan lapangan kerja yang tersedia. Artinya jumlah tenaga kerja lebih banyak dari jumlah lapangan kerja. Jumlah pengangguran yang ada di provinsi Sumatera Utara dapat di lihat pada table di bawah ini;

Tabel 4.13 Jumlah pengangguran Provinsi Sumatera Utara Tahun 2012 - 2022

Tahun	Jumlah Pengangguran Provinsi Sumatera Utara
2012	402.125
2013	379.982
2014	412.202
2015	390.712
2016	428.794
2017	385.782
2018	377.288
2019	396.027
2020	382.438
2021	507.805
2022	475.156

Sumber: BPS Sumatera Utara

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah penganggura yang ada di Provinsi Sumatera Utara naik dan turun secara fluktuatif dan melonjak di tahun 2021 dengan jumlah sebanyak 507.805 akibat banyaknya PHK setelah pandemic yang menyebabkan perusahaan berguguran dan ada perusahaan yang gulung tikar.

4.6 Hasil Analisis Regresi

Berdasarkan hasil regresi yang telah dilakukan dengan variable PBRB Perkapita, IPM dan Pengangguran diperoleh hasil berikut ini.

Tabel 4. 14 Hasil Regresi Linier Berganda

Dependent Variable: K Method: Least Squares Date: 09/03/23 Time: 17:50 Sample: 2007 2022 Included observations: 16				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
TPT	0.680896	0.139190	4.891846	0.0004
PDRBKAP	0.296723	0.089841	3.302764	0.0063
IPM	-0.042827	0.077486	-0.552708	0.5906
C	7.461861	5.273536	1.414963	0.1825
R-squared	0.863057	Mean dependent var	10.37125	
Adjusted R-squared	0.828821	S.D. dependent var	1.440879	
S.E. of regression	0.596146	Akaike info criterion	2.015655	
Sum squared resid	4.264678	Schwarz criterion	2.208802	
Log likelihood	-12.12524	Hannan-Quinn criter.	2.025546	
F-statistic	25.20922	Durbin-Watson stat	1.133194	
Prob(F-statistic)	0.000018			

Sumber : E-views dan diolah

Dari hasil regresi linier berganda di atas dapat diketahui bahwasannya ke empat variabel bebas telah bersama-sama mempengaruhi variabel terikat dengan error term di bawah 5% dengan nilai R-squared yang tinggi sebesar 186,3% yang artinya kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat sangat kuat.

4.6.1 Penaksiran

1. Korelasi (R)

	K	TPT	PDRBKAP	IPM
K	1.000000	0.837219	0.750997	0.031468
TPT	0.837219	1.000000	0.479556	0.261261
PDRBKAP	0.750997	0.479556	1.000000	-0.169578
IPM	0.031468	0.261261	-0.169578	1.000000

Dari hasil regres pada model didapat nilai korelasi variable K terhadap TPT sebesar 0.837, Variabel K terhadap PDRBKap yaitu 0.750 dan variable K terhadap IPM sebesar 0.031.

Suatu variabel bebas dikatakan memiliki kekuatan hubungan yang positif terhadap variabel terikat apabila memiliki nilai koefisien bertanda positif dan bernilai di atas *error term* = 5% dan dikatakan signifikan apabila nilai *probabilitynya* dari variabel bebas tersebut lebih kecil dari 5%.

2. Koefisien determinasi (R^2)

Koefisien Determinasi (*R square*) menunjukkan proporsi presentase variabel total dalam menjelaskan variabel terikat (dependen) yang dijelaskan oleh variabel bebas (independen) secara bersama-sama. Berdasarkan hasil dari model estimasi di atas yaitu variabel-variabel yang mempengaruhi tingkat kemiskinan dapat dilihat nilai R^2 sebesar

0.863 artinya secara bersama-sama semua variabel bebas memberikan variasi penjelasan terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara dengan sangat baik.

4.6.2 Interpretasi Hasil

Dari data yang telah diperoleh, maka model regresinya adalah sebagai berikut.

$$K = \beta_0 + \beta_1 \text{TPT} + \beta_2 \text{PDRB Kap} + \beta_3 \text{IPM} + e$$

Maka interpretasi hasil model pertama adalah sebagai berikut:

$$K = 7.461861 + (0.680896) \text{TPT} + (0.296723) \text{PDRB_KAP} + (-0.042827) \text{IPM} + e$$

Dari hasil estimasi yang diperoleh sebuah interpretasi model regresi linier berganda adalah sebagai berikut

- a. Variabel Penduduk Miskin (TPT) mempunyai pengaruh positif terhadap kemiskinan, sebab koefisien $\beta_1 = 0.680896$ artinya apabila Jumlah Penduduk dinaikkan sebanyak 1 maka akan meningkatkan tingkat kemiskinan sebanyak 68%.
- b. Variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB_KAP) mempunyai pengaruh yang positif terhadap kemiskinan, sebab koefisien $\beta_2 = 0.296723$ artinya apabila Produk Domestik Regional Bruto Meningkat Sebanyak 1 maka akan meningkatkan kemiskinan sebanyak 0.296723.
- c. Variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mempunyai pengaruh yang negative terhadap kemiskinan, sebab koefisien $\beta_3 = 0.042827$ artinya apabila Indeks Pembangunan manusia Naik

sebesar 1 Poin maka akan menurunkan tingkat kemiskinan yang ada. Hal ini sejalan dengan teori bahwa semakin tinggi tingkat IPM maka akan menurunkan tingkat kemiskinan.

4.6.4 Uji Statistik

1. Uji Signifikan Parameter (Uji-t)

Uji statistic t atau uji pasial pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas secara individual dalam menerangkan variasi variabel terikat (Gujarati, 2012). Uji-t statistic dilakukan bertujuan untuk menunjukkan seberapa besar pengaruh variabel independen secara individual menjelaskan variasi variabel dependen. Regresi pengaruh variabel TPT, PDRBKAP, IPM, dengan uji regresi linier berganda terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara Adapun dalam penelitian ini diketahui nilai *t tabel* sebesar 1.99897. Dari tabel regresi di atas 3 variabel termasuk dalam kriteria terima H_0 yaitu variabel PDRB, IPM dan PGN dan berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Variabel lainnya tolak H_0 yaitu JMP tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Y.

2. Uji Signifikan Simultan (Uji-F)

Uji-F statistic bertujuan untuk pengujian signifikan semua variabel independen secara bersama-sama terhadap nilai variabel dependen. Dari hasil regresi pada model TPT, PDRB KAP, IPM terhadap kemiskinan di provinsi sumatera utara maka nilai *Ftabel* dengan $\alpha = 5\%$ maka diperoleh *Ftabel* sebesar 2.76 sedangkan *Fhitung* 0.863057. hal ini menunjukkan bahwa variabel independent secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Kesimpulan dapat diambil karena hipotesis

yang sudah ditetapkan oleh peneliti, dan nilai *Fsimultan* pada penelitian ini masih masuk dalam kriteria terima Hipotesis atau terima H_0 .

2.6.1. Uji 1.99897Asumsi Klasik

1. Uji Multikolinieritas

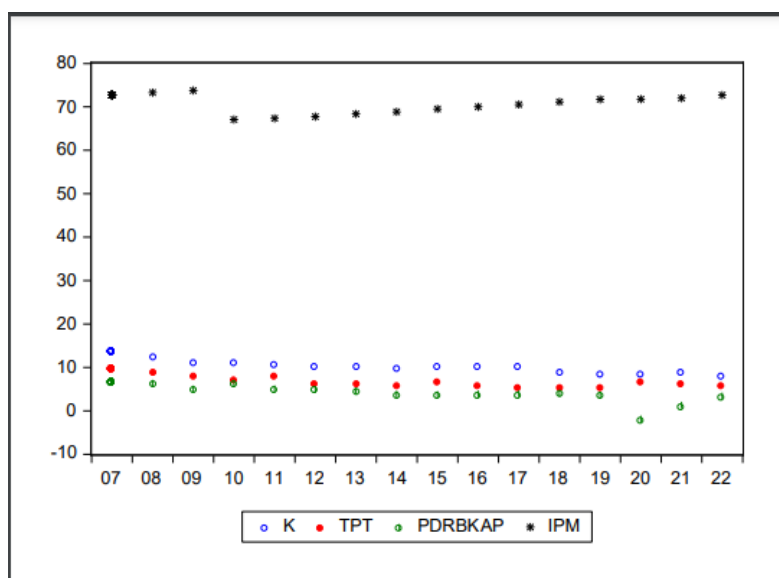
Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi yang pertama ataupun kedua terdapat korelasi antar variabel bebas (independen). Syarat model regresi yang baik adalah terbebas dari multikolinieritas, dan dapat dilihat dari hasil Analisa model tidak ada ditemukan multikolinieritas.

2. Uji heterokedastisitas

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey				
F-statistic	2.772895	Prob. F(4,6)	0.1275	
Obs*R-squared	7.138449	Prob. Chi-Square(4)	0.1288	
Scaled explained SS	0.658577	Prob. Chi-Square(4)	0.9563	
Test Equation: Dependent Variable: RESID^2 Method: Least Squares Date: 08/28/23 Time: 08:33 Sample: 2012 2022 Included observations: 11				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	5.22E-25	6.10E-23	0.008567	0.9934
LOG(PDRB_KAP)	-3.46E-25	6.31E-25	-0.548524	0.6031
LOG(JMP)	-2.39E-24	1.13E-24	-2.110978	0.0793
LOG(IPM)	4.05E-24	4.25E-24	0.951957	0.3779
LOG(PGN)	-1.24E-24	5.23E-25	-2.368043	0.0557
R-squared	0.648950	Mean dependent var	2.30E-25	
Adjusted R-squared	0.414917	S.D. dependent var	1.90E-25	
S.E. of regression	1.45E-25	Sum squared resid	1.27E-49	
F-statistic	2.772895	Durbin-Watson stat	1.820130	
Prob(F-statistic)	0.127487			

Bertujuan untuk menguji apakah dalam model terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika varian dari residual satu pengamatan yang lain tetap, maka disebut terjadi heterokedastisitas. Untuk melihat ada atau tidaknya heterokedastisitas, dapat dilakukan dengan melihat grafik scatterplot antara nilai prediksi variabel dependen dengan residualnya. Dasar analisis heterokedastisitas sebagai berikut:

Gambar 4. 2 Scatter Plot



Sumber: E-views dan diolah

Gambar di atas menunjukkan bahwa titik menyebar pada sumbu X dan Y. dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas.

3. Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah dalam satu model regresi liner ada korelasi antara kesalahan penggunaan pada periode t dengan kesalahan pada periode $t-1$ (sebelumnya). Untuk menguji apakah suatu model terdapat Autokorelasi atau tidak maka dapat diperhatikan

pada uji Durbin Watson pada tabel regresi linear di atas dengan cara melihat (D-W) yang diperoleh yaitu 2.140572 maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi Autokorelasi.

2.6.2. Pembahasan Hasil Model Regresi

1. Variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB_KAP) mempunyai pengaruh yang positif terhadap kemiskinan

Hasil ini sejalan dengan teori kuznet yang menyatakan bahwa yang mengatakan pertumbuhan dan kemiskinan mempunyai korelasi yang sangat kuat, karena pada tahap awal proses pembangunan tingkat kemiskinan cenderung meningkat dan pada saat mendekati tahap akhir pembangunan jumlah penduduk miskin berangsur-angsur berkurang. Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator untuk melihat keberhasilan pembangunan dan merupakan syarat keharusan bagi pengurangan tingkat kemiskinan. Adapaun syarat kecukupannya ialah bahwa pertumbuhan ekonomi tersebut efektif dalam mengurangi tingkat kemiskinan. Artinya, pertumbuhan tersebut hendaklah menyebar disetiap golongan pendapatan. Termasuk di golongan penduduk miskin.

Berdasarkan para ahli dalam teori bahwa PDRB mempengaruhi tingkat kemiskinan dengan melalui sektor industri pertanian sebagai sektor utama penggerak pertumbuhan ekonomi. Sedangkan berdasarkan hasil penelitian yang saya lakukan adalah Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap kemiskinan atau dengan kata lain meningkatnya pertumbuhan ekonomi tidak mampu mengurangi kemiskinan. Kemungkinan yang terjadi adalah arus keuangan dan pendapatan dalam perekonomian di kabupaten

Pinrang hanya mengalir pada golongan masyarakat berpendapatan menengah keatas atau dengan kata lain terdapat ketidakmerataan pendapatan

2. Variabel Indeks Pembangunan Mempunyai Pengaruh Negatif Terhadap Kemiskinan

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia tidak memiliki pengaruh terhadap kemiskinan. Artinya setiap perubahan yang terjadi pada Indeks Pembangunan Manusia tidak akan berpengaruh apapun terhadap pengangguran. Berdasarkan teori IPM adalah ukuran komposit yang mencakup tiga dimensi utama: kesehatan (harapan hidup), pendidikan (angka melek huruf dan angka partisipasi sekolah), dan pendapatan (PDB per kapita). Dalam konteks penelitian ini peneliti menemukan bahwa, dimensi-dimensi ini tidak memiliki pengaruh langsung atau signifikan terhadap tingkat kemiskinan. IPM mungkin lebih cocok untuk mengukur perkembangan sosial dan kesejahteraan masyarakat secara umum daripada tingkat kemiskinan secara khusus.

Penelitian ini sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Bellante dan Jackson (2000) bahwa produktivitas akan mengalami peningkatan manakala penggunaan tenaga kerja juga mengalami peningkatan. Peningkatan produktivitas dalam hal ini peningkatan dalam pendidikan dan kesehatan yang termasuk dalam indeks pembangunan manusia, lebih lanjut Bellante dan Jackson menjelaskan apabila terjadinya peningkatan produktivitas tersebut akan mengurangi tingkat pengangguran.

Menurunnya tingkat kemiskinan karena IPM yang meningkat mengindikasikan bahwa IPM dapat meningkatkan produktivitas kerja manusia, yang akan meningkatkan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup layak. Kondisi ini dapat dijelaskan dimana IPM merupakan indeks komposit yang terbentuk dari indeks pendidikan masyarakat, indeks kesehatan masyarakat dan indeks kemampuan daya beli masyarakat (*purchasing power parity*).

Menurut Todaro (2006), mengatakan bahwa pembangunan manusia merupakan tujuan utama pembangunan itu sendiri. Pembangunan manusia memainkan peran dalam membentuk kemampuan sebuah negara dalam menyerap teknologi modern untuk mengembangkan kapasitas agar tercipta kesempatan kerja untuk mengurangi jumlah pengangguran guna melakukan pembangunan manusia yang berkelanjutan. Dengan teratasinya jumlah pengangguran, maka pendapatan akan meningkat sehingga akan berdampak pada peningkatan pembangunan manusia melalui peningkatan bagian pengeluaran rumah tangga yang dibelanjakan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Jadi, pengurangan pengangguran dapat mengakibatkan peningkatan indeks pembangunan manusia.

3. Variabel Pengangguran memiliki pengaruh yang positif terhadap kemiskinan

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pengangguran memiliki pengaruh yang positif terhadap kemiskinan. Artinya, Jika masyarakat tersebut bekerja pastinya masyarakat atau orang tersebut berkecukupan atau tingkat kesejahteraannya tinggi, namun dalam masyarakat terdapat

juga yang belum bekerja atau menganggur, pengangguran ini secara otomatis akan mengurangi kesejahteraan masyarakat yang akan mempengaruhi tingkat kemiskinan. Menurut Sukirno, efek buruk dari adanya pengangguran yaitu dapat mengurangi pendapatan masyarakat yang akan mengurangi tingkat kemakmuran yang dicapai seseorang. Jika kesejahteraan masyarakat semakin menurun karena menganggur maka hal ini akan meningkatkan peluang mereka untuk terjebak dalam kemiskinan karena mereka tidak memiliki pendapatan. Apabila pengangguran di suatu negara sangat buruk, kekacauan politik dan sosial selalu berlaku dan akan menimbulkan efek yang buruk bagi kesejahteraan masyarakat dan prospek pembangunan ekonomi dalam jangka panjang.

Berdasarkan pernyataan tersebut, maka pengangguran dan kemiskinan ini memiliki hubungan yang positif, artinya ketika tingkat pengangguran ini semakin meningkat maka kemiskinan juga ikut meningkat.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perkembangan kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara cukup fluktuatif dan sangat cepat berubah setiap tahunnya dengan banyaknya jumlah penduduk yang ada di Provinsi Sumatera Utara, penduduk miskin yang ada juga presentasinya besar terdapat beberapa factor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan itu sendiri antara lain bertambahnya Jumlah penduduk, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), PDRB dan juga pengangguran. akan tetapi pemerintah tidak serta merta menutup mata, maka dibuatkanlah program Kartu Indonesia Pintar, Kartu Prakerja, Jamkesmas PNPM dan masih banyak program lainnya. Dengan harapan bahwa dari program-program tersebut masyarakat menjadi terlatih dan memiliki skill yang dibutuhkan untuk keluar dari kemiskinan itu sendiri.
2. Hasil estimasi model Ekonometrika terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan hasilnya adalah positif dan sesuai dengan hipotesa penelitian dimana variabel Pengangguran, PDRB perkapita dan IPM bersama sama dan secara signifikan mempengaruhi pertumbuhan kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara.

5.2 Saran

1. Dalam proses pengentasan kemiskinan pasti ada banyak rintangan dan hambatan yang ada maka dari itu dalam menjalankan program pengentasan kemiskinan jangan ada setengah hati atau ogah-ogahan dari para pemangku kepentingan. Dalam hal penyaluran bantuan juga harus ada pengawasan yang ketat agar bantuan dapat mencapai sasaran dan mencapai tujuan yang diinginkan.
2. Membuka lapangan pekerjaan baru, mempermudah investasi agar dapat menyerap tenaga kerja serta memberi insentif daerah agar para investor tertarik berinvestasi di Sumatera Utara sehingga menyerap banyak tenaga kerja.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, F., & Alam, S. (2012). *Study Kebijakan Pemerintahan*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Arifianto, W., & Setiyono, I. (2013). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Distribusi Pendapatan di Indonesia. *Jurnal Universitas Negeri Surabaya*, 1(1), 1–16
- Arsyad, Lincolin. (2010). *Ekonomi Pembangunan*. Ed 5, Penerbit: AMP YKPN
- Arsyad, L. (1999). *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*. BPFE. Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik. (2019). *Produk Domestik Bruto (PDB)*.
(<https://www.bps.go.id/subject/169/produk-domestik-bruto--pengeluaran-.html>)
- Badan Pusat Statistik. (2022). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia tahun 2022 mencapai 72,91, meningkat 0,62 poin (0,86 persen) dibandingkan tahun sebelumnya (72,29).
(<https://www.bps.go.id/pressrelease/2022/11/15/1931/indeks-pembangunan-manusia--ipm--indonesia-tahun-2022-mencapai-72-91--meningkat-0-62-poin--0-86-persen--dibandingkan-tahun-sebelumnya--72-29-.html>)
- Badan Pusat Statistik. (2022). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sumatera Utara 2022 mencapai 72,71.
(<https://sumut.bps.go.id/pressrelease/2022/12/01/918/indeks-pembangunan-manusia--ipm--sumatera-utara-2022-mencapai--72-71.html>)

Badan Pusat Statistik. (2022). Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten Kota (000) (Jiwa), 2020-2022.

(<https://sumut.bps.go.id/indicator/23/72/1/jumlah-penduduk-miskin-menurut-kabupaten-kota-000-.html>)

Badan Pusat Statistik. (2022). Persentase Penduduk Miskin (P0) Menurut Provinsi dan Daerah 2021-2022.

(<https://www.bps.go.id/indicator/23/192/1/persentase-penduduk-miskin-menurut-provinsi.html>)

Badan Pusat Statistik. (2022). Persentase Penduduk Miskin Maret 2022 turun menjadi 9,54 persen.

(<https://www.bps.go.id/pressrelease/2022/07/15/1930/persentase-penduduk-miskin-maret-2022-turun-menjadi-9-54-persen.html>)

Badan Pusat Statistik. (2022). Persentase Penduduk Miskin Maret 2022 turun 0,07 poin menjadi 8,42 persen.

(<https://sumut.bps.go.id/pressrelease/2022/07/15/930/persentase-penduduk-miskin-maret-2022-turun-0-07-poin-menjadi-8-42persen.html>)

Badan Pusat Statistik. (2022). Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Kabupaten/Kota (rupiah) 2020-

2022. (<https://sumut.bps.go.id/indicator/52/471/1/produk-domestik-regional-bruto-per-kapita-atas-dasar-harga-konstan-2010-menurut-kabupaten-kota-rupiah-.html>)

Badan Pusat Statistik. (2022). Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Penduduk Umur 15 Tahun Keatas Menurut Kab/Kota (Persen), 2020-2022.

(<https://sumut.bps.go.id/indicator/6/44/1/tingkat-pengangguran-terbuka-tpt-penduduk-umur-15-tahun-keatas-manurut-kab-kota.html>)

Boediono. (2009). *Teori Pertumbuhan Ekonomi*. Yogyakarta: BPFE.

Conway, E. (2015). *50 Gagasan Ekonomi yang Perlu Anda Ketahui [50 Economic Ideas You Really Need to Know]*. Jakarta: Esensi Erlangga Group.

Ferian, D.D., Yusuf, E., & Gunanto, A. (2021). Analisis faktor penyebab kemiskinan dan bagaimana penanggulangannya: Studi empiris pada 29 kabupaten di Jawa Tengah 2014-2020. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 21(2), 123-134.

Gilarso. (2004). *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro*. Yogyakarta: Kanisius

Ginting, K. C. (2008). *Analisis Pembangunan Manusia di Indonesia*. (Tesis, Sekolah Pascasarjana, Magister Ekonomi Pembangunan, Universitas Sumatera Utara). Medan.

Gujarati, N. D. (2012). *Dasar-Dasar Ekonometrika*. Jakarta: Salemba

Herlina, N., & Komariah, M. (2017). Peran Pemerintah dalam Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Ciamis. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 5(2), 260–277.

Jhingan, M. L. (2010). *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan (Edisi ke-13)*. Jakarta: Rajawali Press

Jonaidi, A. (2012). Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi*, 1(1), 140-164

- Khodijah Ishak, SH.I, M. E. S. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengangguran Dan Inflikasinya terhadap Indek Pembangunan Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Ekonomi Kita*, 7(1), 22–38
- Kuncoro, A. (2001). *Cara Menggunakan dan Memaknai Analisis Asumsi Klasik*, Cetakan Pertama. Bandung: ALFABETA
- Kuncoro, M. (2000). *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah dan Kebijakan*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Kuncoro, M. (2018). *Metode Kuantitatif Teori Dan Aplikasi Untuk Bisnis Dan Ekonomi (Edisi Kelima)*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YPKN.
- Kuncoro, Mudrajad. (2013). *Strategi : Bagaimana Meraih Keunggulan Kompetitif*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Kuncoro, S. (2014). *Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran, dan Pendidikan Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2011* (Skripsi). Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta.
- Kurniawan, P. & Budhi, S. M. K. (2015). *Pengantar Ekonomi Mikro & Makro*. Yogyakarta: ANDI.
- Liwiya, Y., Pangkey, M. S., & Tampi, G. B. (2018). Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pengentasan Kemiskinan (Studi di Distrik Kuari Kabupaten Tolikara Provinsi Papua). *Jurnal Administrasi Publik*, 4(50).
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JAP/article/view/19034>

- Murdiyana & Mulyana. (2017). Analisis Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia. *Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja*, 10(1), 73–96.
- Raharja. 2014. Analisis Pengaruh Corporate Governance Terhadap Nilai Perusahaan. *Journal Of Accounting*, 3(1), 23-35
- Riska, F. (2016). Analisa Pengangguran di Indonesia. *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 1, 88-93.
- Soesastro, H., et al. (2005). *Pemikiran dan Permasalahan Ekonomi di Indonesia dalam Setengah Abad Terakhir Jilid I (1945-1959)*. Jakarta: Kanisius.
- Sukirno, S. (2002). *Makro Ekonomi Modern*. Jakarta: P.T. Rajawali Grafindo Persada.
- Sukirno, Sadono. (2002). Pengantar Teori Ekonomi Mikro. Edisi ketiga. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Sukmaraga, P. (2011). *Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, PDRB Per Kapita, dan Jumlah Pengangguran Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Provinsi Jawa Tengah*. (Skripsi, Fakultas Ekonomi, Universitas Diponegoro). Semarang.
- Suripto, A. S. (2005). Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan dalam Rangka Membangun Kesejahteraan Masyarakat di Era Otonomi Daerah (Studi Kasus di Kabupaten Sragen) [Universitas Muhamadiyah Surakarta]. In Tesis. http://eprints.ums.ac.id/6781/1/R100020_052.pdf
- TNP2K. (2022). TNP2K - Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Retrieved May 17, 2023, from Tnp2k.go.id website:

<https://tnp2k.go.id/acceleration-policies/pengurangan-kemiskinan-ekstrem-di-7-provinsi-dan-35-kabupaten-prioritas-tahun-2021>

Todaro, M.P. & Smith, S.C. (2011). *Economic Development (11th ed)*. New York: Pearson.

Tohar. (2000). *Membuka Usaha Kecil*. Yogyakarta: Kanisius

Wirawan, I. T., & Arka, S. (2015). Analisis Pengaruh Pendidikan, PDRB Per Kapita Dan Tingkat Pengangguran Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Bali. *Jurnal Ep Unud*, 546-560.

Lampiran :

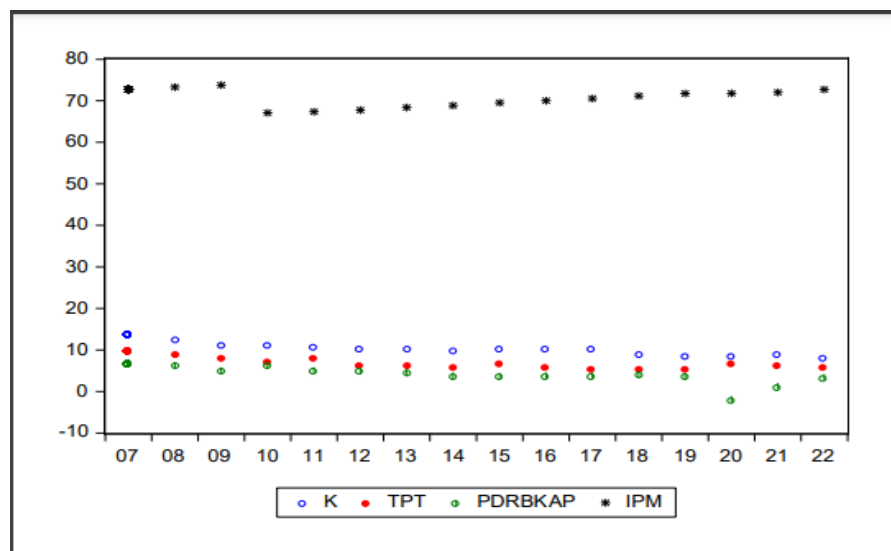
Tahun	K	TPT	PDRBKap	IPM
2007	13.90	10.10	6.90	72.78
2008	12.47	9.10	6.39	73.29
2009	11.27	8.45	5.07	73.80
2010	11.36	7.43	6.42	67.09
2011	10.83	8.18	5.11	67.34
2012	10.41	6.28	4.96	67.74
2013	10.39	6.45	4.65	68.36
2014	9.85	6.23	3.88	68.87
2015	10.53	6.71	3.81	69.51
2016	10.35	5.84	3.94	70
2017	10.35	5.60	3.95	70.57
2018	9.22	5.55	4.06	71.18
2019	8.83	5.39	3.61	71.74
2020	8.75	6.91	-1.84	71.77
2021	9.01	6.33	1.36	72
2022	8.42	6.16	3.48	72.71

Dependent Variable: K				
Method: Least Squares				
Date: 09/03/23 Time: 17:50				
Sample: 2007 2022				
Included observations: 16				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
TPT	0.680896	0.139190	4.891846	0.0004
PDRBKAP	0.296723	0.089841	3.302764	0.0063
IPM	-0.042827	0.077486	-0.552708	0.5906
C	7.461861	5.273536	1.414963	0.1825
R-squared	0.863057	Mean dependent var	10.37125	
Adjusted R-squared	0.828821	S.D. dependent var	1.440879	
S.E. of regression	0.596146	Akaike info criterion	2.015655	
Sum squared resid	4.264678	Schwarz criterion	2.208802	
Log likelihood	-12.12524	Hannan-Quinn criter.	2.025546	
F-statistic	25.20922	Durbin-Watson stat	1.133194	
Prob(F-statistic)	0.000018			

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey				
F-statistic	0.205127	Prob. F(3,12)	0.8909	
Obs*R-squared	0.780483	Prob. Chi-Square(3)	0.8541	
Scaled explained SS	0.454025	Prob. Chi-Square(3)	0.9289	
Test Equation: Dependent Variable: RESID^2 Method: Least Squares Date: 09/03/23 Time: 17:58 Sample: 2007 2022 Included observations: 16				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-1.976119	3.818890	-0.517459	0.6142
TPT	-0.064430	0.100796	-0.639216	0.5347
PDRBKAP	0.035656	0.065059	0.548057	0.5937
IPM	0.036032	0.056113	0.642140	0.5329
R-squared	0.048780	Mean dependent var	0.266542	
Adjusted R-squared	-0.189025	S.D. dependent var	0.395906	
S.E. of regression	0.431706	Akaike info criterion	1.370172	
Sum squared resid	2.236437	Schwarz criterion	1.563319	
Log likelihood	-6.961379	Hannan-Quinn criter.	1.380063	
F-statistic	0.205127	Durbin-Watson stat	1.770169	
Prob(F-statistic)	0.890873			

Correlation

	K	TPT	PDRBKAP	IPM
K	1.000000	0.837219	0.750997	0.031468
TPT	0.837219	1.000000	0.479556	0.261261
PDRBKAP	0.750997	0.479556	1.000000	-0.169578
IPM	0.031468	0.261261	-0.169578	1.000000



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. DATA PRIBADI

Nama : Nailly Ulyah Masni
NPM : 1905180013
Tempat dan Tanggal Lahir : Medan, 09 Agustus 2001
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Bandar Labuhan Bawah No.06
Tanjung Morawa
Anak Ke : 1 (satu) dari 3 (tiga) bersaudara

2. DATA ORANG TUA

Nama Ayah : Mashen Indriya, SE
Nama Ibu : Rohani Panjaitan, SE
Alamat : Jl. Bandar Labuhan Bawah No.06
Tanjung Morawa

3. DATA PENDIDIKAN FORMAL

1. Tahun 2007 – 2013 : SDN 105855 PTPN II Tanjung Morawa
2. : MTsN Tanjung Morawa
3. Tahun 2013 – 2016 : MTsN Tanjung Morawa
4. Tahun 2016 – 2019 : MAN 2 Model Medan
5. Tahun 2019 – 2023, tercatat sebagai Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Ekonomi Pembangunan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Medan, Agustus 2023

NAILY ULYAH MASNI



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Lengkap : Nailly Ulyah Masni
NPM : 1905180013
Program Studi : Analisis Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara

Tanggal	Deskripsi Bimbingan Skripsi	Paraf	Keterangan	
08-02-2023	Bab 1 : - Masukkan data pendahuluan - Tambahkan lagi 1si latar belakang - Perbaiki identitas mslh, mslh peneliti	}		
	Bab 2 : - Ubah rumusan pembatas - Masukkan kejudu mengjut keemudian			h
	Bab 3 : - Gantikan analisis regresi - Perbaiki alat analisis - Perbaiki dan perbaiki kreasi pada			-
10-04-2023	- Perbaiki gambar kerangka konseptual - Perbaiki hipotesis - Lengkapi tabel 3 sesuai arahan	} h		
08-05-2023	Telah selesai diperbaiki dan lengkap untuk seminar proposal.	} h		

Medan, April 2023

Pembimbing

Diketahui /Disetujui
Ketua Program Studi
Ekonomi Pembangunan

Dra. Hj. LAILAN SAFINA HASIBUAN, M.Si Dr. PRAWIDYA HARIANI RS, SE, M.Si



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH PIMPINAN PUSAT
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Tel. (061) 6624567 Ext: 304 Medan 220238



PENGESAHAN PROPOSAL

Berdasarkan hasil Seminar proposal Program Studi Ekonomi Pembangunan yang diselenggarakan pada hari **Kamis, 11 Mei 2023** menerangkan bahwa:

Nama : Nailly Ulyah Masni
N .P.M. : 1905180013
Tempat / Tgl.Lahir : Medan, 09 Agustus 2001
Alamat Rumah : Bandar Labuhan Bawah No.6 Tj Morawa
JudulProposal : Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Di Provinsi Sumatera Utara

Proposal dinyatakan syah dan memenuhi Syarat untuk menulis Skripsi dengan pembimbing : **Dra.Hj. Lailan Safina Hasibuan. M.Si**

Medan, Kamis, 11 Mei 2023

TIM SEMINAR

Ketua

Dr.Prawidya Hariani RS,SE.,M.Si.

Sekretaris

Dra.Hj.Roswita Hafni, M.Si.

Pembimbing

Dra.Hj. Lailan Safina Hasibuan. M.Si

Pemanding

Dr. Prawidya Hariani. RS, S.E., M.Si.w

Diketahui / Disetujui
A.n. Dekan
Wakil Dekan - I

Assoc.Prof. Dr. Ade Gunawan, S.E., M.Si.



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH PIMPINAN PUSAT
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 ☎ (061) 6624567 Ext: 304 Medan 20238

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL

Pada hari ini Kamis, 11 Mei 2023 telah diselenggarakan seminar Proposal Program Studi Ekonomi pembangunan menerangkan bahwa :

N a m a : Naily Ulyah Masni
N .P.M. : 1905180013
Tempat / Tgl.Lahir : Medan, 09 Agustus 2001
Alamat Rumah : Bandar Labuhan Bawah No.6 Tj Morawa
JudulProposal : Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Di Provinsi Sumatera Utara

Disetujui / tidak disetujui *)

Item	Komentar
Judul	- Judulnya diubah/ditambah "Kemiskinan Ekstrem"
Bab I	- Masukkan "Kemiskinan Ekstrem"
Bab II	- Perbaiki landasan teori, Masukkan Kebijakan Penerimaan
Bab III	
Lainnya	
Kesimpulan	<input checked="" type="checkbox"/> Lulus <input type="checkbox"/> Tidak Lulus

Medan, Kamis, 11 Mei 2023

TIM SEMINAR

Ketua

Dr.Prawidya Hariani RS, SE.,M.Si.

Pembimbing

Dra.Hj. Lailan Safina Hasibuan. M.Si

Sekretaris

Dra.Hj.Roswita Hafni, M.Si.

Pembanding

Dr. Prawidya Hariani. RS, S.E., M.Si.w



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERMOHONAN JUDUL PENELITIAN

No. Agenda: 2540/JDL/SKR/MAN/FEB/UMSU/21/11/2022

Kepada Yth.
Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
di Medan

Medan, 21/11/2022

Dengan hormat.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Naily Ulyah Masni
NPM : 1905180013
Program Studi : Ekonomi Pembangunan
Konsentrasi : Perencanaan Pembangunan Daerah

Dalam rangka proses penyusunan skripsi, saya bermohon untuk mengajukan judul penelitian berikut ini:

Identifikasi Masalah : Menganalisis suatu masalah terhadap judul yang diajukan

Rencana Judul : 1. Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Medan Tahun 2015 - 2022
2. Analisis Pengaruh Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Dampaknya Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Sumatera Utara Tahun 2015 - 2022
3. Analisis Pengaruh Pengangguran Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan Di Kota Medan Tahun 2015 - 2022

Objek/Lokasi Penelitian : Bps Kota Medan

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya
Pemohon

(Naily Ulyah Masni)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERSETUJUAN JUDUL PENELITIAN

Nomor Agenda: 2540/JDL/SKR/MAN/FEB/UMSU/21/11/2022

Nama Mahasiswa : Nailly Ulyah Masni
NPM : 1905180013
Program Studi : Ekonomi Pembangunan
Konsentrasi : Perencanaan Pembangunan Daerah
Tanggal Pengajuan Judul : 21/11/2022
Nama Dosen Pembimbing*) : Dra. Hj. Lailan Safina Hasibuan, M.Si
Judul Disetujui**) : Analisis Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan
di Provinsi Sumatera Utara.

Disahkan oleh:
Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan

(Dr. Prawidya Hariani RS., SE., M.Si.)

Medan, 22 November 2022

Dosen Pembimbing

(Dra. Lailan Safina, M.Si.)

Keterangan:

*) Diisi oleh Pimpinan Program Studi

**) Diisi oleh Dosen Pembimbing

Setelah disahkan oleh Prodi dan Dosen pembimbing, scan/foto dan uploadlah lembaran ke-2 ini pada form online "Upload Pengesahan Judul Skripsi"



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://feb.umsu.ac.id> feb@umsu.ac.id [fumsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

**PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING
PROPOSAL / SKRIPSI MAHASISWA**

NOMOR : 1069 / TGS / II.3-AU / UMSU-05 / F / 2023

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, berdasarkan Persetujuan permohonan judul penelitian Proposal / Skripsi dari Ketua / Sekretaris :

Program Studi : **Ekonomi Pembangunan**
Pada Tanggal : **5/8/2023**

Dengan ini menetapkan Dosen Pembimbing Proposal / Skripsi Mahasiswa :

Nama : **Naily Ulyah Masni**
N P M : **1905160013**
Semester : **VIII (Delapan)**
Program Studi : **Ekonomi Pembangunan**
Judul Proposal / Skripsi : **Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Di Provinsi Sumatera Utara**

Dosen Pembimbing : **Dra. Hj. Lailan Safina Hasibuan, M.Si.**

Dengan demikian di izinkan menulis Proposal / Skripsi dengan ketentuan :

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Proposal/ Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.
2. Pelaksanaan Sidang Skripsi harus berjarak 3 bulan setelah dikeluarkannya Surat Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi
3. **Proyek Proposal / Skripsi** dinyatakan " **BATAL** " bila tidak selesai sebelum Masa Daluarsa tanggal : **08 Mei 2024**
4. Revisi Judul.....

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : **17 Syawal 1444 H**
08 Mei 2023 M



Dekan

Dr. H. JANURI, SE., MM., M.Si.
NIDN : 0109086502

Tembusan :

1. Pertinggal

